

**PENGARUH STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH, SISTEM PELAPORAN,  
DAN KEJELASAN SASARAN ANGGARAN TERHADAP AKUNTABILITAS  
KINERJA PEMERINTAH DENGAN PENGENDALIAN AKUNTANSI  
SEBAGAI VARIABEL MODERASI  
(Studi Pada Pemerintah Kabupaten Bulukumba)**



**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Syarat Meraih Gelar Sarjana Akuntansi  
Jurusan Akuntansi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
UIN Alauddin Makassar

Oleh:

**FIFI JULIASTUTI SYARIF**

**90400117050**

**JURUSAN AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR**

**2022**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Fifi Juliastuti Syarif

NIM : 90400117050

Tempat/Tgl. Lahir : Bulukumba, 16 Juli 1999

Jur/Prodi/Konsentrasi : Akuntansi

Fakultas/Program : Ekonomi dan Bisnis Islam

Alamat : Perum. Graha Cipta Hertasning, A1/12

Judul : Pengaruh Standar Akuntansi Pemerintah, Sistem Pelaporan, dan Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Dengan Pengendalian Akuntansi Sebagai Variabel Moderasi

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Gowa, April 2022

Penyusun,

**Fifi Juliastuti Syarif**

NIM : 90400117050



### PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi ini berjudul **“Pengaruh Standar Akuntansi Pemerintah, Sistem Pelaporan dan Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dengan Pengendalian Akuntansi Sebagai Variabel Moderasi”**, yang disusun oleh **FIFI JULIASTUTI SYARIF, NIM 90400117050**, Mahasiswa Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang munaqasah yang diselenggarakan pada tanggal 23 Maret 2022 bertepatan dengan 20 Sha’ban 1443 H, dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.

Samata-Gowa, 23 Maret 2022

20 Sha’ban 1443 H

### DEWAN PENGUJI

Ketua :	Prof. Dr. H. Abustani Ilyas, M.Ag	(.....)
Sekretaris	Dr. Muh. Wahyuddin Abdullah, SE., M.Si., Ak	(.....)
:	:	(.....)
Penguji I	Dr. Jamaluddin M. SE., M.Si.	(.....)
Penguji II	Hj. Wahidah Abdullah, S.Ag., M.Ag	(.....)
Pembimbing I	Memem Suwandi, SE., M.Si	(.....)
Pembimbing II	Nur Rahma Sari, SE., M.Acc	(.....)

Diketahui oleh:  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN  
Alauddin Makassar



Prof. Dr. H. Abustani Ilyas, M.Ag.  
1130 199303 1 003

## KATA PENGANTAR



Segala puji dan syukur penulis haturkan atas kehadiran Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat serta salam tak lupa penulis haturkan kepada Nabiullah Muhammad saw. Nabi yang memberi citra kepada manusia tentang bagaimana dan cara beretika sesuai tuntunan wahyu. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat meraih gelar sarjana pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dengan judul **“Pengaruh Standar Akuntansi Pemerintah, Sistem Pelaporan, dan Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Dengan Pengendalian Akuntansi Sebagai Variabel Moderasi (Studi Pada Pemerintah Kabupaten Bulukumba)”**.

Dalam penyelesaian skripsi ini, penulis mengalami banyak hambatan dan kesulitan. Namun, berkat bantuan dan dukungan dari berbagai pihak yang telah senantiasa membantu memudahkan langkah penulis. Melalui tulisan ini, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tulus kepada seluruh pihak yang telah membantu, membimbing dan memberi dukungan dalam penyelesaian skripsi ini.

Kasih yang tulus dan penghargaan yang setinggi-tingginya serta ucapan terima kasih penulis ucapkan secara khusus kepada orang tua tercinta, Ayahanda Syarifuddin, S.Sos., M.AP., dan Ibunda Nuraida yang telah membesarkan, mendidik dan senantiasa memberikan dukungan, bantuan, dengan dibarengi doa yang tiada henti agar penulis sukses dalam menggapai cita-cita. Orang tua

terhebat dan motivasi terbesar penulis dalam menyelesaikan studi. Terima kasih pula penulis ucapkan kepada kakak-kakakku Nurfaina Syarif dan Ireng Maula, serta adik-adikku Ahmad Abid Ramadhan dan Alifiyah Rezky Maula yang tak hentinya membimbing dan memberikan semangat untuk mengerjakan skripsi ini. Beserta seluruh keluarga besar tercinta atas dukungan dan supportnya kepada penulis.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak, oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis ucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. H. Hamdan Juhannis, M.Ag.,Ph.D., selaku Rektor beserta Wakil Rektor I, II, III, dan IV UIN Alauddin Makassar.
2. Bapak Prof. Dr. H. Abustani Ilyas, M.Ag selaku Dekan beserta Wakil Dekan I, II, dan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar.
3. Bapak Memen Suwandi, S.E., M.Si selaku Ketua Jurusan Akuntansi UIN Alauddin Makassar
4. Ibu Dr. Lince Bulutoding, S.E., M.Si., Ak.CA selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi UIN Alauddin Makassar.
5. Bapak Memen Suwandi, S.E., M.Si selaku Dosen Pembimbing I, yang dengan keikhlasannya telah bersedia meluangkan waktu ditengah kesibukannya dan memberikan bimbingan serta petunjuk kepada penulis sampai selesainya skripsi ini .
6. Ibu Nur Rahma Sari, S.E., M.Acc selaku Dosen Pembimbing II sekaligus penasehat akademik, yang senantiasa meluangkan waktu dan pikirannya

untuk memberikan bimbingan, pengarahan, dan masukan yang sangat berharga kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.

7. Bapak Dr. Mustakim Muchlis, S.E., M.Si., Ak., CA, Bapak Sumarlin, S.E., M.Ak. dan Bapak Mustafa Umar, S.Ag., M.Ag selaku penguji komprehensif yang telah meluangkan waktunya selama proses ujian komprehensif ini hingga penulis dapat melanjutkan ke proses selanjutnya.
8. Bapak Dr. Jamaluddin Majid, SE., M.Si selaku dosen penguji I yang telah meluangkan waktunya selama proses ujian dan memberikan kritik serta sarannya demi kesempurnaan skripsi ini.
9. Ibu Hj. Wahidah Abdullah, S.Ag., M. Ag selaku dosen penguji yang telah meluangkan waktunya selama proses ujian dan memberikan kritik serta sarannya demi kesempurnaan skripsi ini.
10. Segenap dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar yang telah memberikan bekal ilmu dan pengetahuan yang bermanfaat.
11. Segenap staf akademik, staf tata usaha, serta staf jurusan Akuntansi UIN Alauddin Makassar yang telah memberikan pelayanan terbaik selama penulis melakukan studi dan penyelesaian skripsi.
12. Pemerintah Kabupaten Bulukumba yang telah memberi izin kepada penulis untuk melakukan penelitian serta responden yang telah menyempatkan memberikan tanggapan kepada penulis dalam penelitian.
13. Rama Linda Septian Anggrayeni dan Hasnurul Baharuddin selaku sahabat seperjuangan yang senantiasa mendoakan, memberi dukungan, membantu

dan menemani dari awal menjadi mahasiswa baru hingga penyusunan skripsi ini.

14. Sahabat-sahabatku Jihan Marifah, A.Nurul Fadilah, Sri Eka Wahyuni, Andi Afifah Aulia, Andi Mukhlisa Inaya, dan Adhe Librayanhi Sept Putri yang selalu memberikan dukungan dan motivasi selama penyusunan skripsi ini.
15. Teman-teman Akuntansi B 2017, terima kasih sudah menjadi partner berjuang selama perkuliahan hingga semester berakhir.
16. Teman-teman L17ERASI Akuntansi angkatan 2017, terima kasih atas motivasi dan persaudaraan selama penulis menempuh pendidikan di UIN Alauddin Makassar.
17. Semua pihak yang tidak sempat penulis sebutkan satu persatu, yang telah memberikan kontribusi selama proses penyelesaian skripsi.

Penulis berharap agar skripsi ini dapat bermanfaat dan dapat memberikan pengetahuan baru terhadap para pembaca. Penulis menyadari masih ada kekurangan dalam skripsi ini. Namun besar harapan penulis sekiranya dapat bermanfaat bagi penelitian-penelitian selanjutnya, terkhusus di bidang Akuntansi. Semoga bernilai ibadah di sisi Allah SWT.

Gowa,       Maret 2022

**Fifi Juliastuti Syarif**  
NIM : 90400117050

## DAFTAR ISI

<b>SAMPUL</b> .....	i
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	ii
<b>PENGESAHAN SKRIPSI</b> .....	iii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	iv
<b>DAFTAR ISI</b> .....	viii
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	x
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	xii
<b>ABSTRAK</b> .....	xiii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian .....	10
D. Manfaat Penelitian .....	11
E. Defisini Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian.....	12
F. Penelitian Terdahulu .....	12
<b>BAB II TINJAUAN TEORITIS</b> .....	20
A. Teori Agency .....	20
B. Teori Akuntabilitas .....	21
C. Standar Akuntansi Pemerintah .....	23
D. Sistem Pelaporan .....	26
E. Kejelasan Sasaran Anggaran .....	29
F. Pengendalian Akuntansi.....	30
G. Akuntabilitas Kinerja Pemerintah.....	32
H. Pengembangan Hipotesis .....	34



I. Kerangka Pikir .....	41
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>43</b>
A. Jenis Penelitian .....	43
B. Pendekatan Penelitian .....	43
C. Populasi dan Sampel .....	43
D. Jenis dan Sumber Data.....	46
E. Metode Pengumpulan Data .....	47
F. Instrumen Penelitian .....	47
G. Teknik Analisis Data.....	48
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>57</b>
A. Gambaran Umum Objek Penelitian.....	57
B. Gambaran Responden .....	67
C. Hasil Uji Kualitas Data .....	78
D. Hasil Uji Asumsi Klasik.....	81
E. Hasil Uji Hipotesis.....	85
F. Pembahasan .....	96
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>106</b>
A. Kesimpulan.....	106
B. Keterbatasan Penelitian.....	107
C. Saran.....	108
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>109</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>115</b>
<b>RIWAYAT HIDUP</b>	

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu .....	17
Tabel 3.1 Daftar SKPD Kabupaten Bulukumba .....	44
Tabel 4.1 Persentase Jenis Kelamin Responden .....	67
Tabel 4.2 Persentase Usia Responden .....	68
Tabel 4.3 Persentase Latar Belakang Pendidikan Responden .....	69
Tabel 4.4 Persentase Tingkat Pendidikan Responden .....	69
Tabel 4.5 Persentase Masa Kerja Responden .....	70
Tabel 4.6 Statistik Deskriptif Variabel .....	71
Tabel 4.7 Deskriptif Item Pernyataan Variabel Standar Akuntansi Pemerintah...73	
Tabel 4.8 Deskriptif Item Pernyataan Variabel Sistem Pelaporan .....	74
Tabel 4.9 Deskriptif Item Pernyataan Variabel Kejelasan Sasaran Anggaran ....75	
Tabel 4.10 Deskriptif Item Pernyataan Variabel Pengendalian Akuntansi .....	76
Tabel 4.11 Deskriptif Item Pernyataan Variabel Akuntabilitas Kinerja Pemerintah .....	77
Tabel 4.12 Hasil Uji Validitas .....	79
Tabel 4.13 Hasil Uji Reliabilitas .....	80
Tabel 4.14 Hasil Uji Normalitas – One Sample Kolmogorov-Smirnov Test .....	81
Tabel 4.15 Hasil Uji Multikolinearitas .....	83
Tabel 4.16 Hasil Uji Heterokedasitas .....	84
Tabel 4.17 Hasil Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ ) .....	86

Tabel 4.18 Hasil Uji Regresi Secara Simultan (Uji F) .....	86
Tabel 4.19 Hasil Uji Regresi Secara Parsial (Uji T) .....	87
Tabel 4.20 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R <sup>2</sup> ) .....	91
Tabel 4.21 Hasil Uji Regresi Secara Simultan (Uji F) .....	91
Tabel 4.22 Hasil Uji Regresi Secara Parsial (Uji T) .....	92



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pikir .....	42
Gambar 4.1 Peta Administrasi Kabupaten Bulukumba .....	59
Gambar 4.2 Lambang Kabupaten Bulukumba .....	62
Gambar 4.3 Bagan Struktur Organisasi Pemerintah Kabupaten Bulukumba ....	64
Gambar 4.4 Hasil Uji Normalitas – Normal Probability Plot.....	82



## ABSTRAK

**Nama** : Fifi Juliastuti Syarif  
**NIM** : 90400117050  
**Judul** : **Pengaruh Standar Akuntansi Pemerintah, Sistem Pelaporan, dan Kejelasan Sasaran Anggaran terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dengan Pengendalian Akuntansi sebagai Variabel Moderasi**

---

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh standar akuntansi pemerintah, sistem pelaporan, dan kejelasan sasaran anggaran terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah dengan pengendalian akuntansi sebagai variabel moderasi. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan pendekatan penelitian asosiatif. Penelitian ini dilakukan pada Pemerintah Kabupaten Bulukumba

Penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling* dengan jumlah responden 102. Metode pengumpulan data yaitu menggunakan kuesioner yang dibagikan secara langsung. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data primer yang di kumpul melalui survey kuesioner. Analisis data menggunakan analisis regresi berganda untuk mengetahui pengaruh standar akuntansi pemerintah, sistem pelaporan, dan kejelasan sasaran anggaran. Sedangkan uji moderasi menggunakan *Moderate Regression Analysis (MRA)* atau uji interaksi.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa standar akuntansi pemerintah, sistem pelaporan, dan kejelasan sasaran anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah. Pengendalian akuntansi mampu memoderasi standar akuntansi pemerintah dan sistem pelaporan terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah, sedangkan pengendalian akuntansi tidak memoderasi kejelasan sasaran anggaran terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah.

**Kata Kunci** : **Standar Akuntansi Pemerintah, Sistem Pelaporan, Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi, Akuntabilitas Kinerja Pemerintah.**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### ***A. Latar Belakang***

Setiap negara menginginkan terselenggaranya pemerintahan yang baik (*good governance*) sebagai syarat bagi pemerintahan dalam mewujudkan aspirasi warga serta mencapai cita-cita bangsa dan Negara. Oleh karena itu, sistem akuntabilitas yang terukur dan legal perlu dikembangkan dan dilaksanakan agar pemerintahan dan penyelenggaraan pembangunan bersih serta bertanggungjawab dan bebas dari budaya korupsi, kolusi, serta nepotisme (Rosliyanti, 2014). Pemberlakuan aturan penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual diungkapkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang SAP sebagai kewajiban dari Undang-Undang (UU) Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara mengimplikasikan kebijakan reformasi keuangan negara/daerah dalam rangka penyelenggaraan *good governance* pada pemerintah pusat dan daerah dalam satu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Salah satu prinsip strategis yang perlu dikembangkan saat ini adalah prinsip tata kelola keuangan. Untuk menerapkan prinsip-prinsip tata kelola keuangan yang baik, sistem dan kelembagaan harus diperkuat sesuai dengan standar penyajian laporan keuangan yang berlaku serta perundang-undangan (Nasution, 2019).

Dalam proses globalisasi, peningkatan kinerja sektor pelayanan publik sangat membutuhkan akuntabilitas untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) serta pemerintahan yang bersih (*clean government*). Sangat diharapkan

peningkatan pelayanan publik pada instansi pemerintah semakin memuaskan terhadap masyarakat seiring dengan semakin banyaknya tuntutan dan kebutuhan masyarakat terhadap sektor pelayanan publik (Rangkuti, 2018). Pemerintah dituntut untuk melaksanakan pemerintahan dengan transparan dan akuntabel. Tuntutan dari masyarakat yang mengharapkan adanya penyelenggaraan tata kelola yang baik dari pemerintahan melalui penerapan sistem pertanggungjawaban yang terukur dan yang sah berdasarkan undang-undang atau peraturan yang berlaku. Dengan demikian, pengelolaan pemerintahan akan terlaksana secara bersih dan menghindari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (Nurina & Yahya, 2016). Oleh karena tuntutan akuntabilitas kepada instansi publik di daerah ataupun pusat, mengakibatkan semua instansi pemerintah perlu mewujudkan pertanggungjawaban, mengukur kinerja, dan melaporkannya.

Akuntabilitas secara akurat tersebut tertuang dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang menyatakan bahwa dalam rangka lebih meningkatkan pelaksanaan demi terwujudnya pemerintahan yang lebih efisien, efektif, bersih dan akuntabel, diyakini perlu adanya laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah untuk menentukan visi, misi, dan kemampuan organisasi dalam mencapai tujuan organisasi (Ali Zakiyudin & Suyanto, 2015). Akuntabilitas diyakini mampu memperbaiki keadaan pemerintahan yang korup dalam tatanan pemerintahan yang demokratis, tidak mampu memberikan pelayanan publik yang baik. Penyelenggaraan pemerintah yang akuntabel mendapatkan dukungan dari publik, sebab akuntabilitas

menggambarkan komitmen pemerintah dalam melayani publik (Fauzan, 2017). Asas akuntabilitas bermakna semua kegiatan kenegaraan dan hasil akhirnya harus dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat menurut undang-undang yang berlaku sebagai pemegang kedaulatan tertinggi di suatu negara. Salah satu cara untuk mengukur akuntabilitas disuatu pemerintahan daerah yaitu dengan cara melihat kinerja pemerintah itu sendiri (Kurniawan, 2018). Akuntabilitas kinerja sebagai langkah terpenting menuju sebuah pemerintahan yang baik berkaitan dengan bagaimana sebuah instansi pemerintah mampu mempertanggungjawabkan anggaran Negara untuk sepatutnya pelayanan publik menuju suatu tatanan pemerintahan yang demokratis.

Pengelolaan keuangan daerah belum bisa dikategorikan sempurna dalam pelaksanaannya, masih adanya kendala - kendala yang perlu diperbaiki di dalamnya. Secara khusus terdapat permasalahan akuntansi yang menjadi salah satu kendala teknis bagi pelaksana pengelolaan keuangan daerah dalam situasi tertentu, seperti implementasi standar akuntansi pemerintah yang merupakan kebijakan akuntansi yang wajib diterapkan pada pengelolaan keuangan Negara saat ini (Nasution, 2018). Standar Akuntansi Pemerintahan sebagai pedoman pembuatan laporan keuangan berguna agar memenuhi keperluan umum digunakan dalam mengukur akuntabilitas, serta mengevaluasi ketetapan ekonomi, sosial, dan politik yang lebih baik untuk pengguna laporan keuangan serta membantu memenuhi kebutuhan informasi keuangan. Penerapan akuntansi keuangan membantu



meningkatkan kemampuan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah untuk menyajikan informasi tentang tujuan, fungsi, dan objek pengeluaran (Ajhar, Akram, 2015). Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan di Indonesia juga didukung oleh banyaknya peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Semua aturan hukum tersebut merupakan sebuah unsur wajib yang harus dipatuhi agar tidak menimbulkan penyimpangan ataupun penyelewengan, yang menjadi penghambat akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (Nurina & Yahya, 2016).

Sistem pelaporan yang pelaksanaannya baik juga sangat dibutuhkan bagi manajemen untuk melihat serta mengelola kinerja terhadap pelaksanaan anggaran yang telah diputuskan. Selaku penyelenggara dana masyarakat, pemerintah wajib bisa mempersiapkan informasi keuangan yang penyajiannya secara cermat, tepat, tetap serta bisa diandalkan (Widaryanti & Pancawardani, 2020). Sistem pelaporan kinerja sebagai sebuah bentuk pertimbangan kewajiban atau pertanggungjawaban untuk melaporkan semua kegiatan dan sumber daya yang bisa dipertanggungjawabkan. Laporan keuangan yang dihasilkan telah memenuhi Standar Akuntansi Pemerintah serta syarat-syarat penyajian laporan keuangan organisasi pemerintahan, maka sistem pelaporan keuangan dikatakan baik (Dewata et al., 2020). Fenomena yang umum terjadi saat ini adalah keterlambatan dalam sistem pelaporan. Hal ini mengakibatkan rumitnya proses realisasi anggaran yang pada akhirnya berdampak pada kinerja yang buruk (AR et al., 2018). Dengan demikian, agar bisa meninjau serta mengendalikan pekerjaan manajemen diperlukan ketepatan sistem pelaporan saat menerapkan anggaran yang sudah diputuskan.

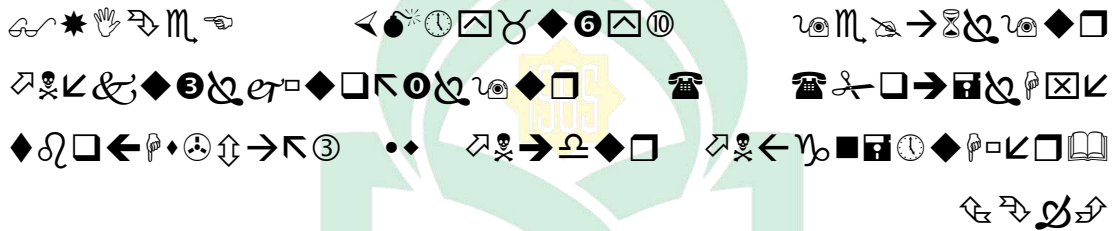
Akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah tidak terlepas dari anggaran pemerintah daerah. Sumber daya tersebut dikelola membutuhkan anggaran agar memberikan kinerja yang diinginkan rakyat serta akuntabilitas terhadap rakyat dapat tercipta (Ali Zakiyudin & Suyanto, 2015). Dengan adanya kejelasan sasaran anggaran dapat mempermudah agar mempertimbangkan pertanggungjawaban atas kegagalan ataupun keberhasilan dalam melakukan tugas organisasi sehingga tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai. Adanya tujuan anggaran yang tidak pasti dapat mengakibatkan pelaksanaan anggaran yang tidak aman dan ketidakpuasan dalam bekerja (Masruhin & Kaukab, 2019). Selain itu, dengan adanya kejelasan sasaran anggaran aparat penganggaran secara tidak langsung akan turut mempengaruhi efisiensi aparat dalam kinerjanya. Salah satu penyebab terjadinya tidak efektif dan efisiensi anggaran adalah adanya ketidakjelasan sasaran anggaran, sehingga menyulitkan aparat pemerintah daerah dalam menerapkan target anggaran (Yulianti et al., 2014). Seringkali terdapat berbagai kendala dalam penganggaran ataupun pelaksanaannya, sehingga untuk menemukan dan menghindari kendala tersebut membutuhkan peran pengendalian akuntansi yang baik.

Pengendalian akuntansi merupakan pengujian terhadap pengendalian yang berkaitan dengan tugas atau transaksi akuntansi. Pengendalian akuntansi dilakukan untuk melaksanakan pengujian terhadap sistem perencanaan, sistem pencatatan transaksi dan prosedur monitoring yang didasarkan pada sistem informasi (Ali Zakiyudin & Suyanto, 2015). Dengan penggunaan sistem pengendalian akuntansi, manajemen dapat menghasilkan keputusan-keputusan yang lebih baik, mengelola

operasi menjadi lebih efektif, mampu memperkirakan biaya dan profitabilitas dari keberhasilan tertentu, dan mengatasi setiap kasus dan masalah untuk meningkatkan kinerja. Adanya pengendalian akuntansi memungkinkan instansi pemerintah untuk menilai apakah aktifitas yang dilakukan oleh pemerintah tersebut telah ekonomis, efisien, dan efektif dalam melayani masyarakat dari instansi pemerintah daerah. Hal tersebut adalah bagian dari indikator kinerja pemerintah daerah. Pencapaian indikator itu adalah capaian yang bisa memajukan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah (Pratama et al., 2020). Oleh sebab itu, jika pengendalian akuntansi yang diterapkan semakin tinggi, semakin besar peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah.

Masyarakat menuntut agar pemerintah menjalankan kinerja yang baik dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai wujud dari konsep otonomi daerah (Nurina & Yahya, 2016). Pelayanan publik merupakan salah satu tujuan utama dari instansi pemerintah, yang semua organisasi sektor publik bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat di bidang- bidang tertentu (Rahadi et al., 2020). Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menyatakan, ada empat hal utama yang menjadi pemicu rendahnya tingkat akuntabilitas kinerja kabupaten/kota, yaitu tujuan atau sasaran belum berorientasi pada hasil, ukuran keberhasilan tidak jelas dan terukur, ketidaksesuaian program atau kegiatan yang direncanakan dengan sasaran, dan ketidaksesuaian rincian kegiatan dengan tujuan kegiatan. Masalah tersebut dapat muncul karena adanya ketidakpahaman sumber daya manusia dalam instansi pemerintah. Oleh karena itu fungsi-fungsi organisasi harus diisi oleh sumber

daya manusia dengan kompetensi yang tepat agar pekerjaannya dapat dilakukan dan dipertanggungjawabkan dengan baik (Ramadhania & Novianty, 2020). Kinerja yang baik merupakan langkah agar tercapainya tujuan kinerja sehingga perlunya upaya seseorang untuk meningkatkan kinerjanya. Sebagaimana telah Allah gambarkan untuk kita agar perlu mengupayakan peningkatan kinerja diantaranya ada dalam surah Al-ahqaf/46:19 :



Terjemahnya :

“Dan setiap orang memperoleh tingkatan sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan dan agar Allah mencukupkan balasan amal perbuatan mereka dan mereka tidak dirugikan.” (Kementrian Agama RI)

Dalam kitab tafsir Al-Maragi berkata “dan masing-masing dari orang yang berbuat baik dan yang berbuat durhaka dari bangsa jin maupun manusia, mempunyai kedudukan sendiri-sendiri disisi Allah pada hari kiamat, sesuai dengan perbuatan mereka masing-masing, perbuatan yang baik ataupun yang buruk didunia, dan tujuannya juga agar Allah menyempurnakan kepada mereka balasan perbuatan-perbuatan mereka. Kepada yang berbuat kebaikan akan diberikan kebaikan, sedang kepada yang berbuat buruk, diberikan keburukan pula, sedang mereka sedikit pun tidak dirugikan. Maksudnya, orang yang berbuat buruk tidak dihukum kecuali sesuai

dengan dosanya, dan tidak dipikulkan kepadanya dosa dari orang lain, sedang orang yang berbuat baik tidak dikurangi pahalah kebajikannya (Al-maragi, 1993)

Dalam ayat tersebut bahwasanya Allah niscaya pasti akan membalas semua amal perbuatan manusia berdasarkan apa yang telah mereka lakukan. Artinya, jika seseorang melakukan pekerjaannya dengan baik dan menunjukkan kinerja yang baik pula untuk organisasinya, maka dia juga akan mendapatkan hasil yang baik pula dari pekerjaannya dan akan memberikan keuntungan bagi organisasinya.

Penelitian ini menilai bagaimana pengaruh standar akuntansi pemerintah, sistem pelaporan, kejelasan sasaran anggaran terhadap kinerja pemerintah sebab beberapa peneliti sebelumnya mendapatkan hasil yang berbeda. Hasil penelitian Nasution (2019) dan Ajhar dkk (2015) menunjukkan terdapat pengaruh positif dan signifikan standar akuntansi pemerintah terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Penelitian yang dilakukan Mulyadi dkk (2018), Savitri dkk (2014) serta Zakiyuddin & Suyanto (2015) menunjukkan terdapat pengaruh positif dan signifikan pada akuntabilitas kinerja instansi pemerintah antara sistem pelaporan dan kejelasan sasaran anggaran. Sedangkan menurut Soleman dkk (2019), akuntabilitas kinerja instansi pemerintah itu tidak dipengaruhi oleh standar akuntansi pemerintah daerah. Penelitian tentang akuntabilitas kinerja instansi pemerintah telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya. Akan tetapi yang berbeda pada penelitian ini menggunakan pengendalian akuntansi sebagai variabel moderasi.

Banyak fenomena terjadi belakangan ini terkait penyimpangan anggaran pemerintah. Penyalahgunaan kewenangan dalam pengelolaan anggaran daerah sering terjadi sehingga masyarakat sering mempertanyakan kinerja pemerintah daerah. Berbagai insiden telah bermunculan dan terjadi di kota-kota besar. Hal ini menunjukkan bahwa kota-kota lain juga memiliki peluang terjadinya penyimpangan tersebut. Salah satunya adalah Kabupaten Bulukumba. Penelitian ini dilakukan pada instansi pemerintah daerah Kabupaten Bulukumba sebab nilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kabupaten Bulukumba dalam periode 2016-2020 mengalami peningkatan yang cukup signifikan dan pada tahun 2018 serta 2019 pemerintah kabupaten Bulukumba mendapatkan nilai B oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB). Sehingga penelitian ini penting dilakukan agar kinerja yang sudah baik akan terus dapat ditingkatkan. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Standar Akuntansi Pemerintah, Sistem Pelaporan, dan Kejelasan Sasaran Anggaran terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan Pengendalian Akuntansi sebagai Variabel Moderasi”**.

### ***B. Rumusan Masalah***

Berdasarkan latar belakang serta deskripsi yang telah diuraikan, rumusan masalah dalam penelitian ini kemudian disusun sebagai berikut :

1. Apakah standar akuntansi pemerintah berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kabupaten Bulukumba?
2. Apakah sistem pelaporan berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kabupaten Bulukumba ?
3. Apa kejelasan sasaran anggaran berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah daerah Kabupaten Bulukumba?
4. Apakah pengendalian akuntansi memoderasi hubungan antara standar akuntansi pemerintah terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kabupaten Bulukumba?
5. Apakah pengendalian akuntansi memoderasi hubungan antara sistem pelaporan terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kabupaten Bulukumba ?
6. Apakah pengendalian akuntansi memoderasi hubungan antara kejelasan sasaran anggaran terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kabupaten Bulukumba ?

### ***C. Tujuan Penelitian***

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah di ungkapkan, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengaruh standar akuntansi pemerintah terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

2. Untuk mengetahui pengaruh sistem pelaporan terhadap akuntabilitas instansi pemerintah.
3. Untuk mengetahui pengaruh kejelasan sasaran anggaran terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
4. Untuk mengetahui pengendalian akuntansi memoderasi hubungan antara standar akuntansi pemerintah terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
5. Untuk mengetahui pengendalian akuntansi memoderasi hubungan antara sistem pelaporan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
6. Untuk mengetahui pengendalian akuntansi memoderasi hubungan antara kejelasan sasaran anggaran terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

#### ***D. Manfaat Penelitian***

Adapun manfaat penelitian ini diuraikan sebagai berikut :

##### **1. Manfaat Teoritis**

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran untuk memperkaya wawasan dan kontribusi terkait standar akuntansi pemerintah, sistem pelaporan dan kejelasan sasaran anggaran dalam hubungannya dengan akuntabilitas kinerja pemerintah dengan pengendalian akuntansi sebagai pemoderasi khususnya pada organisasi sektor publik. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu manfaat bagi pengembangan ilmu akuntansi, khususnya dalam mengelola akuntabilitas kinerja



pemerintah yaitu sebagai referensi yang dapat memberikan informasi (baik teoritis maupun empiris) bagi pihak-pihak yang akan melakukan penelitian sejenis di masa yang akan datang.

## 2. Manfaat Praktis

Bagi Pemerintah, khususnya pemerintah Kabupaten Bulukumba hasil penelitian ini menjadi masukan dalam usaha meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah agar semakin baik dan lebih transparan dengan mengimplementasikan standar akuntansi pemerintah, sistem pelaporan dan kejelasan sasaran anggaran. Bagi pembaca dan masyarakat secara umum penelitian ini dapat memberikan tambahan informasi untuk mengetahui lebih jauh mengenai berbagai pengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

## ***E. Defisini Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian***

### 1. Definisi Operasional

Definisi operasional dalam variabel-variabel penelitian ini adalah sebagai berikut :

#### a. Variabel Independen (X)

Variabel independen (variabel bebas) adalah variabel yang mempengaruhi variabel dependen. Pada penelitian ini menggunakan 3 variabel independen, dengan rincian sebagai berikut :

### 1) Standar Akuntansi Pemerintah

Standar Akuntansi Pemerintah adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam tindak penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Pemerintah. Variabel Standar Akuntansi Pemerintah diukur menggunakan skala likert (*likert scale*) yang mengukur mengenai keterbukaan akses masyarakat dalam memperoleh informasi mengenai transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan akuntansi pemerintahan sekaligus untuk memberikan peningkatan kualitas dari laporan keuangan.

Sistem pelaporan keuangan baik apabila hasil laporan keuangan searah pada standar akuntansi pemerintahan (SAP) serta persyaratan pelaporan keuangan organisasi sektor publik. Prinsip akuntansi yang digunakan dalam penyusunan dan penyajian laporan untuk menciptakan transparansi keuangan pemerintah dan akuntabilitas penyelenggaraan akuntansi pemerintahan. Variabel standar akuntansi pemerintah diukur menggunakan indikator yang diadopsi oleh Suprihatin & Ananthi, (2019) yaitu :

- (a) Basis Akuntansi,
- (b) Kesesuaian sistem akuntansi yang digunakan sudah memenuhi standar akuntansi pemerintah (SAP) yang berbasis akrual,
- (c) Prosedur pencatatan transaksi dilakukan berdasarkan pencatatan akuntansi pada umumnya.

## 2) Sistem Pelaporan

Sistem pelaporan adalah laporan mengenai deskripsi sistem pertanggungjawaban dari bawahan kepada atasan. Sistem pelaporan yang baik dibutuhkan untuk bisa mengamati serta mengontrol kinerja manajemen terhadap pengimplementasian anggaran yang sudah ditentukan (Fathia, 2017). Agar bisa mengendalikan hasil kerja pusat pertanggungjawaban, dibutuhkan suatu sistem pelaporan. Dalam laporan wajib menunjukkan hasil kerja pusat pertanggungjawaban dengan rincian anggarannya, oleh karena itu bisa diketahui penyimpangan terhadap anggaran Variabel Sistem Pelaporan diukur menggunakan indikator yang diadopsi oleh Kartika (2019) yaitu :

- (a) Penyajian laporan keuangan secara lengkap,
- (b) Informasi dalam laporan keuangan digunakan sebagai alat koreksi,
- (c) Informasi keuangan disajikan agar memenuhi kebutuhan umum bukan kebutuhan khusus,
- (d) Laporan keuangan dapat diuji.

## 3) Kejelasan Sasaran Anggaran

Kejelasan sasaran anggaran adalah sejauh mana tujuan anggaran di tetapkan secara jelas dan spesifik dengan tujuan anggaran dapat dipahami oleh orang yang bertanggungjawab atas pencapaian anggaran tersebut. Adanya sasaran anggaran yang jelas, maka akan

mempermudah untuk mempertanggung- jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas organisasi dalam rangka untuk mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya (Hafiz, 2017). Variabel Kejelasan Sasaran Anggaran diukur menggunakan indikator yang diadopsi oleh Suhaesti (2016) yaitu :

- (a) Pusat tanggung jawab,
- (b) Bidang kegiatan,
- (c) Perencanaan,
- (d) Sasaran,
- (e) Tingkat keberhasilan

b. Variabel Dependen (Y)

Variabel dependen (variabel terikat) yaitu variabel yang dipengaruhi atau menjadi alasan dari variabel bebas. Keberadaan variabel dependen pada penelitian kuantitatif merupakan variabel yang dijelaskan dalam fokus dan topik penelitian. Variabel dependen dalam penelitian ini yaitu Akuntabilitas Kinerja. Akuntabilitas kinerja pemerintah yaitu pelaksanaan kewajiban pemerintah agar menjelaskan kegagalan atau keberhasilan dalam menjalankan tujuan organisasi untuk meraih tujuan serta sasaran yang diputuskan dengan sistem akuntabilitas normal. Variabel akuntabilitas kinerja diukur memakai indikator yang diadopsi dari Faizal (2018) yaitu :

- (a) Penetapan perencanaan strategik,
- (b) Pengukuran kinerja,

(c) Pelaporan kinerja,

(d) Pemanfaatan informasi kinerja.

c. Variabel Moderasi (M)

Variabel moderasi merupakan variabel yang memoderasi hubungan antara variabel dependen dan variabel independen. Variabel ini bisa memperlemah dan atau memperkuat hubungan keduanya. Dalam penelitian ini variabel moderasi yang digunakan adalah Pengendalian Akuntansi.

Variabel Pengendalian Akuntansi diukur memakai skala likert (likert scale). Skala liker mengukur sikap dengan mengungkapkan persetujuan atau ketidaksetujuan pada sebuah objek, subjek, dan peristiwa tertentu. Pada Variabel ini memakai indikator yang di ungkapkan oleh Ali Zakiyudin & Suyanto (2015) yaitu :

- a. Keandalan pelaporan keuangan,
- b. Efektivitas dan efisiensi operasi,
- c. Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.

2. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh antara variabel bebas yaitu standar akuntansi pemerintah, sistem pelaporan, dan kejelasan sasaran anggaran, terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai variabel terikat pada pengendalian akuntansi sebagai variabel moderasi. Penelitian dilakukan dengan membatasi subjek pada pemerintah Kabupaten Bulukumba.

### ***F. Penelitian Terdahulu***

Dasar atau acuan peneliti untuk melakukan penelitian ini yaitu data pendukung. Adapun data pendukung yang dimaksud yaitu penelitian yang terkait dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini.

**Tabel 1.1**  
**Penelitian Terdahulu**

<b>Nama</b>	<b>Judul</b>	<b>Metode Penelitian</b>	<b>Hasil Penelitian</b>
Widaryanti dan Nurul (2020)	Analisis Pengaruh Pengendalian Akuntansi, Sistem pelaporan, dan Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Penelitian Kuantitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Sistem Pelaporan berpengaruh dan Kejelasan Sasaran Anggaran berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Sedangkan Pengendalian Akuntansi tidak berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Fitriyani dan Herawati (2019)	Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua, Sistem Pengendalian Intern, dan Kualitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Kasus Inspektorat Kabupaten Bengkulu Tengah)	Penelitian Kuantitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Akuntansi Berbasis Akrua, Sistem Pengendalian Intern dan Kualitas Laporan Keuangan berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di Inspektorat Bengkulu Tengah
Kartika dan Sukamto (2019)	Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi Dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Empiris Pada Dinas Daerah Kota Surabaya)	Penelitian Kuantitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kejelasan sasaran anggaran tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Sedangkan pengendalian akuntansi dan sistem pelaporan berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
Kinasih, H (2018)	Pengaruh Pengendalian Akuntansi, Sistem Pelaporan, Kejelasan Sasaran Anggaran, dan Ketaatan Pada Peraturan Perundang-undangan Terhadap Akuntabilitas	Penelitian Kuantitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pelaporan, pengendalian akuntansi, dan kejelasan sasaran anggaran mempengaruhi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Sedangkan, ketaatan

	Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Empiris Pada OPD Kab. Purworejo)		pada peraturan perundang-undangan tidak mempengaruhi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
Pebrianti & Aziza (2018)	Pengaruh Kejelasan Tujuan Anggaran, Pengendalian Akuntansi, Sistem Pelaporan, dan Kepatuhan Terhadap Peraturan Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan	Penelitian Kuantitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kejelasan Tujuan Anggaran, Pengendalian Akuntansi, Sistem Pelaporan, dan Kepatuhan berpengaruh positif terhadap Peraturan Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan di lingkungan pemerintah kota Bengkulu
Fauzan dkk (2017)	Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi, Sistem Pelaporan dan Penerapan Akuntabilitas Keuangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) (Studi Pada SKPD Kabupaten Lima)	Penelitian Kuantitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kejelasan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi, sistem pelaporan dan penerapan akuntabilitas berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Sumber: *Data Olahan Peneliti (2021)*



## BAB II

### TINJAUAN TEORITIS

#### A. *Teori Agency*

*Teori Agency* menjelaskan tentang hubungan keagenan dimana pihak tertentu (*principal*) mendelegasikan pekerjaan kepada pihak lain (*agent*) yang melakukan pekerjaan. Menurut penelitian Jensen & Meckling (1976) dalam Pratama (2020), Teori keagenan menyatakan bahwa perusahaan yang memisahkan fungsi pengelolaan dan kepemilikan akan rentan terhadap konflik keagenan. Model keagenan dirancang dengan sistem yang melibatkan kedua belah pihak yaitu manajemen dan pemilik. Selanjutnya, manajemen dan pemilik mengadakan kontrak kerja untuk mendapatkan keuntungan yang diharapkan. Lambert (2001) menjelaskan bahwa perjanjian tersebut diharapkan dapat memaksimalkan kepentingan pemilik (*principal*), memuaskan manajemen (*agent*) dan memastikan bahwa ia menerima kompensasi yang meningkat. Manfaat yang dicapai oleh kedua belah pihak didasarkan pada kinerja perusahaan. Menurut Amertadewi dan Duirandra (2013) menyatakan bahwa untuk membuktikan bahwa agen telah melaksanakan sesuatu sesuai dengan instruksi prinsipal, maka akuntabilitas dalam hubungan agen dan prinsipal merupakan hal penting. Pelaporan keuangan merupakan salah satu bentuk transparansi yang menjadi prasyarat untuk mendukung akuntabilitas.

Dalam hal ini yang dimaksud agen adalah pemerintah dan *principal* adalah masyarakat. Penelitian Lane (2000) dalam Puspitasari (2013) menjelaskan bahwa *teori agency* bisa dilaksanakan dalam organisasi sektor publik dan negara

demokrasi didasarkan pada serangkaian hubungan principal dan agen. Teori keagenan mengasumsikan bahwa pemerintah daerah sebagai agent bagi masyarakat (*principal*) akan bertindak dengan penuh pemahaman bagi kepentingan mereka sendiri, dan memandang bahwa pemerintah daerah tidak dapat dipercaya agar bertindak dengan baik untuk kepentingan masyarakat. Pemerintah sebagai agen berkewajiban untuk memberikan informasi yang rinci dan transparan kepada masyarakat sebagai principal. Hal ini memungkinkan masyarakat untuk mengetahui situasi dan dapat mengevaluasi keberhasilan atau kegagalan pemerintah dalam menjalankan misi dan tanggung jawab (Dewata et al., 2020).

### **B. Teori Akuntabilitas**

Istilah akuntabilitas berasal dari bahasa Inggris yaitu *accountability* artinya pertanggungjawaban atau situasi untuk dipertanggungjawabkan atau keadaan untuk diminta pertanggungjawaban. Akuntabilitas merupakan sebuah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menjelaskan kinerja serta tindakan seseorang ataupun organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau yang berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban (Rahmadoni & Erwandi, 2018). Menurut Anisaningrum (2010) pada Nasution (2018) akuntabilitas adalah mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik". atau dengan kata lain dapat diartikan akuntabilitas merupakan kewajiban menyampaikan pertanggungjawaban dan untuk menjawab atau menerangkan kinerja dan tindakan

seseorang/badan hukum/pimpinan kolektif suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan akan pertanggungjawaban. Mardiasmo (2012) menyatakan bahwa pada dasarnya, akuntabilitas adalah pemberian informasi dan pengungkapan (disclosure) atas aktivitas dan kinerja finansial kepada pihak - pihak yang berkepentingan.

Akuntabilitas merupakan salah satu unsur pokok perwujudan good governance yang saat ini sedang diupayakan di Indonesia. Pemerintah diminta untuk melaporkan hasil dari program yang telah dilaksanakan sehingga masyarakat dapat menilai apakah pemerintah telah bekerja dengan ekonomis, efisien dan efektif (Zeyn, 2011). Sebagai asas umum, akuntabilitas penyelenggaraan negara menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara. Akuntabilitas merupakan kejelasan fungsi, struktur, sistem, dan pertanggungjawaban organ perusahaan sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif (Ali Zakiyudin & Suyanto, 2015). Setiap Instansi Pemerintah, Badan dan Lembaga Negara di Pusat dan Daerah sesuai dengan tugas pokok masing-masing wajib memahami lingkup akuntabilitasnya masing- masing, karena akuntabilitas yang diminta meliputi keberhasilan dan juga kegagalan pelaksanaan misi Instansi yang bersangkutan (AR et al., 2018). Akuntabilitas diyakini mampu mengubah kondisi pemerintahan yang tidak dapat memberikan pelayanan publik secara baik dan korup menuju suatu tatanan pemerintahan yang demokratis (Hafiz, 2017). Bentuk dan cermin akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintah daerah yaitu dengan

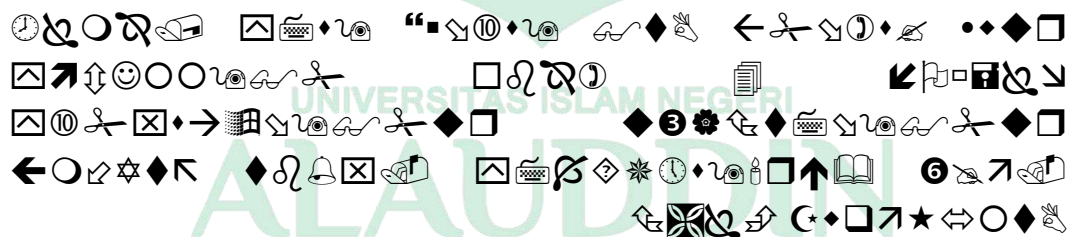
dikeluarkannya beberapa peraturan, seperti Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, dan beberapa Peraturan Pemerintah sebagai pelaksanaan dari Undang-undang dimaksud, antara lain Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 105 Tahun 2000 dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 108 Tahun 2000 (Rosliyanti, 2014).

### ***C. Standar Akuntansi Pemerintah***

Akuntansi merupakan proses mengidentifikasi, mencatat, mengukur, mengklasifikasikan, meringkas, menyajikan laporan, dan menafsirkan hasil untuk transaksi dan peristiwa keuangan. Standar akuntansi sangat penting sebagai pedoman penyusunan laporan keuangan tahunan dan sebagai salah satu mekanisme pengendalian. Kurangnya standar akuntansi yang tepat akan memberikan dampak negative berupa rendahnya reliabilitas informasi keuangan dan sulitnya pengendalian atau pengelolaan informasi keuangan (Mahardini & Miranti, 2018). Standar Akuntansi Pemerintah dirancang untuk memastikan bahwa penyelenggaraan pemerintahan terstruktur dan mengikuti persyaratan yang berlangsung agar mewujudkan pelaporan akuntabel, valid, serta berstandar tinggi agar dapat dipertanggungjawabkan (Mardiasmo, 2012:25). Standar akuntansi pemerintahan berlaku dilingkup pemerintahan, yaitu pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan satuan organisasi dilingkungan pemerintah pusat/daerah, jika satuan organisasi terkait wajib menyajikan laporan keuangan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Standar Akuntansi Pemerintah yaitu pedoman akuntansi digunakan untuk membuat serta menyediakan pelaporan pemerintah. Oleh karena itu, SAP adalah

syarat-syarat yang mempunyai perundang-undangan agar kualitas pelaporan keuangan pemerintah di Indonesia dapat meningkat (Mahsun, 2016:120). Standar akuntansi pemerintah mengatur penyajian laporan keuangan untuk tujuan umum guna memperbaiki laporan keuangannya. Pelaporan keuangan yang disajikan untuk tujuan umum, yaitu pelaporan keuangan untuk memenuhi kebutuhan pengguna laporan keuangan. Untuk mencapai hal ini, standar akuntansi pemerintah mensyaratkan bahwa semua pertimbangan yang berkaitan dengan penyajian laporan keuangan, pedoman struktur laporan keuangan, dan persyaratan minimum untuk isi laporan keuangan diperlukan (Zeyn, 2011). Standar akuntansi pemerintah sangat penting karena memberikan pedoman kepada penggunaan dalam menjalankan fungsi yang relevan. Seperti halnya dalam Islam, tidak diperbolehkan melakukan sesuatu hal tanpa ada ilmu maupun dasar hukum tentang itu. Seperti yang dijelaskan dalam al-Qur'an Surah Al-Isra/17:36.



Terjemahnya :

“Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui. Karena pendengaran, penglihatan dan hati nurani, semua itu akan diminta pertanggungjawabannya.” (Kementrian Agama RI)

Dalam tafsir Al-Muyassar mengatakan bahwa tidaklah engkau melihat, wahai manusia, apa yang tidak engkau ketahui, tapi pastikan dan cek kebenarannya. Sungguhnyanya manusia itu akan dimintai pertanggungjawaban terhadap pendengaran, penglihatan dan hatinya yang telah dipergunakannya. Jika

ia mempergunakannya dalam kebajikan, maka ia mendapatkan pahala. Dan jika ia mempergunakannya dalam keburukan, maka ia mendapatkan siksa (Basyir, 2013).

Dalam ayat tersebut bahwasanya pada dasarnya setiap manusia dilarang sembarangan berbicara dan berbuat sesuatu tanpa didasari ilmu dan kebenaran informasi. Dalam hal ini pemerintah dituntut agar selalu menerapkan Standar Akuntansi Pemerintah sebagai sebuah prinsip dalam menyusun dan menyajikan laporan dalam rangka menciptakan transparansi keuangan pemerintah dan akuntabilitas penyelenggaraan akuntansi pemerintahan. Selain itu dengan diterapkannya ayat ini dapat mencegah sekian banyak keburukan, seperti tuduhan, kebohongan dan kesaksian palsu.

Standar Akuntansi Pemerintah diterapkan di lingkup pemerintahan, baik di pemerintah pusat dan departemen departemennya maupun di pemerintah daerah dan dinas-dinasnya. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan diyakini dapat mempengaruhi kualitas pelaporan keuangan di pemerintah pusat dan daerah. (Nordiawan, 2009:25 ). Dalam implementasi SAP, setiap entitas pelapor termasuk pemerintah daerah wajib melaksanakan kegiatan secara sistematis dan terstruktur selama periode pelaporan untuk kepentingan akuntabilitas, pengendalian, transparansi, dan keseimbangan antar generasi dalam evaluasi kinerja. Dengan penggunaan SAP maka bisa dibuat laporan keuangan yang sangat berguna. Kegunaan laporan keuangan ditentukan oleh kandungan informasi yang terkandung dalam laporan keuangan tersebut. Untuk menyajikan informasi yang baik dalam pelaporan keuangan, laporan keuangan tersebut harus disusun berdasarkan SAP (Daniel Kartika Adhi & Suhardjo, 2013). Laporan keuangan

yang dihasilkan dari penerapan SAP dimaksudkan untuk memberikan manfaat lebih baik bagi para pemangku kepentingan, baik para pengguna maupun pemeriksa laporan keuangan pemerintah, dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan. Hal ini sesuai dengan salah satu prinsip akuntansi yaitu bahwa biaya yang dikeluarkan sebanding dengan manfaat yang diperoleh (Mahardini & Miranti, 2018).

#### ***D. Sistem Pelaporan***

Lembaga Administrasi Negara (LAN) dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menjelaskan bahwa sistem pelaporan yaitu sistem untuk memantau serta mengontrol kinerja terhadap pelaksanaan anggaran diatur, dan menggambarkan akuntabilitas mulai bawahan hingga atasan, yang memerlukan sistem pelaporan agar memeriksa hasil kerja pusat pertanggungjawaban (Suhaesti, 2016). Tujuan umum dari pelaporan keuangan sektor publik adalah agar memberikan informasi tentang posisi keuangan, arus kas, dan kinerja suatu organisasi atau perusahaan. Informasi ini nantinya bisa digunakan oleh yang berkepentingan agar dapat menyusun dan menilai keputusan tentang alokasi sumber daya yang akan digunakan entitas dalam aktivitasnya agar dapat tujuannya dapat tercapai. Laporan keuangan yang dihasilkan secara jujur, objektif dan transparan, serta transparan, dan sesuai pada standar akuntansi pemerintah (SAP) serta syarat-syarat pelaporan keuangan lembaga sektor publik, maka dapat dinyatakan bahwa sistem pelaporan tersebut sangat baik (Kartika & Sukamto, 2019).

Sistem pelaporan baik dibutuhkan agar bisa meninjau serta mengelola kinerja manajemen terhadap pengimplementasian anggaran sudah diputuskan. Informasi keuangan dan informasi lainnya yang hendak digunakan pada pihak yang berkepentingan agar penetapan ketentuan sosial, politik, dan ekonomi, perlu disediakan pada pemerintah (Ali Zakiyudin & Suyanto, 2015). Pelaporan keuangan pada daerah sektor publik sangat penting agar akuntabilitas sektor publik dapat terbangun. Informasi keuangan yang terkandung pada laporan keuangan tersebut digunakan sebagai dasar pertimbangan pengambilan keputusan. Informasi keuangan dapat dilihat sebagai alat untuk mengimplementasikan akuntabilitas publik secara efektif, bukan sebagai tujuan akhir dari akuntansi sektor publik (Fauzan, 2017). Adapun karakteristik laporan dianggap baik adalah pantas, terpercaya/ andal, gampang dipahami (nyata serta akurat), pada format menarik (tetap dan konsisten antar bagian), komparabilitas tinggi, dapat diuji (verifiable), tidak memihak, lengkap serta berdasarkan standar (untuk rutinitas) (Yulianti et al., 2014). Seperti yang tertuang dalam surah Al-Hujurat/49:6 :



Terjemahnya :

“Wahai orang-orang yang beriman! Jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya, agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan (kecerobohan), yang akhirnya kamu menyesali perbuatanmu itu.” (Kementrian Agama RI)



Dalam tafsir Al-Muyassar mengatakan bahwa wahai orang-orang yang membenarkan Allah dan RasulNya serta melaksanakan syariatNya, bila orang fasik datang kepada kalian dengan membawa sebuah berita, maka periksalah beritanya sebelum membenarkan dan menukilnya agar kalian mengetahui kebenarannya, di khawatirkan kalian bisa melakukan tindakan zhalim terhadap suatu kaum yang tidak bersalah, akibatnya kalian akan menyesalinya. Dalam ayat tersebut bahwasanya adab dalam menerima informasi adalah dengan *tabayyun* yaitu klarifikasi atau cek atas informasi tersebut agar adanya kejelasan dan keakuratan kebenarannya.

Menurut Bastian (2010 : 297), laporan kinerja mencerminkan keharusan agar menyajikan serta menyampaikan kinerja seluruh kegiatan yang memerlukan pertanggungjawaban. Laporan ini yaitu bukti dari prosedur akuntabilitas kinerja. Semua lembaga perlu agar mempersiapkan, penyusunan, serta menyajikan pelaporan dengan tertulis, berkala serta kelembagaan. Laporan keuangan instansi pemerintah adalah gambaran posisi keuangan oleh transaksi dilakukan dalam instansi pemerintah. Laporan kinerja diperuntukkan untuk menyampaikan pencapaian lembaga negara pada tahun penganggaran dalam kaitannya pada prosesedur pencapaian sasaran serta misi instansi pemerintah (AR et al., 2018). Agar dapat meninjau hasil kinerja pusat pertanggungjawaban system pelaporan sanagat diperlukan. Dalam laporan wajib memperlihatkan hasil kerja dari pusat pertanggungjawaban disertai dengan anggarannya, oleh karena itu penyimpangan terhadap anggaran dapat diketahui. Kemudian laporan tersebut lenih bermanfaat

jika disertai dengan analisis mengenai penyebab adanya penyimpangan (Fathia, 2017).

#### ***E. Kejelasan Sasaran Anggaran***

Anggaran merupakan deskripsi mengenai visi organisasi serta digunakan agar menentukan kemajuan menuju pencapaian tujuan organisasi. Anggaran disiapkan agar menyokong manajemen mengomunikasikan skema organisasi, mengkoordinasikan kegiatan, dan mengevaluasi kinerja dari semua unit organisasi dibawahnya (Isnanto et al., 2019). Menurut Freeman (2003) dalam Nordiawan (2012), anggaran adalah sebuah proses yang dilakukan oleh organisasi sektor publik untuk menyediakan sumber daya yang dimilikinya untuk kebutuhan-kebutuhan yang tidak terbatas. Pemahaman ini mendefinisikan peran strategis anggaran dalam mengelola asset sebuah organisasi publik. Anggaran memiliki peran dan fungsi yang sangat penting. Anggaran digunakan oleh pemerintah untuk mengarahkan pembangunandalam rangka meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Anggaran diperlukan karena adanya kebutuhan masyarakat yang tidak terbatas. Permintaan tersebut terus berkembang, tetapi sumber daya yang tersedia terbatas. Karena adanya keterbatasan sumber daya, pilihan program dan kegiatan yang ada dalam anggaran diharapkan menjadi pilihan terbaik (Siregar, 2015:28).

Peran kejelasan sasaran anggaran mempengaruhi akuntabilitas kinerja. Salah satu penyebab terjadinya inefisiensi dan efisien anggaran adalah tujuan anggaran yang tidak jelas, sehingga menyulitkan aparat pemerintah daerah untuk menetapkan target-target anggaran (Sitompul, 2020). Anggaran pemerintah daerah

tidak lepas dari pengelolaan keuangan pemerintahan daerah yang berakuntabilitas. Untuk mencapai kinerja yang diharapkan oleh masyarakat dan menciptakan akuntabilitas terhadap masyarakat, anggaran sangat penting untuk pengelolaan sumber daya tersebut dengan tepat (Setiawan, 2014). Anggaran publik mencakup mengenai perkiraan pekerjaan diharapkan dapat diperoleh dengan waktu ditentukan oleh ukuran keuangan, dan anggaran yang wajib mencakup aspek perencanaan, aspek pengelolaan, serta aspek akuntabilitas publik yang perlu dicakup (Mardiasmo, 2012:20).

#### ***F. Pengendalian Akuntansi***

Pengendalian yaitu rancangan kegiatan yang menimbang kinerja implementasi agar menyelenggarakan visi organisasi yang telah diputuskan. Pengendalian perlu ditingkatkan agar keputusan bisa dibuat berdasarkan dengan perencanaan (Isnanto et al., 2019). Menurut Mardiasmo (2012) menerangkan bahwa pada dasarnya tujuan utama informasi akuntansi adalah pengendalian. Untuk memahami akuntansi sebagai alat pengendalian juga memerlukan pemisahan penggunaan informasi akuntansi untuk pengendalian keuangan dan penggunaan akuntansi untuk pengendalian organisasi. Pengendalian merupakan sarana untuk mempertimbangkan dan mengevaluasi yang sebenarnya terjadi pada suatu proses yang sedang berlangsung. Pengendalian akuntansi dalam sebuah organisasi yaitu yang memastikan bahwa prosedur persiapan dan prosedur pencatatan sudah dikerjakan, dan terwujud integritas keuangan dari aktivitas organisasi (Yulianti et al., 2014)

Pengendalian Akuntansi merupakan pengaturan manajemen baku berdasarkan akuntansi untuk dipergunakan pada manajemen agar dapat dilakukan kegiatan dengan tujuan agar pengelolaan sumber daya dapat secara ekonomis, efisien, dan efektif (Mardiasmo, 2012). Berdasarkan Peraturan Kemetrian Dalam Negeri Republik Indonesia No. 21 Tahun 2011 mengenai Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah tentang pengendalian akuntansi mencerminkan keandalan pelaporan keuangan, berdaya guna serta kemampuan pelaksanaan program serta aktivitas, dan kepatuhan terhadap hukum serta peraturan yang berlaku.

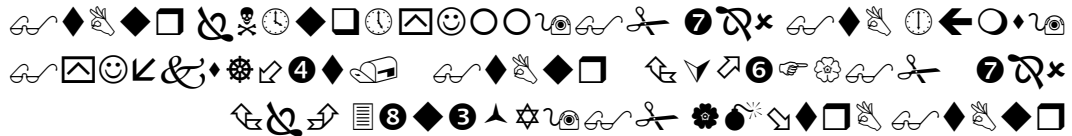
Adanya pengendalian akuntansi memungkinkan instansi pemerintah untuk mengatur serta mengevaluasi segala kegiatan serta akuntabilitas pemerintah. Pengendali akuntansi untuk mengevaluasi bagaimana kegiatan diselenggarakan oleh instansi itu sudah cermat, berdaya guna, serta efektif dalam memberikan layanan kepada masyarakat oleh pemerintah daerah yang menjadi penunjuk capaian pemerintah daerah (Widaryanti & Pancawardani, 2020). Pencapaian indikator tersebut adalah capaian yang bisa membuat taraf akuntabilitas kinerja pemerintah daerah beranjak meningkat. Dengan menerapkan pengendalian akuntansi dalam setiap kasus dan masalah, maka dapat memungkinkan terciptanya keputusan yang baik, mengelola operasi secara lebih efektif, memperkirakan biaya dan profitabilitas dari keberhasilan tertentu, dan secara efektif meningkatkan kinerja (Yulianto & Muthaher, 2019).

### ***G. Akuntabilitas Kinerja Pemerintah***

Menurut Lukito (2014) dalam Worotikan (2018), akuntabilitas merupakan sebuah bentuk dalam kewajiban penyediaan penyelenggaraan didalam semua kegiatan organisasi sektor publik untuk memperoleh pertanggungjawaban bagi semua pihak yang terlibat dalam program yang dilaksanakan, yang merupakan bentuk kewajiban yang menjamin kegiatan yang telah dilaksanakan. Akuntabilitas adalah penyediaan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan pengungkapan aktivitas dan kinerja keuangan. Pemerintah pusat dan daerah wajib mampu menjadi subjek penginformasi terhadap pelaksanaan hak masyarakat yakni hak tahu, hak atas informasi, serta hak agar keinginannya didengarkan (Suhaesti, 2016).

Akuntabilitas berarti tanggung jawab bagi orang-orang serta badan-badan yang dipilih, atas keputusan dan tindakannya. Konsep keadilan berarti bahwa masyarakat diperlakukan sama di bawah hukum dan memiliki derajat yang sama dalam partisipasi politik dalam pemerintahan (Albugis, 2016). Dalam lingkungan organisasi sektor publik, akuntabilitas adalah penyediaan informasi mengenai kegiatan dan kinerja pemerintah kepada pihak yang memiliki kepentingan. Kunci terpenting dalam akuntabilitas publik adalah menginformasikan kepada masyarakat umum yang menjadi pemangku kepentingan. Akuntabilitas publik juga mencakup kewajiban untuk menjelaskan dan menjawab pertanyaan tentang apa yang telah dilakukan, apa yang dilakukan, dan apa yang akan dilakukan oleh organisasi sektor publik (Kartika & Sukanto, 2019). Akuntabilitas sangat

berkaitan dengan pemenuhan kewajiban, seperti yang tertuang dalam al-Quran Surah Thaha/20:6:



Terjemahnya :

“Milik-Nyalah apa yang ada dilangit, apa yang ada dibumi, apa yang ada diantara keduanya, dan apa yang ada dibawah tanah.” (Kementrian Agama RI)

Dalam tafsir Kementrian Agama menafsirkan bahwa semua yang ada di langit, di bumi, di antara langit dan bumi, begitu juga semua yang ada di dalam tanah, baik yang sudah diketahui maupun yang belum diketahui adalah kepunyaan Allah. Dialah yang menguasai semuanya, dan mengatur sekehendak-Nya. Dialah yang mengetahui segala yang ada, baik yang gaib maupun yang nyata. Tidak ada sesuatu yang bergerak, diam, berubah, tetap, dan lain-lain sebagainya kecuali dengan izin-Nya, sesuai dengan kodrat iradat-Nya.

Kinerja merupakan gambaran keberhasilan pelaksanaan kegiatan/program untuk mencapai tujuan, sasaran, misi, dan visi suatu organisasi yang tertuang dalam pengembangan rencana strategis (strategic planning) suatu organisasi (Rahmadoni & Erwandi, 2018). Sedangkan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, yang dimaksud dengan kinerja adalah hasil dari kegiatan/program yang direncanakan atau dilaksanakan dalam kapasitas serta bobot yang terukur dalam kaitannya dengan penggunaan anggaran. Penilaian kinerja merupakan prosedur pencatatan

dan pengukuran pencapaian suatu pelaksanaan suatu kegiatan untuk mencapai suatu misi melalui hasil yang ditampilkan dalam bentuk produk, jasa ataupun suatu proses. Pengukuran kinerja berguna untuk mengevaluasi hasil implementasi perjanjian kinerja sesuai rencana kinerja pada tahun berjalan. Data kinerja dikelola dengan prinsip akuntabilitas, yaitu transparansi sebagai syarat utama (Sukarno et al., 2020)

Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, yang disingkat AKIP merupakan wujud yang mewajibkan instansi pemerintah agar dapat mempertanggungjawabkan kegagalan atau keberhasilan misi organisasi untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditentukan melalui sistem pertanggungjawaban dengan teratur (Worotikan et al., 2018). Akuntabilitas merupakan konsep yang kompleks, dan pelaksanaannya dinilai lebih rumit apabila dibandingkan dengan pemberantasan korupsi karena pemberantasan korupsi sebenarnya berdampak positif terhadap pelaksanaan akuntabilitas (Kartika & Sukanto, 2019). Segala lembaga pemerintahan, instansi serta badan harus bertanggungjawab sesuai dengan fungsi utama mereka, dan akuntabilitas yang diperlukan mencakup kesuksesan atau kegagalan dalam kinerja instansi pemerintah, pada pemerintah pusat ataupun daerah (Nasution, 2019).

#### ***H. Pengembangan Hipotesis***

Berdasarkan rumusan masalah maka di rumuskan 6 (enam) hipotesisi dalam penelitian ini, yaitu :

## 1. Standar Akuntansi Pemerintah Berpengaruh Terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah

Standar Akuntansi Pemerintahan dapat disimpulkan sebagai alat untuk memenuhi pelaporan yang semakin transparan dan akuntabel. Oleh karena itu informasi keuangan pemerintahan dianggap sebagai dasar pengambilan keputusan di pemerintahan sehingga menjadi langkah dalam terwujudnya transparansi serta akuntabilitas (Sitompul, 2020). Standar akuntansi pemerintahan merupakan sebuah konsep atau aturan-aturan akuntansi yang dipraktikkan pada pembuatan ataupun pemaparan laporan yang dapat menambah tingkatan kualitas laporan keuangan pemerintah.

Salah satu langkah dapat dilakukan untuk melaksanakan transparansi serta akuntabilitas dalam penyelenggaraan keuangan pemerintahan adalah dengan menerapkan prinsip-prinsip tepat waktu dan memenuhi standar akuntansi pemerintah yang diterapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Nasution, 2019). Standar akuntansi pemerintah memiliki keterkaitan dengan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebab adanya rangkaian-rangkaian prosedur yang tersusun dalam rangka mempertanggungjawabkan anggaran. Oleh karena itu, standar akuntansi pemerintah sangat mempengaruhi perwujudan tingkat pencapaian kerja yang telah tersistematis dalam sebuah instansi.

Hasil penelitian Nasution (2019) yang menguji implementasi standar akuntansi pemerintah terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah menunjukkan bahwa secara parsial standar akuntansi pemerintah mempengaruhi



peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Hasil penelitian sesuai hasil penelitian Ajhar dkk (2015), dengan adanya standar akuntansi pemerintah mengakibatkan penyajian laporan keuangan pemerintah lebih akuntabel, sehingga akan berdampak pada akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Berdasarkan kajian teori, maka dirumuskan hipotesis yaitu berikut :

**H1** : Standar Akuntansi Pemerintah Berpengaruh Signifikan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah

## 2. Sistem Pelaporan Berpengaruh Terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah

Laporan dianggap baik merupakan laporan harus dibuat dengan jujur, netral serta transparan. Diperlukan sistem pelaporan baik untuk mengurangi asimetri informasi. Seperti yang dijelaskan Pratama (2020) bahwa sistem laporan yang baik dibutuhkan agar meninjau atau mengendalikan kinerja untuk melaksanakan anggaran sesudah diputuskan. Laporan umpan balik (*feedback*) disediakan untuk menimbang kegiatan dilakukan untuk memajukan kerja serta tanggungjawab dalam implementasi perencanaan dan pengimplementasian anggaran, oleh sebab itu hasil implementasi konsep ataupun perolehan sasaran anggaran telah ditentukan dapat tentukan manajemen. Laporan baik dibutuhkan untuk mendukung serta memulihkan kerja manajer dengan menerapkan anggaran yang diputuskan (Pratama et al., 2020).

Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah bisa dipengaruhi oleh sistem pelaporan. Sistem pelaporan yaitu alat untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi kinerja pemerintah daerah serta sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat atas segala aktivitas yang

dilaksanakan pemerintah (Suhaesti, 2016). Selain itu agar dapat membantu dan mengembalikan, sistem pelaporan yang baik sangat dibutuhkan (Setiawan, 2014). Pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah didasari konsep teori keagenan. Sebagai agen, pemerintah berkewajiban untuk memberikan informasi secara terperinci dan transparan kepada masyarakat sebagai principal agar masyarakat mengetahui kondisi dan mampu mengevaluasi berhasil tidaknya pemerintah dalam melaksanakan fungsi dan tanggungjawab.

Sama halnya penelitian yang dilaksanakan Zakiyudin & Suyanto (2015), Anjarwati (2012) serta Isnanto dkk (2019), hasil penelitian menyimpulkan bahwa sistem pelaporan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Hasil tersebut menunjukkan bahwa bertambah tinggi tingkat sistem pelaporan berpengaruh terhadap semakin tingginya tingkat akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Sedangkan dalam penelitian Setiawan (2013) sistem pelaporan tidak berpengaruh pada akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat diturunkan hipotesis sebagai berikut :

**H2 : Sistem Pelaporan Berpengaruh Signifikan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah**

3. Kejelasan Sasaran Anggaran Berpengaruh Terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah

Kejelasan sasaran anggaran yaitu sejauh mana tujuan anggaran diputuskan dengan jelas menurut tujuan tertentu dan spesifik sehingga penanggung jawab pencapaian anggaran dapat memahami anggaran. Apabila anggaran diputuskan

belum menggambarkan visi jelas, masalah akan muncul dan oleh karena itu anggaran perlu diperjelas agar bermanfaat bagi masyarakat dan meningkatkan pengelolaan anggaran (Isnanto et al., 2019). Sasaran anggaran daerah harus dikemukakan secara jelas, dirumuskan secara konkrit, dan dapat dipahami oleh penanggung jawab untuk membangun dan melaksanakan kegiatan anggaran.

Sasaran anggaran yang jelas sebagai pendorong peningkatan kinerja pemerintah daerah. Jika kejelasan sasaran anggaran ditetapkan dengan jelas, maka dapat lebih meningkatkan efisiensi kinerja oleh instansi pemerintah (Suhaesti, 2016). Teori *stewardship* menggambarkan mengenai situasi manajemen yang tidak terpengaruh oleh tujuan individu tetapi konsisten dengan sasaran hasil utama bagi kebutuhan organisasi. Teori *stewardship* dalam pengelolaan anggaran menunjukkan integritas manajemen pengelolaan anggaran agar bisa berprofesi dengan baik untuk mencapai tujuan anggaran yang jelas.

Hasil dari penelitian Zein (2016) serta penelitian Yulianto & Muthaher (2019) menunjukkan bahwa kejelasan sasaran anggaran mempunyai pengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Sedangkan menurut penelitian Vonny (2014) kejelasan sasaran anggaran tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Berdasarkan kajian teori dan hasil penelitian terdahulu maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

**H3** : Kejelasan Sasaran Anggaran Berpengaruh Signifikan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah

#### 4. Pengendalian Akuntansi Memoderasi Pengaruh Standar Akuntansi Pemerintah Terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah

Pengendalian akuntansi menjadi sebuah tuntutan sekaligus kebutuhan bagi pemerintah daerah. Manfaat pengendalian akuntansi berdasarkan standar akuntansi pemerintah ditujukan untuk meningkatkan akuntabilitas dan keandalan pengelolaan keuangan pemerintah melalui penyusunan dan pengembangan standar akuntansi pemerintah. Melalui pengendalian akuntansi yang baik maka akan tersusun pelaksanaan kinerja keuangan dengan ekonomis, efisien, dan efektif. Jika pengendalian akuntansi melemah dan penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah yang tidak sesuai standar akuntansi pemerintahan yang valid sesuai peraturan perundang-undangan akan dapat menurunkan pertanggungjawaban kinerja dalam sebuah instansi. Oleh karena itu dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

**H4** : Pengendalian Akuntansi Memoderasi Pengaruh Standar Akuntansi Pemerintah Terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah

#### 5. Pengendalian Akuntansi Memoderasi Pengaruh Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah

Sistem pelaporan yang baik akan meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah seperti diungkap Cahyani & Utama (2015) dan Pratama (2019). Sistem pelaporan keuangan yang baik apabila laporan keuangan yang disusun berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan syarat-syarat pelaporan keuangan pada organisasi sektor publik (Bastian,2015). Jika sistem pelaporan dilakukan dengan teratur, dapat membuat proses implementasi,

pemantauan dan pengendalian kinerja dapat dilakukan dan akuntabilitas kinerja instansi dapat meningkat. Pemerintah selaku penerima amanah dan pengelola dana publik harus mampu menyediakan informasi keuangan yang disajikan secara akurat, relevan, konsisten, dan dapat dipercaya. Oleh karena itu, hipotesis pada penelitian ini yaitu :

**H5** : Pengendalian Akuntansi Memoderasi Pengaruh Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah

6. Pengendalian Akuntansi Memoderasi Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah

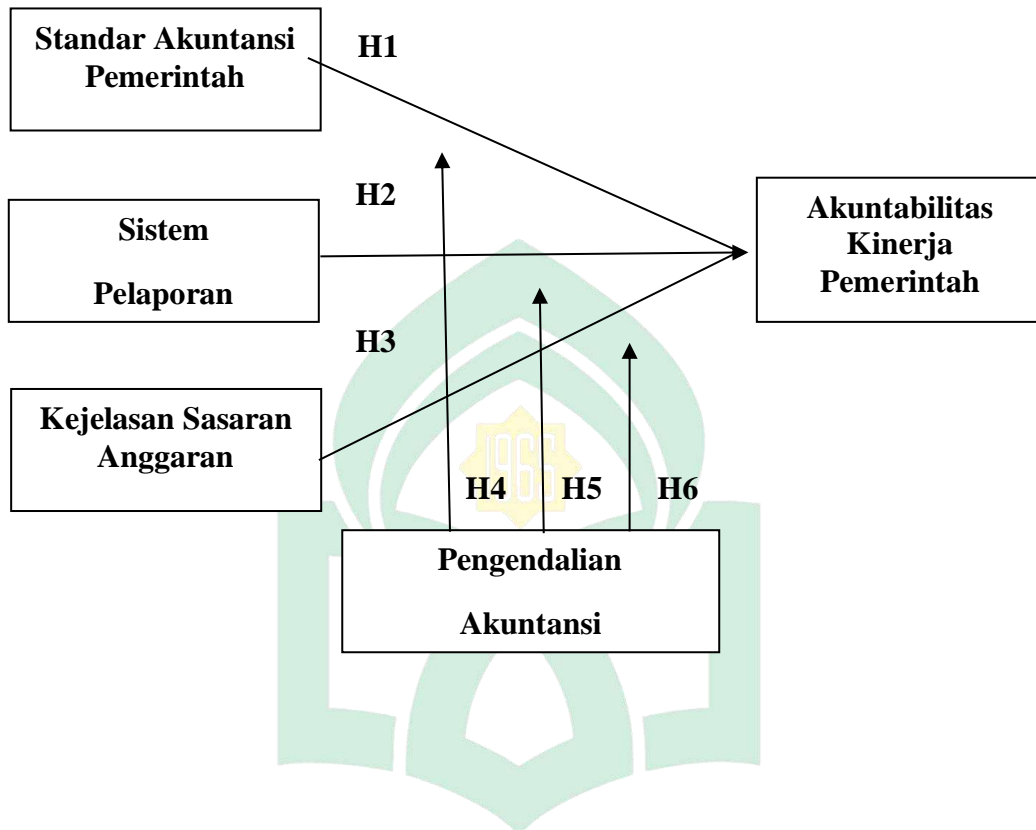
Suatu anggaran yang disusun secara komprehensif dan rinci serta melalui penyusunan yang akurat biasanya masih dapat mengalami kesalahan. Pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangannya dikatakan mencapai efektivitas jika penyelesaian kegiatan pemerintahan bias tepat waktu dan dalam batas anggaran yang tersedia, atau disebut telah mencapai tujuan dan sasaran seperti yang direncanakan sebelumnya. Pengendalian akuntansi yang berjalan baik pada instansi pemerintah mampu menunjukkan sasaran anggaran yang akan diraih aparat pemerintahan sehingga aparatur memiliki informasi yang cukup dalam pengelolaan anggaran (Wahid et al., 2016). Jika pengendalian akuntansi instansi pemerintah lemah maka akan menurunkan pertanggungjawaban dalam sebuah instansi. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka hipotesis dapat dirumuskan berikut ini:

**H6** : Pengendalian Akuntansi Memoderasi Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah

### ***I. Kerangka Pikir***

Standar Akuntansi Pemerintah yaitu prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Sistem pelaporan adalah suatu sistem yang dapat meninjau dan mengontrol kinerja dalam melaksanakan anggaran yang telah ditetapkan yang menggambarkan sistem pertanggungjawaban dari bawahan kepada atasan, dan memerlukan sistem pelaporan untuk meninjau hasil kerja pusat pertanggungjawaban. Kejelasan sasaran anggaran adalah tujuan agar pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai tujuan anggaran dapat memahami anggaran, dan tujuan anggaran didefinisikan secara jelas dan konkrit. Akuntabilitas Kinerja Pemerintah merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah agar mempertanggungjawabkan kegagalan atau keberhasilan dalam menjalankan misi organisasi agar sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dapat dicapai melalui pertanggungjawaban secara teratur.

**Gambar 2.1**  
**Kerangka Pikir**



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### ***A. Jenis Penelitian***

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Menurut Sugiyono (2016), metode penelitian kuantitatif bisa diartikan dengan metode penelitian yang didasarkan pada filsafat positivism, dipergunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrument penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistic, dengan tujuan agar menguji hipotesis yang telah ditentukan.

#### ***B. Pendekatan Penelitian***

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan asosiatif. Menurut Sugiyono (2016), penelitian asosiatif adalah penelitian yang berfungsi agar dapat mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih. Penelitian ini menjelaskan hubungan mempengaruhi dan dipengaruhi dari variabel-variabel yang akan diteliti.

#### ***C. Populasi dan Sampel***

##### **1. Populasi**

Populasi merupakan sekumpulan orang, kejadian, atau benda, dengan memiliki karakteristik spesifik serta dijadikan objek penelitian. Menurut Sugiyono (2016), populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas : obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang



ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Pada penelitian ini populasinya adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang berada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bulukumba.

## 2. Sampel

Menurut Sugiyono (2016), sampel adalah sebagian pada jumlah dan karakteristik oleh populasi yang diteliti. Teknik pengambilan sampel yang dipakai yaitu penggunaan metode purposive sampling. Purposive sampling method yaitu metode penentuan sampel sumber data yang memperhatikan pertimbangan tertentu. Adapun sampel pada penelitian ini adalah aparat Pemerintah Daerah yang terdiri dari Kepala Dinas dan Badan, Kepala Sub Bagian Keuangan, serta Kepala Sub Bagian Program.

**Tabel 3.1**

### **Daftar SKPD Kabupaten Bulukumba**

<b>No</b>	<b>Daftar SKPD Kabupaten Bulukumba</b>	<b>Jumlah Responden</b>
1.	Sekretariat Daerah	3 (Tiga)
2.	Inspektorat Daerah	3 (Tiga)
3.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	3 (Tiga)
4.	Badan Pengelola Keuangan Daerah	3 (Tiga)
5.	Badan Pendapatan Daerah	3 (Tiga)
6.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	3 (Tiga)
7.	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	3 (Tiga)

8.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	3 (Tiga)
9.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	3 (Tiga)
10.	Dinas Kesehatan	3 (Tiga)
11.	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan	3 (Tiga)
12.	Dinas Sosial	3 (Tiga)
13.	Dinas Ketahanan Pangan	3 (Tiga)
14.	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	3 (Tiga)
15.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	3 (Tiga)
16.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	3 (Tiga)
17.	Dinas Pemuda dan Olahraga	3 (Tiga)
18.	Dinas Perikanan	3 (Tiga)
19.	Dinas Pariwisata	3 (Tiga)
20.	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	3 (Tiga)
21.	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	3 (Tiga)
22.	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	3 (Tiga)
23.	Dinas Komunikasi dan Informatika	3 (Tiga)
24.	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah	3 (Tiga)
25.	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air	3 (Tiga)
26.	Dinas Tenaga Kerja	3 (Tiga)
27.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	3 (Tiga)
28.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	3 (Tiga)
29.	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	3 (Tiga)

30.	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	3 (Tiga)
31.	Dinas Perhubungan	3 (Tiga)
32.	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	3 (Tiga)
33.	Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Linmas	3 (Tiga)
34.	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	3 (Tiga)
Total		102

#### ***D. Jenis dan Sumber Data***

##### **1. Jenis Data**

Dalam penelitian ini jenis data yang digunakan yaitu data kuantitatif. Data kuantitatif merupakan data yang berwujud angka atau bilangan. Menurut Sugiyono (2016), data kuantitatif adalah data yang bersifat numerik atau angka yang dapat dianalisis dengan menggunakan statistik.

##### **2. Sumber Data**

Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan adalah data primer. Artinya, objek penelitian secara langsung mengumpulkan data melalui kuesioner, wawancara semi terstruktur dan observasi (Rahmadoni & Erwandi, 2018). Dalam penelitian ini data primer yaitu tanggapan yang dijawab langsung oleh subjek penelitian yaitu dengan menggunakan kuesioner.

### ***E. Metode Pengumpulan Data***

Metode pengumpulan data adalah teknik atau cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah dengan data yang diperoleh melalui kuesioner. Kuesioner merupakan sejumlah pertanyaan atau pernyataan tertulis yang digunakan untuk memperoleh informasi dari responden. Kuesioner disebar dan dikumpulkan secara langsung oleh peneliti dengan mendatangi tempat responden pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Bulukumba yang dijadikan objek pada penelitian ini.

### ***F. Instrumen Penelitian***

Instrumen penelitian merupakan sarana pengumpulan data berbentuk panduan observasi yang terlebih dahulu diuji dengan pengamatan perilaku subyek sampel pembanding serta prosedur yang terstandar sebelum dipergunakan pada pengumpulan data penelitian secara nyata. Instrumen yang digunakan pada penelitian ini yaitu angket (kuesioner). Kuesioner ini terdiri dari daftar pertanyaan, kemudian responden diharap untuk memilih salah satu jawaban yang disediakan. Lima skala likert dipakai untuk mengukur pendapat responden, serta tanggapan terhadap jawaban kuesioner yang terisi oleh responden diberikan poin dengan rincian sebagai berikut:

1 = Sangat Tidak Setuju (STS)

2 = Tidak Setuju (TS)

3 = Netral (N)

4 = Setuju (S)

5 = Sangat Setuju (SS)

### ***G. Teknik Analisis Data***

Teknik analisis data merupakan langkah atau metode agar mengolah sebuah data menjadi informasi sehingga, data tersebut menjadi mudah agar dipahami dan bermanfaat untuk menemukan solusi permasalahan. Analisa data tersebut berfungsi untuk menyimpulkan hasil penelitian. Peneliti menggunakan analisis kuantitatif dalam penelitian ini. Metode analisis data yang dipakai dalam penelitian ini yaitu statistik deskriptif, uji kualitas data, uji asumsi klasik, serta uji hipotesis menggunakan bantuan komputer melalui program SPSS (*Statistical Product and Service Solution*).

#### **1. Statistik Deskriptif**

Statistik deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran atau deskripsi tentang variable akan diteliti. Uji statistic deskriptif ini dilakukan agar menjelaskan gambaran tentang demografi responden penelitian serta deskripsi dari setiap pernyataan kuesioner. Statistik deskriptif dapat ditinjau dari nilai rata-rata (*mean*), standar deviasi, nilai maksimum, serta nilai minimum agar mendapatkan deskriptif variabel serta nilai rata-rata dari frekuensi.

#### **2. Uji Kualitas Data**

Pengujian kualitas terhadap data yang diperoleh harus dilakukan pada penelitian yang mengukur variable dengan menggunakan instrument kuesioner. Tujuan dilakukan pengujian ini untuk mengetahui valid dan reliable instrument

yang digunakan. Kualitas dari hasil penelitian dapat ditentukan oleh kebenaran dari data yang diperoleh. Adapun uji yang digunakan untuk mmenguji kualitas data dala penelitian ini adalah :

a. Uji Validitas

Validitas adalah pertimbangan yang paling utama dalam mengevaluasi kualitas tes sebagai instrument ukur (Azwar,2018:10). Uji validitas digunakan agar mengukur kualitas kuesioner yang digunakan sebagai instrument penelitian dan dinyatakan valid atau tidak valid. Jika uraian kuesioner dapat mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner, maka kuesioner tersebut dapat dikatakan valid. Validitas sebuah instrument dapat diketahui jika memenuhi kriteria dibawah ini :

- 1) Bila  $r_{hitung} > r_{tabel}$  ; maka pernyataan tersebut valid
- 2) Bila  $r_{hitung} < r_{tabel}$  ; maka pernyataan tersebut tidak valid.

b. Uji Reliabilitas

Reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel. Suatu kuesioner dikatakan reliable jika alat ukur tersebut memiliki sifat konsisten. Pengujian realibitas digunakan untuk mengetahui konsistensi sebuah kuesioner apakah dapat diandalkan dan konsisten jika dilakukan pengukuran berulang dengan instrument tersebut. Pengukuran yang hasilnya tidak reliable tentu tidak dapat dikatakan akurat karena konsistensi menjadi syarat bagi akurasi (Azwar, 2018:7). Pengujian realibilitas dalam penelitian ini menggunakan uji statistic *Croncbach Alpha*.

*Cronbach Alpha* yaitu hasil perhitungan menunjukkan reliabel jika koefisien alphanya ( $\alpha$ ) lebih besar dari 0,6 artinya kuesioner tersebut terpercaya serta bisa dipergunakan pada penelitian.

### 3. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik merupakan uji prasyarat dilaksanakan sebelum melaksanakan analisis lebih lanjut terhadap data yang telah dikumpulkan. Pengujian asumsi klasik bertujuan untuk mengetahui, menguji dan memastikan kelayakan model regresi yang digunakan dalam penelitian ini. Uji asumsi klasik digunakan dalam penelitian ini adalah uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas.

#### a. Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan dengan tujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel bebas dan variabel terikat memiliki distribusi secara normal atau tidak normal. Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi data normal atau mendekati normal. Uji normalitas data pada penelitian ini, peneliti menggunakan uji normalitas dengan melihat besaran angka signifikansi Kolmogorof-Smirnov. Adapun kriteria pengujian Kolmogorof-Smirnov adalah jika angka signifikan  $> 0,05$  maka data menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi tersebut memenuhi asumsi normalitas. Sebaliknya apabila hasil pengujian  $< 0,05$  maka data tidak menunjukkan pola distribusi normal dan tidak memenuhi asumsi normalitas dari model regresi (Ghozali, 2013: 165).

b. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan agar dapat menguji bagaimana model regresi didapatkan adanya hubungan antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik sebaiknya tidak memiliki hubungan atau korelasi antar variabel bebas. Ada tidaknya multikolinearitas pada suatu model regresi dapat diketahui melalui beberapa pengujian. Penelitian ini menggunakan salah satunya yaitu melihat nilai tolerance dan VIF (*Variance Inflation Factor*) dari masing-masing variabel bebas. Untuk mengetahui apakah pada data penelitian mengandung multikolinieritas atau tidak, dapat didasarkan pada asumsi yaitu apabila nilai *tolerance*  $> 0,10$  dan  $VIF < 10$ , maka dapat diasumsikan bahwa pada penelitian tersebut tidak terdapat multikolonieritas. Sedangkan, apabila nilai *tolerance*  $< 0,10$  dan  $VIF > 10$ , maka dalam penelitian tersebut terjadi gangguan multikolonieritas (Ghozali, 2013: 105).

c. Uji Heterokedastisitas

Uji heteroskedasitas diartikan sebagai ketidaksamaan varians bagi variabel independen dalam setting yang berbeda. Uji heteroskedasitas dilakukan dengan tujuan untuk menguji ketidaksamaan varians dari satu pengamatan ke pengamatan lain dalam model regresi. Jika varians dari residual tetap sama untuk setiap pengamatan, maka dikatakan homoskedastisitas, serta apabila berbeda dikatakan heteroskedastisitas. Model penelitian yang baik adalah dengan dan tanpa homoskedasitas. Disebut



homoskedastiditas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Untuk mengetahui adanya heteroskedastisitas adalah dapat dilakukan dengan uji glejser ataupun dengan melihat gambar *scatterplots*. Uji *glesjer* dilakukan dengan cara meregresikan antara nilai variabel independen dengan nilai absolut residual. Jika tingkat signifikansi antara variabel independen dengan absolut residual diatas tingkat kepercayaan 0,005 maka model regresi tidak mengandung adanya heteroskedastisitas

#### 4. Uji Hipotesis

Uji hipotesis merupakan metode pengambilan keputusan berdasarkan pada penganalisis data, sesuai percobaan yang terkendali, maupun dari observasi (tidak terkendali). Tujuan dari uji hipotesis adalah untuk menetapkan suatu dasar sehingga dapat mengumpulkan bukti berupa data-data dalam menentukan keputusan apakah menolak atau menerima kebenaran dari pernyataan atau asumsi yang telah dibuat. Uji hipotesis juga dapat memberikan kepercayaan diri dalam pengambilan keputusan yang bersifat objektif. Adapun uji hipotesis yang digunakan dalam penelitian adalah sebagai berikut:

##### a. Analisis Regresi Linear Berganda

Pengujian hipotesis berpengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat dilakukan dengan menggunakan analisis linier berganda. Analisis regresi linier berganda bertujuan agar mengukur kekuatan hubungan antara dua variabel atau lebih dan juga menunjukkan arah hubungan antara variabel dependen dengan variabel independen (Ghozali, 2013). Pengujian hipotesis

dengan menggunakan analisis regresi linear berganda dapat dinyatakan dengan persamaan sebagai berikut:

$$Y = \alpha + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

Keterangan:

$\alpha$	= Konstanta
$X_1$	= Standar Akuntansi Pemerintah
$X_2$	= Sistem Pelaporan
$X_3$	= Kejelasan Sasaran Anggaran
$Y$	= Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
$\beta_1 - \beta_4$	= Koefisien regresi berganda
$e$	= <i>error term</i>

b. Moderate Regression Analysis (MRA)

*Moderated Regression Analysis* (MRA) atau disebut uji interaksi merupakan sebuah aplikais khusus regresi linear berganda yang dalam persamaan regresinya mengandung unsur interaksi (perkalian dua atau lebih independen) dengan tujuan untuk mengetahui apakah antara variabel independen dan variabel dependen dapat diperkuat atau diperlemah oleh variabel moderasi (Ghozali, 2013). Variabel moderasi adalah variabel independent yang akan mempengaruhi ikatan antara variabel independen dengan variabel dependen. Dalam penelitian ini variabel moderasi yang digunakan yaitu pengendalian akuntansi. Variabel independen adalah standar akuntansi pemerintah, sistem pelaporan dan kejelasan sasaran anggaran.

Selain itu, variabel dependen adalah akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Pada penelitian ini mengukur interaksi variabel moderasi pengendalian akuntansi terhadap variabel standar akuntansi pemerintah, sistem pelaporan, dan kejelasan sasaran anggaran terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Langkah uji interaksi pada penelitian ini dapat digambarkan melalui persamaan regresi sebagai berikut :

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4M + b_5X_1M + b_6X_2M + b_7X_3M + e$$

Keterangan :

Y = Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

a = konstanta

X<sub>1</sub> = Standar Akuntansi Pemerintah

X<sub>2</sub> = Sistem Pelaporan

X<sub>3</sub> = Kejelasan Sasaran Anggaran

M = Pengendalian Akuntansi

X<sub>1</sub>M, X<sub>2</sub>M, X<sub>3</sub>M = Interaksi antara standar akuntansi pemerintah, sistem pelaporan, kejelasan sasaran anggaran dengan pengendalian akuntansi

b<sub>1</sub>-b<sub>5</sub> = koefisien regresi berganda

e = error

c. Analisis Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)

Koefisien determinasi dilakukan untuk mengukur seberapa besar kemampuan model dalam menerangkan variabel yang terikat. Nilai koefisien

determinasi adalah antara nol sampai satu. Jika hasil  $R^2$  mendekati nilai 1 maka berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen besar, sebaliknya jika nilai  $R^2$  semakin kecil maka semakin sedikit informasi atau sangat terbatas untuk dapat menggambarkan variabel dependen.

d. Uji Regresi secara simultan (Uji F)

Uji statistik F dilakukan dengan tujuan agar mengukur bagaimana pengaruh variabel independen berinteraksi untuk menjelaskan variabel dependen. Hasil uji statistik F dapat dikonfirmasi dengan menguji nilai peluang pada tingkat signifikansi sebesar 0,05. Apabila probabilitasnya  $< 0,05$  maka  $H_0$  ditolak, artinya variabel independen berpengaruh dengan variabel dependen secara simultan. Perhitungan perbandingan F hitung serta F tabel adalah sebagai berikut :

- 1)  $F_{hitung} > F_{tabel}$  maka  $H_0$  ditolak. Hal ini berarti secara simultan variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.
- 2) apabila  $F_{hitung} < F_{tabel}$  maka  $H_0$  diterima. Hal ini berarti secara simultan variabel independen tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

e. Uji Regresi secara Parsial (Uji t)

Uji statistik t dilakukan agar melihat pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen dengan individual. Hasilnya dapat diperoleh dengan menguji nilai probabilitas dengan taraf signifikansi yang digunakan sebesar 0,05. Apabila probabilitas  $< 0,05$  maka  $H_0$  ditolak, artinya terdapat pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial. Perbandingan atas t hitung serta t tabel dapat dilihat berikut ini :

- 1) Apabila t hitung  $>$  t tabel maka  $H_0$  ditolak. Hal ini berarti variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen secara parsial.
- 2) Apabila t hitung  $<$  t tabel maka  $H_0$  diterima. Hal ini berarti variabel independen tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen secara parsial.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### *A. Gambaran Umum Objek Penelitian*

##### **1. Sejarah Singkat Kabupaten Bulukumba**

Bulukumba berasal dari kata Bulukumupa dan pada tingkatan dialeg tertentu mengalami perubahan menjadi Bulukumba. Mitologi penamaan “Bulukumba“, konon bersumber dari dua kata dalam bahasa Bugis yaitu “Bulu’ku“ dan “Mupa” yang dalam bahasa Indonesia berarti “masih gunung milik saya atau tetap gunung milik saya“. Mitos ini pertama kali muncul pada abad ke-17 Masehi ketika terjadi perang saudara antara dua kerajaan besar di Sulawesi yaitu kerajaan Gowa dan kerajaan Bone.

Di pesisir pantai yang bernama “Tanahkongkong“, disitulah utusan Raja Gowa dan Raja Bone bertemu, mereka berunding secara damai dan menetapkan batas wilayah pengaruh kerajaan masing-masing. “Bangkeng Buki” (secara harfiah berarti kaki bukit), yang merupakan barisan lereng bukit dari Gunung Lompo Battang diklaim oleh pihak kerajaan Gowa sebagai batas wilayah kekuasaannya mulai dari Kindang sampai ke wilayah bagian Timur. Namun pihak kerajaan Bone berkeras mempertahankan Bangkeng Buki sebagai wilayah kekuasaannya mulai dari Barat sampai ke Selatan.

Berawal dari peristiwa tersebut kemudian tercetuslah kalimat dalam bahasa Bugis “Bulukumupa”, yang kemudian pada tingkatan dialek tertentu mengalami perubahan proses bunyi menjadi “Bulukumba”. Konon sejak itulah nama Bulukumba mulai ada dan hingga saat ini resmi menjadi sebuah kabupaten.

Peresmian Bulukumba menjadi sebuah nama kabupaten dimulai dari terbitnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi, yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 5 Tahun 1978 tentang Lambang Daerah. Akhirnya setelah dilakukan seminar sehari pada tanggal 28 Maret 1994 dengan narasumber Prof. Dr. H. Ahmad Mattulada (ahli sejarah dan budaya), maka ditetapkanlah hari jadi Kabupaten Bulukumba, yaitu tanggal 4 Februari 1960 melalui Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 1994 tentang Hari Jadi Kabupaten Bulukumba. Secara yuridis formal Kabupaten Bulukumba resmi menjadi daerah tingkat II setelah ditetapkan Lambang Daerah Kabupaten Bulukumba oleh DPRD Kabupaten Bulukumba pada tanggal 4 Februari 1960 dan selanjutnya dilakukan pelantikan Bupati Pertama yaitu Andi Patarai pada tanggal 12 Februari 1960.

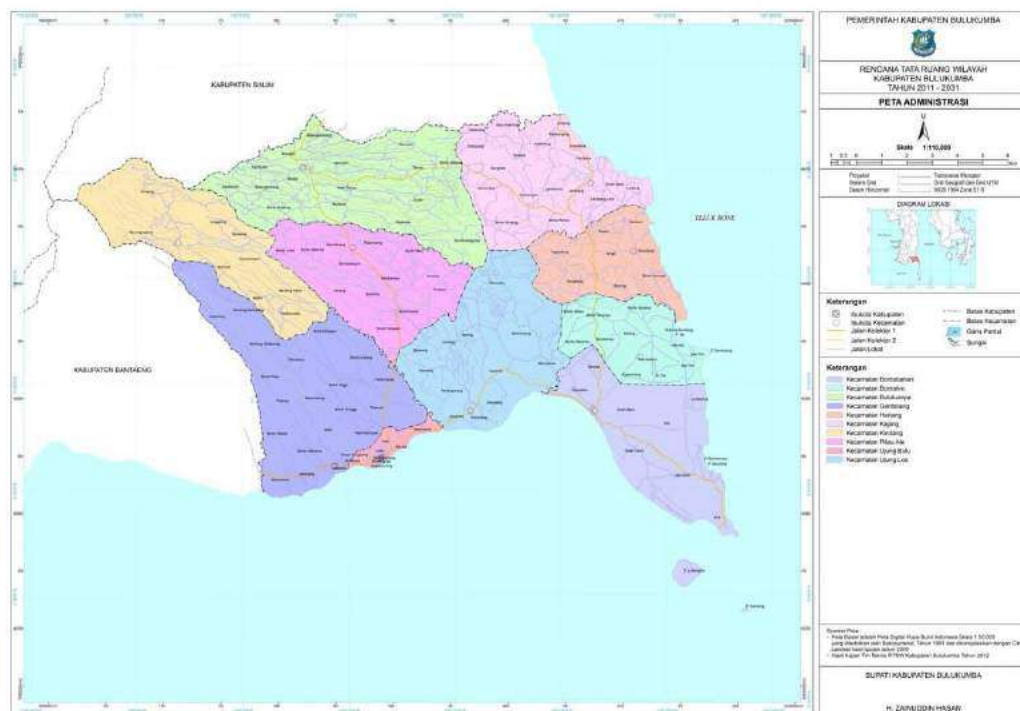
*“Mali’ siparappe, Tallang sipahua”*, Ungkapan yang mencerminkan perpaduan dari dua dialek bahasa Bugis-Makassar tersebut merupakan gambaran sikap batin masyarakat Bulukumba untuk mengembang amanat persatuan di dalam mewujudkan keselamatan bersama demi terciptanya tujuan pembangunan lahir dan batin, material dan spritual, dunia dan akhirat. Paradigma kesejarahan, kebudayaan, dan keagamaan memberikan nuansa moralitas dalam sistem pemerintahan yang pada tatanan tertentu menjadi etika bagi struktur kehidupan bermasyarakat . Nuansa ini pula yang mendasari lahirnya slogan pembangunan *“Bulukumba Berlayar”* yang mulai disosialisasikan pada bulan September 1994 dan disepakati penggunaannya pada tahun 1996. Konsepsi *“Berlayar”* sebagai

moral pembangunan lahir batin mengandung filosofi yang cukup dalam serta memiliki kaitan kesejarahan, kebudayaan dan keagamaan dengan masyarakat Bulukumba. “*Berlayar*”, merupakan sebuah akronim dari kalimat kausalitas yang berbunyi “*Bersih Lingkungan Alam Yang Ramah*”.

## 2. Letak Wilayah Dan Geografis

**Gambar 4.1**

**Peta Adminstrasi Kabupaten Bulukumba**



Kabupaten Bulukumba berjarak 153 Km dari Kota Makassar Ibukota Provinsi Sulawesi Selatan berada pada bagian selatan semenanjung Sulawesi Selatan. Secara regional, Kabupaten Bulukumba berada dalam kondisi empat dimensi, yaitu dataran tinggi pada kaki gunung Bawakaraeng-Lompobattang, dataran rendah, pantai dan laut lepas . Letak geografis Kabupaten Bulukumba



terletak diantara  $05^{\circ} 20'$  -  $05^{\circ} 40'$  Lintang Selatan (LS) dan  $119^{\circ} 58'$  -  $120^{\circ} 28'$  Bujur Timur (BT) dengan batas-batas administrasi:

- a) Sebelah Utara : Berbatasan dengan Kabupaten Sinjai
- b) Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Laut Flores
- c) Sebelah Barat : Berbatasan dengan Kabupaten Bantaeng
- d) Sebelah Timur : Berbatasan dengan Teluk Bone

Kabupaten Bulukumba terdiri dari sepuluh kecamatan yaitu Kecamatan Ujung Bulu (Ibukota Kabupaten), Gantarang, Kindang, Rilau Ale, Bulukumpa, Ujung Loe, Bontobahari, Bontotiro, Kajang dan Herlang. Tujuh di antaranya termasuk daerah sebagai pusat pengembangan pariwisata serta perikanan yaitu kecamatan: Gantarang, Ujung Bulu, Ujung Loe, Bontobahari, Bontotiro, Kajang dan Herlang. Kemudian tiga Kecamatan pusat pengembangan pertanian serta perkebunan yaitu kecamatan Kindang, Rilau Ale dan Bulukumpa. Kabupaten Bulukumba juga memiliki enam pulau yang terdapat pada wilayah Kecamatan Bontobahari lima buah pulau (Pulau Liukang Loe, Pulau Kambing, Pulau Batukasuso, Pulau Batutaha, Pulau Bili) serta Kecamatan Bontotiro satu buah pulau (Pulau Samboang). Dari enam buah pulau tersebut, hanya terdapat satu pulau yang berpenghuni yaitu Pulau Liukang Loe di Kecamatan Bontobahari.

Luas wilayah Kabupaten Bulukumba sekitar  $1.154,67 \text{ Km}^2$  atau sekitar 1,85% dari luas wilayah Sulawesi Selatan, terbagi dalam 10 kecamatan yang meliputi 126 desa/kelurahan yang terdiri dari 24 kelurahan dan 102 desa. Ditinjau dari 10 Kecamatan terdapat 2 kecamatan yang luas, yaitu Kecamatan Gantarang dan Kecamatan Bulukumpa, masing-masing  $173,51 \text{ Km}^2$  dan  $171,33 \text{ Km}^2$ , sekitar

29,87 % dari luas Kabupaten Bulukumba, kemudian kecamatan yang terkecil adalah Kecamatan Ujung Bulu yang berlokasi Ibukota Kabupaten (Kota Bulukumba) dengan luas wilayah 14,44 Km<sup>2</sup> atau 1,25 % dari luas wilayah Kabupaten Bulukumba.

Wilayah Kabupaten Bulukumba memiliki topografi yang beragam dari 0 meter hingga diatas 1000 meter dari permukaan laut (dpl) dan dapat dibagi menjadi tiga ruang morfologi. Morfologi daratan dengan daerah dataran rendah pada ketinggian 0 – 25 meter di atas permukaan laut terdiri dari tujuh kecamatan pesisir yaitu Kecamatan Gantarang, Ujungbulu, Ujung Loe, Bontobahari, Bontotiro, Kajang serta Kecamatan Herlang. Morfologi bergelombang dengan daerah bergelombang pada ketinggian antara 25 – 100 meter dari permukaan laut meliputi bagian dari kecamatan Gantarang, Kindang, Bontobahari, Bontotiro, Kajang, Herlang, Bulukumpa, serta Rilauale. Kemudian morfologi perbukitan dengan daerah perbukitan di Kabupaten Bulukumba terbentang dari Barat ke Utara dengan ketinggian 100 – diatas 500 meter dari permukaan laut meliputi bagian dari Kecamatan Kindang, Bulukumpa, serta Kecamatan Rilauale.

Penyebaran penduduk Kabupaten Bulukumba berdasarkan hasil Sensus Penduduk tahun 2020 sebanyak 437.607 jiwa yang terdiri atas 213.443 jiwa penduduk laki-laki dan 224.164 jiwa penduduk perempuan. Mengalami peningkatan dari tahun 2019 yaitu 420.603 jiwa atau meningkat sebesar 4,04%. Kecamatan Ujung Bulu memiliki kepadatan yang tinggi disebabkan sebagai ibukota kabupaten serta memiliki jumlah penduduk besar serta luas wilayah yang relatif kecil dibandingkan dengan kecamatan lainnya, sehingga tergolong aktif.

Sementara itu besarnya angka rasio jenis kelamin tahun 2020 penduduk laki-laki terhadap penduduk perempuan sebesar 95,2.

### 3. Arti Lambang Kabupaten Bulukumba

**Gambar 4.2**  
**Lambang Kabupaten Bulukumba**



*Sumber : bulukumbakab.go.id*

Pencipta logo Kabupaten Bulukumba seorang perempuan yang bernama Pertiwi Yusuf. Berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bulukumba Nomor 13 Tahun 1987, maka ditetapkanlah Lambang Daerah Kabupaten Bulukumba dengan makna :

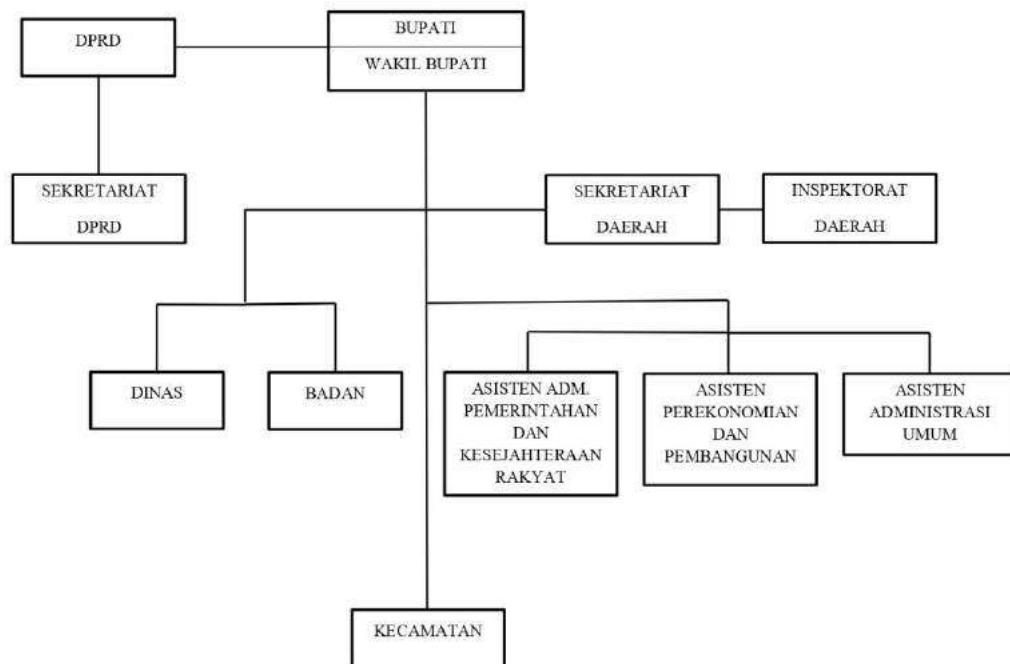
- a) Perisai persegi lima melambangkan sikap batin masyarakat Bulukumba yang teguh mempertahankan Pancasila sebagai dasar Negara Republik Indonesia.
- b) Padi dan jagung melambangkan mata pencaharian utama dan merupakan makanan pokok masyarakat Bulukumba. Bulir Padi sejumlah 17 bulir melambangkan tanggal 17 sebagai tanggal kemerdekaan RI. Daun Jagung sejumlah 8 menandakan bulan Agustus sebagai bulan kemerdekaan

RI. Kelopak buah jagung berjumlah 4 dan bunga buah jagung berjumlah 5 menandakan tahun 1945 sebagai tahun kemerdekaan RI.

- c) Perahu pinisi sebagai salah satu mahakarya ciri khas masyarakat Bulukumba, yang dikenal sebagai “Butta Panrita Lopi” atau daerah bermukimnya orang yang ahli dalam membuat perahu. Layar perahu pinisi berjumlah 7 buah melambangkan jumlah kecamatan yang ada di Kabupaten Bulukumba saat logo tersebut dibuat tapi sekarang ini jumlah kecamatan di Kabupaten Bulukumba telah dimekarkan menjadi 10 kecamatan dan sampai sekarang Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 1987 tentang Lambang Daerah Kabupaten Bulukumba belum direvisi. Tulisan aksara lontara di sisi perahu “Mali Siparappe, Tallang Sipahua” mencerminkan perpaduan dari dua dialek Bugis Makassar yang melambangkan persatuan dan kesatuan dua suku besar yang ada di Kabupaten Bulukumba.
- d) Dasar biru mencerminkan bahwa Kabupaten Bulukumba merupakan daerah maritim.

#### 4. Kelembagaan Pemerintah Kabupaten Bulukumba

**Gambar 4.3**  
**Bagan Struktur Organisasi**  
**Pemerintah Kabupaten Bulukumba**



Kelembagaan dan Tata Kerja Pemerintah Kabupaten Bulukumba berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

#### **BUPATI**

#### **WAKIL BUPATI**

#### **Sekretaris Daerah**

#### **Staf Ahli**

1. Staf Ahli Bupati Bidang Hukum, Politik dan Pemerintahan
2. Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi Pembangunan dan Keuangan
3. Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan SDM

**Asisten Administrasi Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat**

1. Bagian Pemerintahan
2. Bagian Kesejahteraan Rakyat
3. Bagian Hukum

**Asisten Perekonomian dan Pembangunan**

1. Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam
2. Bagian Administrasi Pembangunan
3. Bagian Pengadaan Barang/Jasa

**Asisten Administrasi Umum**

1. Bagian Organisasi
2. Bagian Umum
3. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan
4. Bagian Perencanaan dan Keuangan

**Sekretariat DPRD****Inspektorat Daerah****SKPD berbentuk Badan dan Dinas :**

1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
2. Badan Pengelola Keuangan Daerah
3. Badan Pendapatan Daerah
4. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
7. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

8. Dinas Kesehatan
9. Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan
10. Dinas Sosial
11. Dinas Komunikasi dan Informatika
12. Dinas Ketahanan Pangan
13. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
14. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
15. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
16. Dinas Pemuda dan Olah Raga
17. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
18. Dinas Perikanan
19. Dinas Pariwisata
20. Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan
21. Dinas Perdagangan dan Perindustrian
22. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
23. Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air
24. Dinas Tenaga Kerja
25. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
26. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
27. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
28. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
29. Dinas Perhubungan
30. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

31. Kantor Kesatuan Bangsa, Politik, dan Menengah

32. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

## ***B. Gambaran Responden***

### **1. Karakteristik Responden**

Responden pada penelitian ini yaitu pegawai yang bekerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Bulukumba. Kuesioner disebarkan kepada 34 SKPD, dan masing-masing SKPD menerima tiga kuesioner yang ditujukan kepada kepala dinas/badan, kepala sub bagian keuangan, dan kepala sub bagian program, sehingga sampel pada penelitian berjumlah 102 responden.

Karakteristik responden dalam penelitian ini dikelompokkan berdasarkan usia, jenis kelamin, latar belakang pendidikan, tingkat pendidikan serta masa bekerja dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah. Untuk menafsirkan karakteristik responden, oleh karena itu disajikan tabel mengenai responden seperti dijelaskan berikut ini :

#### **a. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin**

**Tabel 4.1**  
**Persentase Jenis Kelamin Responden**

<b>No</b>	<b>Jenis Kelamin</b>	<b>Frekuensi (Orang)</b>	<b>Presentase %</b>
1	Laki-laki	65	63,7%
2	Perempuan	33	36,3%
<b>Jumlah</b>		102	100%

*Sumber : Data Primer yang Diolah (2021)*



Dari data karakteristik reponden berdasarkan jenis kelamin pada tabel 4.1 diatas, terlihat bahwa jumlah responden terbesar yaitu responden yang berjenis kelamin laki-laki yakni sebanyak 65 orang atau 63,7%. Sedangkan jumlah responden terendah adalah jenis kelamin perempuan yakni 33 orang atau 36,3%. Maka dapat disimpulkan bahwa SKPD di Kabupaten Bulukumba didominasi oleh pegawai laki-laki.

#### b. Karakteristik Responden Berdasarkan Usia

**Tabel 4.2**  
**Persentase Usia Responden**

No	Umur	Frekuensi (Orang)	Presentase %
1	30-39	24	23,5%
2	40-49	44	43,1%
3	50-59	34	33,3%
<b>Jumlah</b>		102	100%

*Sumber : Data Primer yang Diolah (2021)*

Tabel 4.2 menunjukkan bahwa jumlah responden terbesar yakni responden yang berusia 40-49 tahun yaitu 44 orang atau 43,1%. Selain itu, jumlah responden terendah yakni 30-39 tahun yaitu sebanyak 24 orang atau 23,5%. Hal ini menunjukkan semakin bertambah usia maka akan semakin berkembang pula pola pikir dan pengalaman sehingga pengetahuan yang diperoleh juga akan semakin bertambah. Semakin banyak pula pengalaman kerja yang dimiliki seseorang, maka semakin terampil dalam melakukan pekerjaan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan serta dalam hal pengambilan keputusan.

**c. Karakteristik Responden Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan**

**Tabel 4.3**  
**Persentase Latar Belakang Pendidikan Responden**

No	Jenis Kelamin	Frekuensi (Orang)	Presentase %
1	Ekonomi/Akuntansi	38	37,7%
2	Lainnya	64	62,7%
<b>Jumlah</b>		102	100%

*Sumber : Data Primer yang Diolah (2021)*

Data pada karakteristik responden berdasarkan latar belakang pendidikan pada tabel 4.3 menunjukkan bahwa jumlah responden terbesar yakni responden yang berlatar pendidikan selain ekonomi/akuntansi yaitu sebanyak 64 orang atau 62,7%. Hal ini menunjukkan bahwa saat ini latar belakang pendidikan bukan menjadi patokan dalam sebuah pekerjaan melainkan lebih mementingkan skill seseorang. Sebab selain latar belakang pendidikan, kemampuan seseorang untuk mengorganisir tim serta mengatasi sebuah masalah menjadi pertimbangan untuk menjalankan pekerjaan dengan latar belakang pendidikan yang berbeda dengan posisi yang dibutuhkan.

**d. Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan**

**Tabel 4.4**  
**Persentase Tingkat Pendidikan Responden**

No	Pendidikan Terakhir	Frekuensi (Orang)	Presentase %
1	SMA/Sederajat	0	0%
2	Diploma 3 (D3)	0	0%
3	Strata satu (Sarjana)	54	52,9%
4	Strata 2 (Master)	47	46,1%
5	Strata 3 (Doktor)	1	1,0%
<b>Jumlah</b>		102	100%

*Sumber : Data Primer yang Diolah (2021)*

Data pada karakteristik responden berdasarkan tingkat pendidikan pada tabel 4.4 menunjukkan bahwa jumlah responden terbesar adalah responden yang pendidikan terakhirnya sarjana satu (S1) yaitu sebanyak 54 orang atau 52,9%. Tingkat pendidikan erat kaitannya dengan produktivitas tenaga kerja. Dengan tingkat pendidikan yang semakin tinggi maka semakin tinggi pula tingkat produktivitas tenaga kerja. Meskipun begitu, tingkat pendidikan para pegawai di SKPD Kabupaten Bulukumba masih didominasi pada lulusan strata satu (S1).

**e. Karakteristik Responden Berdasarkan Masa Kerja**

**Tabel 4.5**  
**Persentase Masa Kerja Responden**

No	Pendidikan Terakhir	Frekuensi (Orang)	Presentase %
1	1-5 Th	0	0%
2	6-10 Th	0	0%
3	11-15 Th	42	41,2%
4	16-20 Th	25	24,5%
5	≥ 21Th	35	34,3%
<b>Jumlah</b>		<b>102</b>	<b>100%</b>

*Sumber : Data Primer yang Diolah (2021)*

Data pada karakteristik responden berdasarkan masa kerja pada tabel 4.5 menunjukkan bahwa jumlah responden terbesar adalah responden yang masa kerjanya yaitu 11-15 tahun sebanyak 42 orang atau 41,2%. Masa kerja menjadi salah satu faktor para pekerja dalam melakukan aktivitas kerja. Semakin lama masa kerja, maka semakin tinggi produktivitas kerja. Setiap pegawai akan memiliki rasa tanggung jawab terhadap kinerja sehingga berpengaruh terhadap produktivitas tenaga kerja.

## 2. Analisis Deskriptif Variabel

Deskriptif variabel dari 102 responden dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 4.6**  
**Statistik Deskriptif Variabel**

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Standar Akuntansi Pemerintah	102	16,00	25,00	21,9314	1,98539
Sistem Pelaporan	102	16,00	25,00	22,1569	2,04283
Kejelasan Sasaran Anggaran	102	16,00	25,00	21,4510	2,04711
Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	102	18,00	25,00	22,3333	2,26612
Pengendalian Akuntansi	102	18,00	25,00	22,2353	2,09278
Valid N (listwise)	102				

Sumber : Output SPSS 25 (2021)

Tabel 4.6 menunjukkan statistik deskriptif dari masing-masing variabel penelitian. Berdasarkan tabel 4.6, hasil analisis dengan menggunakan statistik deskriptif terhadap Standar Akuntansi Pemerintah menunjukkan nilai minimum sebesar 16,00, nilai maksimum sebesar 25,00, *mean* (rata-rata) sebesar 21,9314 dengan standar deviasi sebesar 1,98639. Hal ini menunjukkan bahwa besarnya standar akuntansi pemerintah pada sampel penelitian ini berkisar antara 16,00 sampai 25,00. Nilai rata-rata (*mean*) lebih besar dari standar deviasi yaitu  $21,9314 > 1,98639$  yang mengartikan bahwa sebaran nilai standar akuntansi pemerintah baik.

Selanjutnya hasil analisis dengan menggunakan statistik deskriptif terhadap variabel Sistem Pelaporan menunjukkan nilai minimum sebesar 16,00, nilai maksimum sebesar 25,00, *mean* (rata-rata) sebesar 22,1569 dengan standar

deviasi sebesar 2,0483. Hal ini menunjukkan bahwa besarnya sistem pelaporan pada sampel penelitian ini berkisar antara 16,00 sampai 25,00. Nilai rata-rata (*mean*) lebih besar dari standar deviasi yaitu  $22,1569 > 2,0483$  yang mengartikan bahwa sebaran nilai sistem pelaporan baik.

Variabel Kejelasan Sasaran Anggaran menunjukkan nilai minimum sebesar 16,00, nilai maksimum sebesar 25,00, *mean* (rata-rata) sebesar 21,4510 dengan standar deviasi sebesar 2,04711. Hal ini menunjukkan bahwa besarnya kejelasan sasaran anggaran pada sampel penelitian ini berkisar antara 16,00 sampai 25,00. Nilai rata-rata (*mean*) lebih besar dari standar deviasi yaitu  $21,4510 > 2,04711$  yang mengartikan bahwa sebaran nilai kejelasan sasaran anggaran baik.

Sedangkan variabel Akuntabilitas Kinerja Pemerintah menunjukkan nilai minimum sebesar 18,00, nilai maksimum sebesar 25,00, *mean* (rata-rata) sebesar 22,3333 dengan standar deviasi sebesar 2,26612. Hal ini menunjukkan bahwa besarnya akuntabilitas kinerja pemerintah pada sampel penelitian ini berkisar antara 18,00 sampai 25,00. Nilai rata-rata (*mean*) lebih besar dari standar deviasi yaitu  $22,3333 > 2,26612$  yang mengartikan bahwa sebaran nilai akuntabilitas kinerja pemerintah baik.

Variabel Pengendalian Akuntansi menunjukkan nilai minimum sebesar 18,00, nilai maksimum sebesar 25,00, *mean* (rata-rata) sebesar 22,2353 dengan nilai standar deviasi sebesar 2,26612. Hal ini menunjukkan bahwa besarnya pengendalian akuntansi pada sampel penelitian ini berkisar antara 18,00 sampai 25,00. Nilai rata-rata (*mean*) lebih besar dari standar deviasi yaitu  $22,2353 > 2,26612$  yang mengartikan bahwa sebaran nilai pengendalian akuntansi baik.

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa nilai rata-rata tertinggi berada pada variabel Akuntabilitas Kinerja Pemerintah yakni 22,3333, sedangkan yang terendah adalah variabel Kejelasan Sasaran Anggaran 21,4510. Untuk standar deviasi tertinggi berada pada variabel Akuntabilitas Kinerja Pemerintah yaitu 2,26612 dan yang terendah adalah variabel Standar Akuntansi Pemerintah 1,98639.

**a. Analisis Deskriptif Variabel Standar Akuntansi Pemerintah (X1)**

Analisis deskriptif variabel standar akuntansi pemerintah terdiri 5 item pertanyaan dilakukan dari hasil pertanyaan responden mengenai standar akuntansi pemerintah. Nilai rata-rata hasil pertanyaan dapat dilihat sebagai berikut:

**Tabel 4.7**

**Deskriptif Item Pernyataan Variabel Standar Akuntansi Pemerintah**

Item Pernyataan	Frekuensi dan Persentase					Skor	Mean
	STS	TS	N	S	SS		
X1.1	0 0%	1 1,0%	1 1,0%	58 56,9%	42 41,2%	447	4,38
X1.2	0 0%	2 2,0%	8 7,8%	64 62,7%	28 27,5%	424	4,15
X1.3	0 0%	0 0%	0 0%	53 52,0%	49 48,0%	457	4,48
X1.4	0 0%	0 0%	2 2,0%	48 47,1%	52 51,2%	458	4,49
X1.5	0 0%	0 0%	2 2,0%	55 53,9%	45 44,1%	451	4,42
<b>Rata-rata Keseluruhan</b>							4,38

*Sumber : Data Primer yang diolah (2021)*

Berdasarkan tabel 4.7 dapat diketahui bahwa dari 102 orang responden yang diteliti, secara umum persepsi responden terhadap item-item pernyataan pada variabel standar akuntansi pemerintah (X<sub>1</sub>) berada pada tingkatan skor yang tinggi dengan 4,38. Hal ini berarti bahwa responden memberikan persepsi yang

cukup baik karena rata-rata jawaban responden berada pada item setuju dan sangat setuju sehingga menunjukkan kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintah. Pada variabel standar akuntansi pemerintah, terlihat bahwa nilai indeks tertinggi sebesar 4,49 yaitu berada pada item pernyataan keempat. Responden yang terdiri dari Kepala SKPD, Kepala Sub Bagian Keuangan dan Kepala Sub Bagian Program sebagian besar berpendapat bahwa bahwa informasi disajikan secara lengkap tentang penjelasan pos-pos dalam laporan keuangan pada setiap periode laporan.

#### b. Analisis Deskriptif Variabel Sistem Pelaporan (X2)

Analisis deskriptif variabel sistem pelaporan terdiri 5 item pertanyaan dilakukan dari hasil pertanyaan responden mengenai sistem pelaporan. Nilai rata-rata hasil pertanyaan dapat dilihat sebagai berikut:

**Tabel 4.8**

**Deskriptif Item Pernyataan Variabel Sistem Pelaporan**

Item Pernyataan	Frekuensi dan Persentase					Skor	Mean
	STS	TS	N	S	SS		
X2.1	0 0%	0 0%	0 0%	52 51,0%	50 49,0%	458	4,49
X2.2	0 0%	1 1,0%	2 2,0%	64 62,7%	35 34,3%	439	4,30
X2.3	0 0%	0 0%	2 2,0%	55 53,9%	45 44,1%	451	4,42
X2.4	0 0%	0 0%	3 3,0%	49 48,0%	50 49,0%	455	4,46
X2.5	0 0%	1 1,0%	0 0%	50 49,0%	51 50,0%	457	4,48
<b>Rata-rata Keseluruhan</b>							<b>4,43</b>

Sumber : Data Primer yang Diolah (2021)

Berdasarkan tabel 4.8 dapat diketahui bahwa dari 102 responden yang diteliti, secara umum persepsi responden terhadap item-item pernyataan pada

variabel sistem pelaporan ( $X_2$ ) berada pada tingkatan skor yang tinggi dengan 4,43. Hal ini berarti bahwa responden memberikan persepsi yang cukup baik karena rata-rata jawaban responden berada pada item setuju dan sangat setuju sehingga menunjukkan kesesuaian dengan sistem pelaporan. Pada variabel sistem pelaporan ini terlihat bahwa pada indeks tertinggi sebesar 4,48 yaitu berada pada item pernyataan kelima. Responden yang terdiri dari kepala SKPD, Kepala Sub Bagian Keuangan, dan Kepala Sub Bagian program sebagian besar berpendapat bahwa informasi keuangan yang disajikan dapat dipahami oleh pengguna serta dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya.

### c. Analisis Deskriptif Variabel Kejelasan Sasaran Anggaran (X3)

Analisis deskriptif variabel kejelasan sasaran anggaran terdiri 5 item pertanyaan dilakukan dari hasil pertanyaan responden mengenai kejelasan sasaran anggaran. Nilai hasil rata-rata pertanyaan dapat dilihat sebagai berikut:

**Tabel 4.9**  
**Deskriptif Item Pernyataan Variabel Kejelasan Sasaran Anggaran**

Item Pernyataan	Frekuensi dan Persentase					Skor	Mean
	STS	TS	N	S	SS		
X3.1	0 0%	1 1,0%	2 2,0%	68 66,7%	31 30,4%	435	4,26
X3.2	0 0%	0 0%	2 2,0%	54 52,9%	46 45,1%	452	4,43
X3.3	0 0%	0 0%	0 0%	64 62,7%	38 37,3%	446	4,37
X3.4	0 0%	0 0%	6 5,9%	59 57,8%	37 36,3%	439	4,30
X3.5	1 1,0%	4 3,9%	9 8,8%	60 58,8%	28 27,5%	416	4,07
<b>Rata-rata Keseluruhan</b>							<b>4,28</b>

Sumber : Data Primer yang Diolah (2021)



Berdasarkan tabel 4.9 dapat diketahui bahwa dari 102 orang responden yang diteliti, secara umum persepsi responden terhadap item-item pernyataan pada variabel kejelasan sasaran anggaran ( $X_3$ ) berada pada tingkatan skor yang tinggi dengan 4,28. Hal ini berarti bahwa responden memberikan persepsi yang cukup baik karena rata-rata jawaban responden berada pada item setuju dan sangat setuju sehingga menunjukkan kesesuaian dengan kejelasan sasaran anggaran. Pada variabel kejelasan sasaran anggaran, terlihat bahwa nilai indeks tertinggi sebesar 4,43 yaitu berada pada item pernyataan kedua. Responden yang terdiri dari Kepala SKPD, Kepala Sub Bagian Keuangan, dan Kepala Sub Bagian Program sebagian besar berpendapat bahwa pada instansi anggaran yang disusun dapat membantu perencanaan kegiatan.

#### d. Analisis Deskriptif Variabel Pengendalian Akuntansi (M)

Analisis deskriptif variabel pengendalian akuntansi terdiri 5 item pertanyaan dilakukan dari hasil pertanyaan responden mengenai pengendalian akuntansi.

Nilai rata-rata hasil pertanyaan dapat dilihat sebagai berikut:

**Tabel 4.10**  
**Deskriptif Item Pernyataan Variabel Pengendalian Akuntansi**

Item Pernyataan	Frekuensi dan Persentase					Skor	Mean
	STS	TS	N	S	SS		
M1	0 0%	3 2,9%	11 10,8%	43 42,2%	45 44,1%	436	4,27
M2	0 0%	0 0%	0 0%	48 47,1%	54 52,9%	462	4,52
M3	0 0%	0 0%	2 2,0%	55 53,9%	45 44,1%	451	4,42
M4	0 0%	0 0%	1 1,0%	57 55,9%	44 43,1%	451	4,42
M5	0 0%	0 0%	0 0%	42 41,2%	60 58,8%	468	4,58
<b>Rata-rata Keseluruhan</b>							<b>4,44</b>

Sumber : Data Primer yang diolah (2021)

Berdasarkan tabel 4.10 dapat diketahui bahwa dari 102 orang responden yang diteliti, secara umum persepsi responden terhadap item-item pernyataan pada variabel pengendalian akuntansi (M) berada pada tingkatan skor yang tinggi dengan 4,44. Hal ini berarti bahwa responden memberikan persepsi yang cukup baik karena rata-rata jawaban responden berada pada item setuju dan sangat setuju sehingga menunjukkan kesesuaian dengan pengendalian akuntansi. Pada variabel pengendalian akuntansi, terlihat bahwa nilai indeks tertinggi sebesar 4,58 yaitu berada pada item pernyataan kelima. Responden yang terdiri Kepala SKPD, Kepala Sub Bagian Program, dan Kepala Sub Bagian Keuangan sebagian besar berpendapat bahwa laporan yang disusun telah berdasarkan pada akuntansi pertanggungjawaban.

**e. Analisis Deskriptif Variabel Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (Y)**

Analisis deskriptif variabel pengendalian akuntansi terdiri 5 item pertanyaan dilakukan dari hasil pertanyaan responden mengenai pengendalian akuntansi.

Nilai rata-rata hasil pertanyaan dapat dilihat sebagai berikut:

**Tabel 4.11**  
**Deskriptif Item Pernyataan Variabel Akuntabilitas Kinerja Pemerintah**

Item Pernyataan	Frekuensi dan Persentase					Skor	Mean
	STS	TS	N	S	SS		
Y1	0 0%	0 0%	1 1,0%	57 55,9%	44 43,1%	451	4,42
Y2	0 0%	0 0%	5 4,9%	49 48,0%	48 47,1%	451	4,42
Y3	0 0%	0 0%	3 2,9%	46 45,1%	53 52,0%	458	4,49
Y4	0 0%	0 0%	2 2,0%	45 44,1%	55 53,9%	461	4,51
Y5	0 0%	0 0%	5 4,9%	43 42,2%	54 52,9%	457	4,48
<b>Rata-rata Keseluruhan</b>							4,46

*Sumber : Data Primer yang Diolah (2021)*

Berdasarkan tabel 4.11 dapat diketahui bahwa dari 102 orang responden yang diteliti, secara umum persepsi responden terhadap item-item pernyataan pada variabel akuntabilitas kinerja pemerintah (Y) berada pada tingkatan skor yang tinggi dengan 4,46. Hal ini berarti bahwa responden memberikan persepsi yang cukup baik karena rata-rata jawaban responden berada pada item setuju dan sangat setuju sehingga menunjukkan kesesuaian dengan akuntabilitas kinerja pemerintah. Pada variabel akuntabilitas kinerja pemerintah, terlihat bahwa nilai indeks tertinggi sebesar 4,51 yaitu berada pada item pernyataan keempat. Responden yang terdiri dari Kepala SKPD, Kepala Sub Bagian Keuangan, dan Kepala Sub Bagian Program sebagian besar telah menyajikan laporannya kepada atasan untuk setiap kegiatan atau program yang telah dilaksanakan.

### ***C. Hasil Uji Kualitas Data***

Uji kualitas data bertujuan untuk mengetahui konsistensi serta akurasi data yang terkumpul. Kualitas data yang diperoleh dari penggunaan instrument penelitian bisa dianalisis dengan menggunakan uji validitas dan uji reliabilitas.

#### **1. Uji Validitas**

Uji validitas dilakukan agar menguji sah atau valid tidaknya suatu kuesioner yang akan digunakan. Kuesioner dapat dikatakan valid jika pertanyaan atau pernyataan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang diukur oleh kuesioner tersebut.

**Tabel 4.12**  
**Hasil Uji Validitas**

Variabel	Item	R hitung	R tabel	Keterangan
Standar Akuntansi Pemerintah	X1.1	0.820	0,194	Valid
	X1.2	0.483		Valid
	X1.3	0.748		Valid
	X1.4	0.806		Valid
	X1.5	0.755		Valid
Sistem Pelaporan	X2.1	0.744	0,194	Valid
	X2.2	0.859		Valid
	X2.3	0.664		Valid
	X2.4	0.649		Valid
	X2.5	0.845		Valid
Kejelasan Sasaran Anggaran	X3.1	0.657	0,194	Valid
	X3.2	0.786		Valid
	X3.3	0.725		Valid
	X3.4	0.738		Valid
	X3.5	0.629		Valid
Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	Y.1	0.760	0,194	Valid
	Y.2	0.853		Valid
	Y.3	0.848		Valid
	Y.4	0.795		Valid
	Y.5	0.794		Valid
Pengendalian Akuntansi	M.1	0.743	0,194	Valid
	M.2	0.672		Valid
	M.3	0.760		Valid
	M.4	0.742		Valid
	M.5	0.793		Valid

*Sumber : Data Primer yang Diolah (2021)*

Hasil pengujian validitas untuk semua item pernyataan pada tabel 4.12 menunjukkan bahwa semua item yang diuji dinyatakan valid. Hal ini dikarenakan setiap pernyataan memiliki  $r$  hitung  $>$   $r$  tabel, sehingga item kuesioner tersebut valid dan setiap pernyataan memiliki nilai signifikansi  $0,000$  atau  $<$   $0,05$  sehingga semua pernyataan dianggap valid (Sugiyono, 2016).

## 2. Hasil Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas dipakai untuk memungkinkan mengukur kuesioner yang merupakan indikator dari satu variabel. Sebuah kuesioner dikatakan reliable atau kredibel apabila jawaban responden terhadap suatu pernyataan konsisten atau stabil berdasarkan waktu ke waktu. Uji reliabilitas data dilaksanakan memakai *Alpha Cronbach method* adalah sebuah perangkat jika mempunyai koefisien keandalan reliabilitas sebesar 0,60 atau lebih sehingga dapat dianggap andal (Azwar, 2018:7) . Hasil pengujian reliabilitas data ditunjukkan dengan tabel 4.13 berikut :

**Tabel 4.13**

**Hasil Uji Reliabilitas**

No	Variabel	Cronbach Alpha	Keterangan
1	Standar Akuntansi Pemerintah	0,756	Reliabel
2	Sistem Pelaporan	0,809	Reliabel
3	Kejelasan Sasaran Anggaran	0,725	Reliabel
4	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	0,869	Reliabel
5	Pengendalian Akuntansi	0,780	Reliabel

Sumber : *Data Primer yang Diolah (2021)*

Dari Tabel 4.13 diatas, menunjukkan bahwa nilai *Cronbach's Alpha* untuk segala variabel lebih besar dari 0,60. Oleh karena itu bisa disimpulkan bahwa instrument kuesioner yang digunakan untuk menjelaskan variabel standar akuntansi pemerintah, sistem pelaporan, kejelasan sasaran anggaran, akuntabilitas kinerja pemerintah, serta pengendalian akuntansi yakni dapat dikatakan andal atau bisa dipercaya sebagai alat ukur variabel.

#### D. Hasil Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik bertujuan agar dapat memastikan bahwa asumsi yang dibutuhkan untuk analisis regresi linear bisa dipebuhi. Dalam penelitian ini uji asumsi klasik ini menguji normalitas data secara statistik yaitu meliputi uji multikolonieritas serta uji heterokedasitas.

##### 1. Uji Normalitas

Uji normalitas dilaksanakan agar bisa mengetahui apakah variabel menggunakan agar pengujian hipotesis telah berdistribusi normal ataupun tidak. Uji normalitas pada penelitian ini dilaksanakan yaitu melalui pengujian *one sample kolmogorov-smirnov*. Sebuah persamaan regresi yang dapat dianggap lulus normalitas jika nilai signifikansi uji *Kolmogorov-smirnov*  $> 0,5$ . Hasil pengujian ditunjukkan pada tabel dibawah ini:

**Tabel 4.14**

**Hasil Uji Normalitas – One Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

		Unstandardized Residual
N		102
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	,0000000
	Std. Deviation	,97228097
Most Extreme Differences	Absolute	,068
	Positive	,068
	Negative	-,064
Kolmogorov-Smirnov Z		,691
Asymp. Sig. (2-tailed)		,726

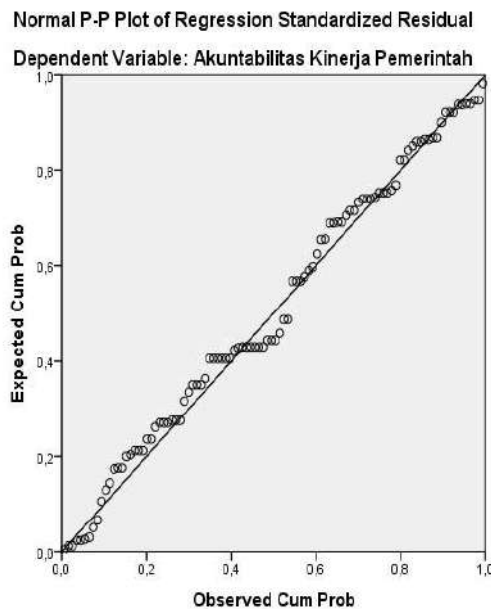
a. Tes distribution is Normal

b. Calculated from data

Sumber : Data Primer yang Diolah(2021)

Sesuai hasil uji statistik bisa disimpulkan jika data sudah terdistribusi normal. Hal tersebut sesuai pada hasil uji statistik memakai nilai *Kolmogorov-smirnov*. Pada tabel 4.14 bisa dipandang signifikansi nilai *Kolmogorov-smirnov* diperoleh 0,726 atau nilai sig > 0,5 atau 5% maka asumsi normalitas terpenuhi. Selain *Kolmogorov-smirnov*, metode menguji normalitas adalah menggunakan grafik normal dengan melihat grafik normal *probability plot*.

**Gambar 4.4**  
**Hasil Uji Normalitas – Normal Probability Plot**



Sumber : Output SPSS 21 (2021)

Gambar 4.2 menunjukkan bahwa data berdistribusi normal sebab titik-titik (data) pada grafik normal *probability plot* mengikuti arah garis diagonal. Artinya data pada penelitian ini telah memenuhi asumsi normalitas berdasarkan analisis grafik *normal probability plot*.

## 2. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan agar mengetahui bagaimana hubungan antara variabel bebas (independen) pada model regresi. Model regresi yang baik sebaiknya jangan memiliki korelasi atau hubungan antara variabel bebas. Menurut Ghazali (2013:105), pengujian multikolinearitas bisa dilihat dari *Tolerance Value* atau *Variance Inflation Factor* (VIF), sebagai berikut :

- a. Jika nilai *tolerance*  $> 0,10$  dan *VIF*  $< 10$ , maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala multikolonieritas
- b. Jika nilai *tolerance*  $< 0,10$  dan *VIF*  $> 10$ , maka dapat disimpulkan bahwa terjadi gejala multikolonieritas.

**Tabel 4.15**  
**Hasil Uji Multikolinearitas**

Variabel	Tolerance	VIF	Keterangan
Standar Akuntansi Pemerintah	0,344	2,904	Tidak Terjadi Multikolerasi
Sistem Pelaporan	0,325	3,078	Tidak Terjadi Multikolerasi
Kejelasan Sasaran Anggaran	0,344	2,904	Tidak Terjadi Multikolerasi
Pengendalian Akuntansi	0,409	2,446	Tidak Terjadi Multikolerasi

*Sumber : Data Primer yang Diolah (2021)*

Berdasarkan hasil pengujian pada tabel 4.14 diatas, nilai *tolerance* menunjukkan nilai lebih besar dari 0,10, dimana variabel standar akuntansi pemerintah senilai 0,344, variabel sistem pelaporan senilai 0,325, variabel kejelasan sasaran anggaran senilai 0,344, dan variabel pengendalian akuntansi senilai 0,409. Adapun untuk nilai VIF untuk semua variabel memiliki nilai lebih



kecil dari 10. Untuk variabel standar akuntansi pemerintah senilai 2,904, variabel sistem pelaporan senilai 3,078, variabel kejelasan sasaran anggaran senilai 2,904, dan variabel pengendalian akuntansi senilai 2,446. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terdapat gejala multikoleniaritas antara variabel independen karena semua nilai *tolerance* variabel lebih besar dari 0,10 dan semua nilai VIF variabel lebih kecil dari nilai 10.

### 3. Uji Heterokedasitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah terdapat ketidaksamaan varians dari satu pengamatan ke pengamatan lain dalam model regresi. Pada penelitian ini menggunakan metode Rank Spearman dengan meregresi setiap variabel independen dengan nilai residual absolutnya. Adapun prosedur pengambilan keputusan yaitu nilai signifikansi dari variabel independen serta variabel moderasi lebih besar dari 0.05 (5%), sehingga menunjukkan tidak terjadi heteroskedastisitas.

**Tabel 4.16**  
**Hasil Uji Heterokedasitas**

Variabel	Sig	Keterangan
Standar Akuntansi Pemerintah	0,766	Tidak Terjadi Heteroskedastisitas
Sistem Pelaporan	0,176	Tidak Terjadi Heteroskedastisitas
Kejelasan Sasaran Anggaran	0,614	Tidak Terjadi Heteroskedastisitas
Pengendalian Akuntansi	0,633	Tidak Terjadi Heteroskedastisitas

*Sumber : Data Primer yang Diolah (2021)*

Tabel 4.15 menunjukkan bahwa tidak ada variabel independen serta variabel moderasi yang signifikan mempengaruhi variabel independen. Hal tersebut dapat dilihat pada tingkat signifikansi probabilitas di atas 0.05. Adapun nilai signifikansi standar akuntansi pemerintah senilai 0,078, sistem pelaporan senilai 0,279, kejelasan sasaran anggaran senilai 0,726, dan pengendalian akuntansi senilai 0,703. Oleh karena itu, bisa disimpulkan bahwa pada model regresi tidak terjadi heteroskedastisitas, sehingga model regresi cocok digunakan.

### ***E. Hasil Uji Hipotesis***

Teknik analisis yang dilakukan agar menguji hipotesis  $H_1$ ,  $H_2$ , serta  $H_3$  yaitu memmakai analisis regresi berganda dengan meregresikan variabel independen (standar akuntansi pemerintah, sistem pelaporan, dan kejelasan sasaran anggaran) terhadap variabel dependen (akuntabilitas kinerja pemerintah), sedangkan untuk hipotesis  $H_4$ ,  $H_5$ , dan  $H_6$ , pengaruh moderasi pengendalian akuntansi diuji menggunakan analisis regresi moderasi dengan pendekatan uji interaksi atau *Moderated Regression Analysis* (MRA). Uji hipotesis ini dibantu dengan menggunakan program SPSS versi 21.

#### **1. Hasil Uji Regresi Berganda Hipotesis Penelitian $H_1$ , $H_2$ , $H_3$**

Pengujian hipotesis  $H_1$ ,  $H_2$ , dan  $H_3$  dilakukan menggunakan analisis regresi berganda untuk menguji pengaruh standar akuntansi pemerintah, sistem pelaporan, dan kejelasan sasaran anggaran terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah. Hasil pengujian ditunjukkan sebagai berikut :

a. Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Pengujian ini dilaksanakan agar melihat seberapa baik kemampuan variabel independen bisa menjelaskan variabel dependen. Berikut adalah hasil uji Koefisien Determinasi ( $R$ ) yang bisa dilihat pada tabel sebagai berikut:

**Tabel 4.17**  
**Hasil Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.861 <sup>a</sup>	.742	.734	1.16933

Sumber : Data Primer yang Diolah (2021)

Berdasarkan hasil uji pada table 4.16 diatas diperoleh nilai  $R^2$  ( $R$  Square) adalah 0,742 atau sama dengan 74,2%. Hal ini menunjukkan bahwa 74,2 % akuntabilitas kinerja pemerintah di dipengaruhi oleh standar akuntansi pemerintah, sistem pelaporan dan kejelasan sasaran anggaran. Sisanya 25,8 % dipengaruhi oleh varaibel lainnya yang belum diteliti dalam penelitian ini.

b. Uji Regresi secara Simultan

Uji statistik  $F$  digunakan agar diketahui seberapa besar variabel independen mempengaruhi variabel dependen pada saat yang bersamaan. Apabila nilai  $sig$  dari  $F$  hitung lebih kecil dari tingkat kesalahan/error ( $alpha$ ) sebesar 0,05, maka variabel independen dapat dikatakan mempengaruhi variabel dependen secara bersamaan. Hasil uji statistik  $F$  ditunjukkan pada tabel 4.17 berikut ini:

**Tabel 4.18**  
**Hasil Uji Regresi secara Simultan (Uji  $F$ )**

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig
Regression	384,668	3	128,223	93,776	,000 <sup>b</sup>
1 Residual	133,998	98	1,367		
Total	518,667	101			

Sumber : Data Primer yang Diolah (2021)

Berdasarkan tabel 4.17 dapat dilihat bahwa pada pengujian regresi berganda menunjukkan Fhitung sebesar 93,776 dengan tingkat signifikansi 0,000 yang lebih kecil dari 0,05, dimana nilai Fhitung 93,776 lebih besar dari nilai table F sebesar 2.70. Berarti variabel standar akuntansi pemerintah, sistem pelaporan, dan kejelasan sasaran anggaran berpengaruh secara simultan atau bersama-sama terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah.

c. Uji Regresi secara Parsial (Uji t)

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui secara individual pengaruh dari satu variabel independen dalam mempengaruhi dan menjelaskan variabel dependen. Variabel independen dianggap berpengaruh jika besarnya sig < 0,05.

**Tabel 4.19**  
**Hasil Uji Regresi secara Parsial (Uji T)**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	-,134	1,387		-,305	,761
Standar Akuntansi Pemerintah	,258	,099	,226	2,602	,011
Sistem Pelaporan	,243	,092	,219	2,641	,010
Kejelasan Sasaran Anggaran	,546	,094	,493	5,836	,000

Sumber : Data Primer yang Diolah (2021)

Berdasarkan tabel 4.18 diatas menunjukkan model estimasi sebagai berikut:

$$Y = 0,423 + 0,258 + 0,243 + 0,546 + e$$

Keterangan :

Y = Akuntabilitas Kinerja Pemerintah

a = Konstanta

X1 = Standar Akuntansi Pemerintah

X2 = Sistem Pelaporan

X3 = Kejelasan Sasaran Anggaran

$\beta_1, \beta_2, \beta_3$  = Koefisien Regresi

$e$  = error

Dari persamaan di atas dijelaskan bahwa :

- a. Pada model regresi ini nilai konstanta sebesar 0.423 menunjukkan bahwa jika variabel independen (standar akuntansi pemerintah, sistem pelaporan dan kejelasan sasaran anggaran) di asumsikan sama dengan nol, maka akuntabilitas kinerja pemerintah akan meningkat sebesar 0.423.
- b. Nilai koefisien regresi variabel standar akuntansi pemerintah (X1) sebesar 0,258. Pada penelitian ini dapat artikan bahwa ketika variabel standar akuntansi pemerintah mengalami peningkatan sebesar satu satuan, maka akuntabilitas kinerja pemerintah akan mengalami peningkatan sebesar 0,258.
- c. Nilai koefisen regresi variabel sistem pelaporan (X<sub>2</sub>) sebesar 0,243. Pada penelitian ini dapat diartikan bahwa ketika variabel sistem pelaporan mengalami peningkatan sebesar satu satuan, maka akuntabilitas kinerja pemerintah akan mengalami peningkatan sebesar 0,243.

- d. Nilai koefisien regresi variabel kejelasan sasaran anggaran ( $X_3$ ) sebesar 0,546. Pada penelitian ini dapat diartikan bahwa ketika variabel kejelasan sasaran anggaran mengalami peningkatan sebesar satu satuan, maka akuntabilitas kinerja pemerintah akan mengalami peningkatan sebesar 0,546.

Hasil interpretasi atas hasil penelitian ( $H_1$ ,  $H_2$ ,  $H_3$ ) yang diajukan dapat dilihat sebagai berikut :

- a. Standar akuntansi pemerintah berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah

Berdasarkan tabel 4.18 dapat dilihat bahwa variabel standar akuntansi pemerintah memiliki  $t$  hitung sebesar 2,602 > tabel  $t$  sebesar 1.98447 (sig = 0,050 dan  $df = n-k$ , yaitu  $102-4 = 98$ ) dengan koefisien beta *unstandardized* sebesar 0,258 dan tingkat signifikansi 0.011 yang lebih kecil dari 0,05 (5%), maka  $H_1$  diterima. Hal ini berarti standar akuntansi pemerintah berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah. Dengan demikian hipotesis pertama yang menyatakan standar akuntansi pemerintah berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah terbukti atau dapat diterima. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik penerapan standar akuntansi pemerintah, maka akuntabilitas kinerja pemerintah akan semakin baik.

- b. Sistem pelaporan berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah

Berdasarkan tabel 4.18 dapat dilihat bahwa variabel sistem pelaporan memiliki t hitung sebesar 2.641 > tabel t sebesar 1.98447 (sig = 0,050 dan df = n-k, yaitu 102-4 = 98) dengan koefisien beta *unstandardized* sebesar 0,243 dan tingkat signifikansi 0,000 yang lebih kecil dari 0,010 (5%), maka H2 diterima. Hal ini berarti sistem pelaporan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah. Dengan demikian hipotesis kedua yang menyatakan sistem pelaporan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah terbukti atau dapat diterima. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik sistem pelaporan pemerintahan, maka akuntabilitas kinerja pemerintah akan semakin baik.

- c. Kejelasan sasaran anggaran berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah

Berdasarkan tabel 4.18 dapat dilihat bahwa variabel kejelasan sasaran anggaran memiliki t hitung sebesar 5,836 > tabel t sebesar 1.98447 (sig = 0,050 dan df = n-k, yaitu 102-4 = 98) dengan koefisien beta *unstandardized* sebesar 0,546 dan tingkat signifikansi .000 yang lebih kecil dari 0,05 (5%), maka H3 diterima. Hal ini berarti kejelasan sasaran anggaran berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah. Dengan demikian hipotesis ketiga yang menyatakan kejelasan sasaran anggaran berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah terbukti atau dapat diterima. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik kejelasan sasaran anggaran, maka akuntabilitas kinerja pemerintah akan semakin baik.

2. Hasil Uji *Moderated Regression Analysis* (MRA)**Tabel 4.20****Hasil Uji Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,919 <sup>a</sup>	.845	.833	.92506

Sumber : Data Primer yang Diolah (2021)

Berdasarkan tabel diatas nilai R<sup>2</sup> (R Square ) adalah 0,845 atau 84,5%. Hasil uji koefisien determinasi diatas dengan nilai R Square adalah 0,845 yang berarti akuntabilitas kinerja pemerintah yang dapat dijelaskan oleh variabel Zscore pemahaman standar akuntansi pemerintah (X1), Zscore sistem pelaporan (X2), Zscore kejelasan sasaran anggaran(X3), Zscore pengendalian akuntansi (M), X1\_M, X2\_M dan X3\_M sebesar 84,5%. Sisanya sebesar 15,5% dipengaruhi oleh variabel lain yang belum diteliti dalam penelitian ini.

**Tabel 4.21****Hasil Uji Regresi Secara Simultan (Uji F)**

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig
Regression	438,228	7	62,604	73,158	,000 <sup>b</sup>
1 Residual	80,439	94	,856		
Total	518,667	101			

Sumber : Data Primer yang Diolah (2021)

Hasil uji F pada tabel 4.20 menunjukkan bahwa nilai F hitung sebesar 73,158 dengan tingkat signifikansi 0,000 jauh di bawah 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa variabel Zscore standar akuntansi pemerintah (X1), Zscore sistem pelaporan (X2), Zscore kejelasan sasaran anggaran (X3), Zscore pegendalian



akuntansi (M), X1\_M, X2\_M dan X3\_M secara bersama-sama atau simultan mempengaruhi akuntabilitas kinerja pemerintah.

Untuk mengetahui bagaimana peranan variabel pengendalian akuntansi atas standar akuntansi pemerintah, sistem pelaporan dan kejelasan sasaran anggaran terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah, maka dapat dilihat sebagai berikut:

**Tabel 4.23**  
**Hasil Uji Regresi Secara Parsial (Uji T)**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	21,925	,180		121,524	,000
Standar Akuntansi Pemerintah	,451	,160	,199	2,818	,006
Sistem Pelaporan Kejelasan Sasaran Anggaran Pengendalian Akuntansi	,164	,169	,072	,969	,335
Moderasi_X1_M	,900	,178	,397	5,062	,000
Moderasi_X2_M	,832	,159	,367	5,227	,000
Moderasi_X3_M	,553	,229	,123	2,417	,018
	,421	,205	,101	2,051	,043
	-,281	,210	-0,067	-1,341	,183

Sumber : Data Primer yang Diolah (2021)

Berdasarkan tabel 4.22 diatas dapat menunjukkan model estimasi sebagai berikut :

$$Y = 21,925 + 0,451 + 0,164 + 0,900 + 0,832 + 0,553 + 0,421 - 0,281 + e$$

Keterangan :

Y = Akuntabilitas Kinerja Pemerintah

$X_1$  = Standar Akuntansi Pemerintah

$X_2$  = Sistem Pelaporan

$X_3$  = Kejelasan Sasaran Anggaran

$M$  = Pengendalian Akuntansi

$X_1M, X_2M, X_3M$  = Interaksi antara standar akuntansi pemerintah, sistem pelaporan, dan kejelasan sasaran anggaran dengan pengendalian akuntansi

$a$  = Konstanta

$b_1-b_7$  = koefisien regresi berganda

$e$  = error term

Dari persamaan diatas dapat dijelaskan bahwa :

- a. Pada model regresi ini nilai konstanta sebesar 21,925 menunjukkan bahwa jika variabel independen (standar akuntansi pemerintah, sistem pelaporan, kejelasan sasaran anggaran) diasumsikan sama dengan nol, maka akuntabilitas kinerja pemerintah akan meningkat sebesar 21,925
- b. Nilai koefisien regresi variabel standar akuntansi pemerintah ( $X_1$ ) sebesar 0,451. Pada penelitian ini dapat di artikan bahwa ketika variabel standar akuntansi pemerintah mengalami peningkatan sebesar satu satuan, maka akuntabilitas kinerja pemerintah akan mengalami peningkatan sebesar 0,451.
- c. Nilai koefisien regresi variabel sistem pelaporan ( $X_2$ ) sebesar 0,164. Pada penelitian ini dapat artikan bahwa ketika variabel sistem pelaporan mengalami peningkatan sebesar satu satuan, maka akuntabilitas kinerja pemerintah akan mengalami peningkatan sebesar 0.164.

- d. Nilai koefisien regresi variabel kejelasan sasaran anggaran (X3) sebesar 0,900  
Pada penelitian ini dapat artikan bahwa ketika variabel kejelasan sasaran anggaran mengalami peningkatan sebesar satu satuan, maka perilaku akuntabilitas kinerja pemerintah akan mengalami peningkatan sebesar 0,900.
- e. Nilai koefisien regresi variabel pengendalian akuntansi (M) sebesar 0,832  
Pada penelitian ini dapat artikan bahwa ketika variabel pengendalian akuntansi mengalami peningkatan sebesar satu satuan, maka akuntabilitas kinerja pemerintah akan mengalami peningkatan sebesar 0,832
- f. Nilai koefisien regresi interaksi antara pengendalian akuntansi (M) dengan standar akuntansi pemerintah (X1) sebesar 0,553  
Pada penelitian ini dapat artikan bahwa adanya interaksi antara pengendalian akuntansi (M) dengan standar akuntansi pemerintah (X1), maka akuntabilitas kinerja pemerintah akan mengalami peningkatan sebesar 0,553.
- g. Nilai koefisien regresi interaksi antara pengendalian akuntansi (M) dengan sistem pelaporan (X2) sebesar 0.421  
Pada penelitian ini dapat artikan bahwa adanya interaksi antara pengendalian akuntansi (M) dengan sistem pelaporan (X2), maka perilaku akuntabilitas kinerja pemerintah akan mengalami peningkatan sebesar 0.421.
- h. Nilai koefisien regresi interaksi antara pengendalian akuntansi (M) dengan kejelasan sasaran anggaran (X3) sebesar -0,281  
Pada penelitian ini dapat artikan bahwa adanya interaksi antara pengendalian akuntansi (M) dengan kejelasan sasaran anggaran (X3), maka akuntabilitas kinerja pemerintah akan mengalami penurunan sebesar -0,281

Hasil interpretasi atas hipotesis penelitian ( $H_4$ ,  $H_5$ , dan  $H_6$ ) yang diajukan dapat dilihat sebagai berikut :

- a. Pengendalian akuntansi memoderasi hubungan antara standar akuntansi pemerintah terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah ( $H_4$ )

Berdasarkan hasil uji analitik atau *Moderated regression Analysis* (MRA) yang terlihat pada tabel 4.22 menunjukkan bahwa variabel moderasi  $X1\_M$  mempunyai  $t$  hitung sebesar  $2,417 > t$  tabel  $1,98447$  dengan koefisien beta unstandardized sebesar  $0,553$  dan tingkat signifikansi  $0,018$  yang lebih kecil dari  $0,05$  maka  $H_4$  diterima. Hal ini berarti bahwa variabel pengendalian akuntansi merupakan variabel yang memperkuat hubungan variabel standar akuntansi pemerintah terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah. Sehingga hipotesis keempat ( $H_4$ ) yang menyatakan pengendalian akuntansi memperkuat hubungan standar akuntansi pemerintah terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah terbukti atau diterima.

- b. Pengendalian akuntansi memoderasi hubungan antara sistem pelaporan terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah ( $H_5$ )

Berdasarkan hasil uji analitik atau *Moderated regression Analysis* (MRA) yang terlihat pada tabel 4.22 menunjukkan bahwa variabel moderasi  $X2\_M$  mempunyai  $t$  hitung sebesar  $2,051 > t$  tabel  $1,98447$  dengan koefisien beta unstandardized sebesar  $0,421$  dan tingkat signifikansi  $0,43$  yang lebih kecil dari  $0,05$  maka  $H_5$  diterima. Hal ini berarti bahwa variabel pengendalian akuntansi merupakan variabel yang memperkuat hubungan variabel sistem pelaporan terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah. Sehingga hipotesis kelima ( $H_5$ ) yang

menyatakan pengendalian akuntansi memperkuat hubungan sistem pelaporan terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah terbukti atau diterima

- c. Pengendalian akuntansi memoderasi hubungan antara kejelasan sasaran anggaran terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah ( $H_6$ )

Berdasarkan hasil uji hasil uji analitik atau *Moderated regression Analysis* (MRA) yang terlihat pada tabel 4.22 menunjukkan bahwa variabel moderasi X3\_M mempunyai t hitung sebesar  $-1.341 < t$  tabel 1.98447 dengan koefisien beta unstandardized sebesar -0,281 dan tingkat signifikansi 0,183 yang lebih besar dari 0,05 maka  $H_6$  ditolak. Hal ini berarti bahwa variabel pengendalian akuntansi merupakan variabel yang tidak memperkuat hubungan variabel kejelasan sasaran anggaran terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah. Sehingga hipotesis kelima ( $H_6$ ) yang menyatakan pengendalian akuntansi memperkuat hubungan kejelasan sasaran anggaran terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah tidak terbukti atau ditolak.

## **F. Pembahasan**

### **1. Standar akuntansi berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah**

Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa  $t$  hitung  $> t$  tabel, maka hipotesis pertama ( $H_1$ ) yang diajukan dalam penelitian ini diterima. Hal ini berarti standar akuntansi pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik penerapan standar akuntansi pemerintah, maka semakin besar pula tingkat akuntabilitas kinerja pemerintah. Standar akuntansi pemerintah ini dapat

disimpulkan sebagai alat untuk memenuhi pelaporan yang semakin transparan dan akuntabel. Upaya yang dapat dilakukan pemerintah untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan yaitu salah satunya dengan penyusunan dan penyampaian laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah. Hal ini telah diatur dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban APBN/APBD disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah.

Hasil penelitian ini menyatakan bahwa Pemerintah Kabupaten Bulukumba selalu menerapkan standar akuntansi pemerintah dalam setiap pelaporannya. Salah satu yang diterapkan dari standar akuntansi pemerintah adalah penggunaan basis akrual. Pencatatan transaksi keuangan tidak hanya dilakukan pada saat terjadi penerimaan dan pengeluaran uang saja. Sehingga informasi data dalam laporan keuangan lebih akurat. Pemerintah meyakini penerapan ini akan berdampak pada kualitas laporan keuangan menjadi lebih akuntabel. Hal ini juga didukung dengan adanya teori agensi. Dari segi perspektif teori keagenan, adanya pihak agen dan prinsipal dalam teori keagenan dapat menimbulkan munculnya konflik yang dapat mempengaruhi kualitas laporan yang dihasilkan. Pihak agen yaitu dalam hal ini manajemen pemerintah bisa saja memiliki tujuan tertentu dalam penyusunan laporan keuangan yang tidak sesuai dengan tujuan prinsipal. Dalam hal ini pemerintah bertanggung jawab untuk menyediakan informasi keuangan yang transparan dan akuntabel, yang dapat dicapai dengan ketaatan dalam penyusunan laporan keuangan begitu pula dalam pengungkapan

dan penyajian laporan keuangan pemerintah. Oleh karena itu, rangkaian-rangkaian prosedur pada standar akuntansi pemerintah sangat diperlukan.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Nasution (2019) dan Ajhar dkk (2015) yang menunjukkan bahwa standar akuntansi pemerintah berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah. Namun berbeda dengan penelitian Soleman dkk (2019) yang menyatakan bahwa standar akuntansi tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah.

## **2. Sistem pelaporan berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah**

Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa  $t$  hitung  $>$   $t$  tabel, maka hipotesis pertama ( $H_2$ ) yang diajukan dalam penelitian ini diterima. Hal ini berarti sistem pelaporan berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik sistem pelaporan yang diterapkan pemerintah maka semakin baik pula akuntabilitas kinerja pemerintah. Pelaporan merupakan hal yang sangat penting dalam proses akuntabilitas. Sehingga sistem pelaporan yang baik diperlukan untuk dapat memantau dan mengontrol kinerja manajer dalam mengatur anggaran yang telah ditetapkan.

Pemerintah Kabupaten Bulukumba sangat memperhatikan sistem pelaporan yang digunakan. Sebab laporan ini berguna juga untuk meninjau kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan untuk meningkatkan kinerja dan akuntabilitas saat pengimplementasian suatu anggaran sehingga pemerintah bisa mengetahui hasil dari pelaksanaan program ataupun pencapaian terhadap sasaran anggaran yang

telah ditetapkan. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Bulukumba selalu melaporkan kinerja secara detail seperti penyajian laporan keuangan secara lengkap, yang kemudian informasi dalam laporan keuangan tersebut dapat digunakan sebagai alat koreksi. Sehingga sistem pelaporan yang baik sangat dibutuhkan agar dapat menghasilkan informasi keuangan yang berkualitas sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah.

Hasil penelitian ini sejalan dengan teori keagenan, bahwa pemerintah sebagai agen berkewajiban untuk menyampaikan informasi-informasi secara terperinci dan transparansi kepada masyarakat sebagai principal agar masyarakat dapat mengetahui bagaimana tingkat keberhasilan ataupun kegagalan pemerintah dalam melaksanakan fungsi dan tanggungjawabnya. Agen sebagai pihak yang menerima amanah dan bertugas sebagai pengelola dana publik wajib menyajikan informasi keuangan yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya. Oleh karena itu sistem pelaporan diharapkan selalu diterapkan dengan baik, agar proses peninjauan, implementasi, dan pengendalian kinerja selalu bisa dilakukan dan akuntabilitas kinerja pemerintah dapat meningkat.

Hasil penelitian ini memperkuat hasil penelitian Zakiyudin & Suyanto (2015), Anjarwati (2012), Isnanto dkk (2019) yang menyatakan bahwa semakin tinggi tingkat sistem pelaporan akan berpengaruh terhadap tingginya tingkat akuntabilitas kinerja pemerintah. Namun berbeda dengan penelitian Setiawan (2013) sistem pelaporan tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah.



### **3. Kejelasan sasaran anggaran berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah.**

Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa  $t$  hitung  $>$   $t$  tabel, maka hipotesis pertama ( $H_3$ ) yang diajukan dalam penelitian ini diterima. Hal ini berarti kejelasan sasaran anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah. Hal ini menunjukkan bahwa semakin jelasnya sasaran anggaran dalam pengelolaan anggaran sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah. Sasaran anggaran yang jelas sangat diperlukan untuk mengetahui bagaimana tujuan anggaran ditetapkan dengan jelas sesuai dengan tujuan agar anggaran dapat dipahami oleh orang yang bertanggungjawab atas pencapaian anggaran tersebut.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah Kabupaten Bulukumba dalam proses penganggaran akuntabilitas kinerja dimulai dari tahap penyusunan rencana strategis, penetapan kinerja hingga pelaporan kinerja. Anggaran yang jelas dan mudah dimengerti wajib disusun dengan baik agar pelaksanaan dan akuntabilitas kinerja pemerintah juga dapat tercapai dengan baik. Selain itu, dengan adanya sasaran anggaran yang jelas memudahkan pemerintah dalam menyusun target anggaran selanjutnya. Sehingga target-target anggaran yang disusun dapat sesuai dengan sasaran yang ingin dicapai pemerintah. Hal tersebut membuktikan bahwa dengan sasaran anggaran yang jelas dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah, karena kejelasan sasaran anggaran dapat membantu pemerintah mencapai kinerja yang diharapkan, sebab dengan mengetahui sasaran anggaran yang jelas maka tingkat kinerja akan tercapai.

Hal ini sejalan dengan teori agensi agensi, bahwa pemerintah sebagai agen agar dapat membuat keputusan yang terbaik bagi masyarakat. Pengelolaan anggaran menunjukkan perilaku para pengelola anggaran agar dapat bekerja dengan baik agar terwujudnya sasaran anggaran yang jelas. Sebagaimana dalam Surah Al-Qasas/28:26:



Terjemahnya :

“Dan salah seorang dari kedua (perempuan) itu berkata, “wahai ayahku! Jadikanlah dia sebagai pekerja (pada kita), sesungguhnya orang yang paling baik yang engkau ambil sebagai pekerja (pada kita) ialah orang yang kuat dan dapat dipercaya.” (Kementrian Agama RI)

Hasil penelitian ini sesuai dengan Zein (2016), Yulianto dan Muthaher (2019) dan Mikoshi (2020) yang menunjukkan bahwa kejelasan sasaran anggaran berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah. Berbeda dengan penelitian Vonny (2014) kejelasan sasaran anggaran tidak berpengaruh akuntabilitas kinerja pemerintah.

#### **4. Pengendalian akuntansi memoderasi standar akuntansi pemerintah terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah**

Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa  $t$  hitung  $>$   $t$  tabel, maka hipotesis pertama ( $H_4$ ) yang diajukan dalam penelitian ini diterima. Hal ini berarti bahwa pengendalian akuntansi merupakan variabel moderasi yang

memperkuat hubungan standar akuntansi pemerintah terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah. Hal ini menunjukkan bahwa adanya pengendalian akuntansi yang semakin baik pada instansi pemerintah dalam penerapan standar akuntansi pemerintah dapat meningkatkan akuntabilitas suatu instansi.

Hasil penelitian ini membuktikan bahwa standar akuntansi pemerintah pada pemerintah kabupaten bulukumba dapat diterapkan dengan baik yang didukung dengan adanya sebuah pengendalian akuntansi di dalamnya. Pengendalian akuntansi yang diterapkan dengan baik dan penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah yang sesuai dengan standar akuntansi pemerintah yang berlaku menurut peraturan perundang-undangan maka akan meningkatkan pertanggungjawaban kinerja dalam sebuah instansi. Hal ini tidak terlepas dari teori agensi bahwa pengelolaan pemerintah daerah harus diawasi untuk memastikan bahwa pengelolaan keuangan dilakukan dengan patuh terhadap peraturan dan ketentuan yang berlaku. Sehingga rangkaian-rangkaian prosedur pada standar akuntansi pemerintah dengan pengendalian akuntansi sangat diperlukan agar dapat menghasilkan informasi keuangan yang transparan dan akuntabel.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Pratama dkk (2019) dan Zakiyudin & Suyanto (2015) yang menunjukkan bahwa pengendalian akuntansi berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah.

##### **5. Pengendalian akuntansi memoderasi pengaruh sistem pelaporan terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah**

Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa  $t$  hitung  $>$   $t$  tabel, maka hipotesis pertama ( $H_5$ ) yang diajukan dalam penelitian ini diterima. Hal ini berarti bahwa pengendalian akuntansi merupakan variabel moderasi yang memperkuat hubungan sistem pelaporan terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah. Hal ini menunjukkan bahwa adanya pengendalian akuntansi yang semakin baik pada instansi pemerintah dalam sistem pelaporan dapat meningkatkan akuntabilitas suatu instansi.

Hasil penelitian ini membuktikan bahwa pemerintah Kabupaten Bulukumba memiliki pengendalian akuntansi yang berkualitas sehingga dapat memiliki sistem pelaporan yang baik terhadap setiap pelaksanaan kegiatannya dan pemerintah dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya. Sistem pelaporan yang baik dalam pemerintahan sangat diperlukan untuk menyajikan dan melaporkan informasi secara akuntabel dan transparan. Keadaan tersebut dapat dicapai dengan dengan adanya pengendalian akuntansi yang semakin baik sehingga tingkat keberhasilan akuntabilitas kinerja pemerintah dapat lebih meningkat.

Sistem pelaporan yang baik ini sangat dibutuhkan untuk mengurangi asimetri informasi. Hal ini sejalan dengan teori keagenan bahwa banyak terjadi asimetri informasi pada pihak agen atau pemerintah. Dengan adanya asimetri informasi inilah yang dapat memungkinkan terjadinya penyelewengan oleh agen. Oleh karena itu pemerintah sebagai agen harus selalu meningkatkan akuntabilitasnya dengan menyampaikan secara terperinci dan transparan dalam melaksanakan fungsi dan tanggung jawabnya. Hal tersebut membuktikan bahwa pengendalian

akuntansi yang berkualitas dapat memiliki sistem pelaporan yang baik sehingga berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Yulianto & Muthaher (2019) dan Kartika & Sukamto (2019) yang menunjukkan bahwa pengendalian akuntansi berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah.

#### **6. Pengendalian akuntansi memoderasi pengaruh kejelasan sasaran anggaran terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah**

Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa  $t$  hitung  $<$   $t$  tabel, maka hipotesis pertama ( $H_6$ ) yang diajukan dalam penelitian ini ditolak. Hal ini berarti bahwa pengendalian akuntansi tidak dapat memoderasi kejelasan sasaran anggaran terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah. Hal ini menunjukkan bahwa pengendalian akuntansi tidak dapat mempengaruhi kejelasan sasaran anggaran sehingga tidak dapat berdampak pada akuntabilitas kinerja pemerintah.

Hasil penelitian ini menggambarkan bahwa masih adanya kelemahan dalam pengelolaan anggaran dan dapat mendorong terjadinya penyimpangan yang berdampak pada akuntabilitas kinerja pada pemerintah akan menurun. Artinya, pengendalian akuntansi yang dilakukan oleh pemerintah tidak berperan dalam kejelasan sasaran anggaran yang akan berdampak pada peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Dilihat dari opini BPK tahun 2021 yang menyatakan masih adanya berbagai temuan maupun kekurangan yang didapatkan pada pelaksanaan anggaran, seperti praktik penyalahgunaan anggaran pada perangkat daerah yang sering kali terulang disetiap tahunnya.

Hal ini berarti bahwa pengendalian pada SKPD masih ditemukan masalah jika dilihat dari fenomena yang terjadi.

Meskipun pengendalian akuntansi tidak memperkuat kejelasan sasaran anggaran dalam peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah Kabupaten Bulukumba, namun pengendalian akuntansi harus tetap diperhatikan karena pengendalian akuntansi ini terdiri dari semua aspek transaksi keuangan yang dapat membantu dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, yang dapat berimplikasi dalam peningkatan kinerja pemerintah. Sehingga saat ini pemerintah sangat memprioritaskan peningkatan fungsi pengendalian sehingga praktik penyalahgunaan anggaran di perangkat daerah tidak terulang lagi di masa-masa mendatang. Pengelolaan anggaran berdasarkan teori agensi bahwa pemerintah perlu menyampaikan informasi penganggaran secara detail dan transparan kepada masyarakat sebagai principal.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Widaryanti & Pancawardani (2018) dan Wahid dkk (2016) yang menunjukkan bahwa pengendalian akuntansi berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### ***A. Kesimpulan***

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui pengaruh standar akuntansi pemerintah, sistem pelaporan, serta kejelasan sasaran anggaran terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah dengan pengendalian akuntansi sebagai variabel moderasi, maka berdasarkan hasil analisis diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Standar akuntansi pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah, maka hipotesis pertama (H1) diterima. Hal ini membuktikan bahwa semakin baik penerapan standar akuntansi pemerintah, maka tingkat akuntabilitas kinerja pemerintah akan semakin besar.
2. Sistem pelaporan berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah, maka hipotesis kedua (H2) diterima. Hal ini membuktikan bahwa semakin tingginya tingkat sistem pelaporan, berpengaruh tingkat akuntabilitas kinerja pemerintah akan semakin tinggi.
3. Kejelasan sasaran anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah, maka hipotesis (H3) diterima. Hal ini membuktikan bahwa semakin jelasnya sasaran anggaran dalam pengelolaan sebuah anggaran dapat berpengaruh terhadap peningkatan kinerja serta akuntabilitas kinerja pada pemerintah.

4. Pengendalian akuntansi dapat memoderasi hubungan standar akuntansi pemerintah terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah, maka hipotesis (H<sub>4</sub>) diterima. Hal ini membuktikan bahwa pengendalian akuntansi dalam standar akuntansi dapat memperkuat akuntabilitas kinerja pemerintah.
5. Pengendalian akuntansi dapat memoderasi hubungan sistem pelaporan terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah, maka hipotesis (H<sub>5</sub>) diterima. Hal ini membuktikan bahwa pengendalian akuntansi dapat memperkuat pengaruh sistem pelaporan terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah.
6. Pengendalian akuntansi tidak dapat memoderasi hubungan kejelasan sasaran anggaran terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah, maka hipotesis (H<sub>6</sub>) ditolak. Hal ini berarti bahwa pengendalian akuntansi dalam pemerintahan tidak dapat memperkuat pengaruh kejelasan sasaran anggaran terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah.

#### ***B. Keterbatasan Penelitian***

1. Pengumpulan data penelitian ini menggunakan kuesioner. Metode ini kurang efektif karena responden menjawab pertanyaan terkadang kurang serius, sehingga hasil penelitian bisa saja tidak menunjukkan keadaan yang sesungguhnya.
2. Variabel dalam penelitian ini terbatas, hanya meneliti tentang variabel standar akuntansi pemerintah, sistem pelaporan, kejelasan sasaran anggaran



dan pengendalian akuntansi, sedangkan masih terdapat banyak variabel lain yang perlu diteliti yang mempengaruhi akuntabilitas kinerja pemerintah.

### **C. *Saran***

Berdasarkan hasil analisis, pembahasan dan kesimpulan yang telah dijelaskan diatas, maka saran penelitian agar hasil penelitian berikutnya mendapatkan hasil yang lebih maksimal yaitu :

1. Bagi pemerintah, diharapkan mampu selalu meningkatkan kinerja para pegawai pemerintah dengan melakukan peningkatan eektivitas pengendalian dan keterbukaan informasi, sehingga keputusan yang dihasilkan tidak merugikan pihak manapun serta kepercayaan public meningkat terhadap pemerintah.
2. Bagi peneliti selanjutnya disarankan agar memperluas objek penelitian. Selain itu, disarankan bagi peneliti selanjutnya agar dapat mengembangkan penelitian ini dengan meneliti faktor-faktor lain yang lebih berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an dan Terjemahan Kementerian Agama Republik Indonesia
- Ajhar, Akram, E. P. (2015). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kesiapan Penerapan Sap Berbasis Akrual dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Empiris Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Dompu). *Jurnal Magister Akuntansi Universitas Mataram*, 3(1), 62–73.
- Albugis, febriana F. (2016). Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dalam Mewujudkan Transparansi Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal EMBA*, 4(3), 78–89.
- Ali Zakiyudin, M., & Suyanto, S. (2015). Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi, Sistem Pelaporan dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Inspektorat Jenderal Kementerian Agama RI. *Jurnal Riset Akuntansi & Perpajakan (JRAP)*, 2(01), 89–96. <https://doi.org/10.35838/jrap.v2i01.99>
- Al-Maragi, A.M. (1993). *Tafsir Al-Maragi*. Semarang: CV Toha Putra
- Anjarwati, M. 2012. Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. *Accounting Analysis Journal*, 1(2), 1–7.
- AR, M., Syamsidar, S., & Efendy, D. (2018). Pengaruh Sistem Pelaporan dan Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Pada Satuan Kerja Pemerintah Aceh). *Jurnal Riset Inspirasi Manajemen dan Kewirausahaan*, 2(2), 95–101. <https://doi.org/10.35130/jrimk.v2i2.21>
- Azwar, S. (2018). *Reliabilitas dan Validitas*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Bastian Indra (2015). *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Erlangga
- Basyir, Hikmat. (2013). *Tafsir Al-Muyassar Jilid 2*. Solo: An-Naba'
- Daniel Kartika Adhi, & Suhardjo, Y. (2013). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Dan Kualitas Aparatur Pemerintah Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Kasus Pada Pemerintah Kota Tual). *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.
- Dewata, E., Sari, Y., Jauhari, H., Lestari, T. D., & Sriwijaya, P. N. (2020). Ketaatan pada Peraturan Perundangan, Sistem Pelaporan dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, 8(3), 541–550. <https://doi.org/10.17509/jrak.v8i3.26342>

- Faizal Yoma. (2018). Pengaruh Kompetensi Aparatur Pemerintah, Ketaatan Pada Peraturan Perundangan Dan Pengendalian Akuntansi Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Empiris pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kulon Progo). *Skripsi. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta*
- Fathia, N. (2017). Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah, Penerapan Anggaran berbasis Kinerja, Kejelasan Sasaran Anggaran, Sistem Pelaporan Kinerja dan Pengendalian Akuntansi Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) (Studi Kasus SKPD di Prov. *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Riau*, 4(1), 670–684.
- Fauzan, R. H. (2017). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi, Sistem Pelaporan dan Penerapan Akuntabilitas Keuangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) (Studi Empiris Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Provins. *JOMFekom*, 4(1), 843–857. <https://media.neliti.com/media/publications/125589-ID-analisis-dampak-pemekaran-daerah-ditinja.pdf>
- Fitriyani, N., & Herawati, H. (2019). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua, Sistem Pengendalian Intern Dan Kualitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Kasus Inspektorat Kabupaten Bengkulu Tengah). *JAZ: Jurnal Akuntansi Unihaz*, 2(2), 19-35.
- Ghozali, Imam. 2013. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 21*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- Hafiz, M. (2017). Pengaruh Kompetensi Aparatur Pemerintah, Ketaatan Pada Peraturan Perundang-undangan Dan Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dengan Komitmen Organisasi Dan Kinerja Manajerial Sebagai Variabel Moderating (Studi Empi. *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi*, 4(1), 99–117.
- Isnanto, Y., Suharno, & Widarno, B. (2019). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. *Jurnal Akuntansi dan Sistem Teeknologi Informasi*, 15(2), 489–501. <https://doi.org/10.32663/jaz.v2i2.989>
- Kartika, R. D., & Sukamto. (2019). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi Dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Empiris Pada Dinas Daerah Kota Surabaya). *Jurnal Liability*, 01(2), 63–83.
- Kinasih, H. (2018). Pengaruh Pengendalian Akuntansi, Sistem Pelaporan, Kejelasan Sasaran Anggaran, dan Ketaatan Pada Peraturan Perundangan Terhadap

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Empiris pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo). *Skripsi. Universitas Muhammadiyah Magelan*

- Kurniawan, A. R. (2018). Pengaruh Karakteristik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. *Jurnal Akuntansi*, 6(1).
- Mahardini, N. Y., & Miranti, A. (2018). Dampak Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Pada Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2015. *Jurnal Akuntansi : Kajian Ilmiah Akuntansi (JAK)*, 5(1), 22. <https://doi.org/10.30656/jak.v5i1.500>
- Mahsun, M., Sulistiyowati, F., Purwanugraha, H. S. (2016). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: BPFE
- Mardiasmo, (2012). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.
- Masruhin, A., & Kaukab, M. E. (2019). Pengaruh Kompetensi Aparatur, Komitmen Organisasi, Partisipasi Masyarakat, Dan Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Pengelolaan Dana Desa (Studi Empiris Pada Perangkat Desa Di Kecamatan Mojotengah Kabupaten Wonosobo). *Journal of Economic, Business and Engineering*, 1(1), 118–130.
- Nasution, D. A. D. (2018). Analisis Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah, Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah. *Jurnal Studi Akuntansi & Keuangan*, 2(3), 149–162.
- Nasution, D. A. D. (2019). Pengaruh Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaI dan Pengawasan Kualitas Laporan Keuangan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kehutanan, Dan Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Pemerintah. *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Publik*, 9(2), 30–43.
- Nordiawan, D., Putra, I. S., & Rahmawati, M. (2012). *Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta: Salemba Empat
- Nurina, & Yahya, M. R. (2016). Pengaruh Pelaksanaan Anggaran Belanja Modal Dan Ketaatan Pada Pemerintah Kota Banda Aceh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonmi Akuntansi (JIMEKA)*, 1(2), 128–142.
- Pebrianti, S., & Aziza, N. (2018). Effect of Clarity of Budget Objectives, Accounting Control, Reporting Systems, Compliance with Regulation on Performance Accountability of Government Agencies. *Advances in Social Science, Education*

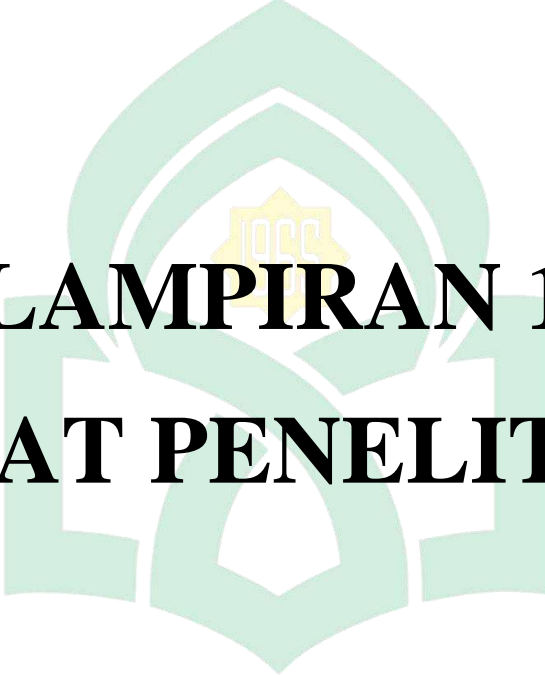
*and Humanities Research*, 292.

- Pratama, R., Agustin, H., & Taqwa, S. (2020). Analisis Pengaruh Pengendalian Akuntansi, Sistem Pelaporan Dan Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. *Fokus Ekonomi: Jurnal Ilmiah Ekonomi*, 15(2), 477–492. <https://doi.org/10.34152/fe.15.2.477-492>
- Rahadi, D. R., Marbun, S. O., Bhakti, S. T., Presiden, U., & Mochamadmuslihstietribhaktiacid, E. (2020). Tata Kelola Pemerintahan Berkelanjutan Untuk Meningkatkan Kinerja Pemerintah Daerah. *Konferensi Nasional Ilmu Administrasi, February*, 1–7.
- Rahmadoni, F., & Erwandi. (2018). Evaluasi Atas Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Berbasis Hasil. *JEM: Jurnal Ekonomi dan Manajemen STIE Pertiba Pangkalpinang*, 4(1), 53–69.
- Ramadhania, S., & Novianty, I. (2020). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. *Prosiding The 11th Industrial Research Workshop and National Seminar*, 807–813.
- Rangkuti, M. H. B. (2018). Akuntabilitas Kinerja Di Instansi Pemerintah (Studi Empiris Kinerja Di Instansi Pemerintah). *Jurnal Akuntansi Bisnis & Publik*, 8(2), 1–14.
- Rosliyanti, A. (2014). Pengaruh Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sakip) Terhadap Penerapan Good Governance. *Jurnal Wawasan dan Riset Akuntansi*, 1(2), 66–79.
- Savitri, E., & Satriawan, R. A. (2014). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi dan Sistem Pelaporan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rokan Hulu. *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Riau*
- Setiawan, E. (2014). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. *Universitas RIAU*, 1–14.
- Siregar, B. (2015). *Akuntansi Sektor Publik (Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Akrual)*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN
- Sitompul, A. (2020). *Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Partisipasi Anggaran, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Komitmen Organisasi Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Medan*.
- Soleman, R., Soleman, R., & Zainuddin, Z. (2019). Penerapan Sistem Akuntansi

- Pemerintah Daerah, Kualitas Sistem Pengendalian Intern dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. *Hibualamo: Seri Ilmu-Ilmu Sosial dan Kependidikan*, 3(1), 31-37.
- Suhaesti, S. R. (2016). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi, Dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis). *JOM Fekon*, 3(1), 705–719.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Sukarno, S. A., Tinangon, J. J., & Tangkuman, S. J. (2020). Pengaruh kompetensi aparat dan komitmen organisasi terhadap implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi pada Kantor Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Sulawesi Utara). *Indonesia Accounting Journal*, 2(2), 110. <https://doi.org/10.32400/iaj.27981>
- Suprihatin, N. S., & Ananthy, A. A. (2019). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Dan Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan. *Jurnal Riset Akuntansi Terpadu*, 12(2), 242-252.
- Tahir, H. K., Poputra, A. T., & Warongan, J. D. (2016). Faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Accountability*, 5(2), 37-51.
- Vonny, N. A. (2013). Pengaruh Akuntabilitas Publik, Partisipasi Penyusunan Anggaran Dan Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Kinerja Manajerial SKPD (Studi Empiris Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Di Kabupaten Sijunjung). *Jurnal Akuntansi 2.3* (2014). *Jurnal Akuntansi 2.3* (2014).
- Wahid, I., Nasir, A., & Supriono, S. (2016). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi, Kompetensi Aparatur Pemerintah Daerah, Sistem Pelaporan, dan Ketaatan Pada Peraturan Perundangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Empiris pada Satuan Kerja Perangkat Dae. *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Riau*, 3(1), 2457–2471.
- Widaryanti, & Pancawardani, N. L. (2020). Analisis Pengaruh Pengendalian Akuntansi, Sistem Pelaporan dan Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. *Jurnal Fokus Ekonomi*, 15(2), 477–492.
- Worotikan, J. H., Sondakh, J. J., & Gamaliel, H. (2018). Analisis Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada Dinas Pekerjaan Umum

Kabupaten Minahasa. *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi*, 14(1), 546–555.  
<https://doi.org/10.32400/gc.13.04.21431.2018>

- Yulianti, R., Hardi, H., & Rusli, H. (2014). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Kesulitan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi, Dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Pada Satuan Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Pelalawan). *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi*, 1(2), 1–15.
- Yulianto, A. R., & Muthaher, O. (2019). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi Dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Pati. *Tirtayasa Ekonomika*, 14(2), 204.  
<https://doi.org/10.35448/jte.v14i2.6478>
- Zakiyudin, M. A., & Suyanto, S. (2015). Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi, Sistem Pelaporan dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Inspektorat Jenderal Kementerian Agama RI. *Jurnal Riset Akuntansi & Perpajakan (JRAP)*, 2(01), 89-96.
- Zeyn, E. (2011). Pengaruh Penerapan Good Governance dan Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap Akuntabilitas Keuangan. *Jurnal Reviu Akuntansi dan Keuangan*, 10(1), 52–62.



**LAMPIRAN 1**  
**SURAT PENELITIAN**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R





KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) ALAUDDIN MAKASSAR  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Kampus I : Jl. Sultan Alauddin No. 63 Makassar (0411) 864928 Fax 864923  
Kampus II : Jl. H. M. Yasin Limpo No. 36 Samata Sungguminasa – Gowa Tlp. 841879 Fax 8221400

Nomor : **4181** /EB.I/PP.00.9/10/2021

Gowa, **5** Oktober 2021

Sifat : **Penting**

Lampiran : -

Perihal : **Permohonan Izin Penelitian**

Kepada,

**Yth. UPT P2T BKPM**

di Tempat

Assalamu Alaikum Warohmatullah Wabarokatuh.

Dengan hormat disampaikan bahwa Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar yang tersebut namanya dibawah ini:

Nama : **Fifi Juliastuti Syarif**  
NIM : 90400117050  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Jurusan : Akuntansi  
Semester : IX (Sembilan)  
Alamat : Jl. Kemakmuran, Tanete, Kabupaten Bulukumba

Bermaksud melakukan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana. Adapun judul skripsinya:

**“Pengaruh Standar Akuntansi Pemerintah, Sistem Pelaporan, dan Kejelasan Sasaran Anggaran terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dengan Pengendalian Akuntansi sebagai Variabel Moderasi (Studi pada Pemerintah Kabupaten Bulukumba)”**

Dengan Dosen pembimbing: **1. Memen Suwandi, SE., M.Si.**  
**2. Nur Rahma Sari, SE., M.Acc., Ak**

Untuk maksud tersebut kami mengharapkan kiranya kepada mahasiswa yang bersangkutan dapat diberi izin melakukan penelitian **di SKPD Kabupaten Bulukumba.**

Demikian harapan kami dan Terima Kasih.

Wassalam

**Kuasa Dekan**

**Nomor : 4088/EB.1/Kp.07/9/2021**

**Tanggal : 30 September 2021**

**Wakil Dekan Bidang Akademik**

**Dr. M. Wahyuddin Abdullah, S.E., M.Si., Ak, CA**  
NIP. 19730525 200801 1 017

Tembusan :

1. *Rektor UIN Alauddin Makassar di Samata Gowa*
2. *Mahasiswa yang bersangkutan*
3. *Arsip*



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN

Nomor : 22029/S.01/PTSP/2021  
Lampiran : -  
Perihal : Izin Penelitian

KepadaYth.  
Bupati Bulukumba

di-  
**Tempat**

Berdasarkan surat Dekan Fak. Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar Nomor : 4131/EB.I/PP.00.9/10/2021 tanggal 05 Oktober 2021 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

**N a m a** : FIFI JULIASTUTI SYARIF  
**Nomor Pokok** : 90400117050  
**Program Studi** : Akuntansi  
**Pekerjaan/Lembaga** : Mahasiswa(S1)  
**Alamat** : Jl. H. M. Yasin Limpo No. 36, Samata-Gowa

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka penyusunan Skripsi, dengan judul :

**" PENGARUH STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH, SISTEM PELAPORAN, DAN KEJELASAN SASARAN ANGGARAN TERHADAP AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH DENGAN PENGENDALIAN AKUNTANSI SEBAGAI VARIABEL MODERASI (Studi Pada Pemerintah Kabupaten Bulukumba) "**

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. **08 Oktober s/d 01 Desember 2021**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami *menyetujui* kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik dan Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan menggunakan **barcode**,

Demikian surat izin penelitian ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar  
Pada tanggal : 08 Oktober 2021

**A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN**  
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU**  
**SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN**  
Selaku Administrator Pelayanan Perizinan Terpadu

**Ir. H. DENNY IRAWAN SAARDI, M.Si**  
Pangkat : Pembina Utama Madya  
Nip : 19620624 199303 1 003

Tembusan Yth  
1. Dekan Fak. Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar di Makassar;  
2. *Peringgal*.

SIMAP PTSP 08-10-2021



Jl. Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936  
Website : <http://simap.sulselprov.go.id> Email : [ptsp@sulselprov.go.id](mailto:ptsp@sulselprov.go.id)  
Makassar 90231





**PEMERINTAH KABUPATEN BULUKUMBA**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**(DPMPTSP)**

Alamat : Jl. Kenari No.13 Telp. (0413) 85060 Bulukumba 92512

Bulukumba, 15 Oktober 2021

Nomor : 0588/DPMPTSP/X/2021  
Lampiran :  
Perihal : Izin Penelitian

Kepada  
Yth. Kepala OPD Se kabupaten Bulukumba

Di  
Tempat

Berdasarkan Surat Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Nomor : 070/7854/Kesbangpol/X/2021 tanggal 15 Oktober 2021 Perihal Rekomendasi izin Penelitian maka yang tersebut dibawah ini

Nama	: FIFI JULIASTUTI SYARIF
Nomor Pokok	: 90408117050
Program Studi	: AKUNTANSI
Institusi	: UIN ALUDDIN MAKASSAR
Alamat	: GRAHA CIPTA HERTASNING, JL. TUN ABDUL RAZAK, GOWA
Pengikut	: 1 (SATU) ORANG

Bermaksud melakukan Penelitian di OPD Se - Kabupaten Bulukumba dalam rangka penyusunan **SKRIPSI** dengan judul "**PENGARUH STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH, SISTEM PELAPORAN DAN KEJELASAN SASARAN ANGGARAN TERHADAP AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH DENGAN PENGENDALIAN AKUNTANSI SEBAGAI VARIABEL MODERASI (STUDI PADA PEMERINTAH KABUPATEN BULUKUMBA)**" yang akan berlangsung pada tanggal 08 Oktober s/d 01 Desember 2021.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, pada prinsipnya kami mengizinkan yang bersangkutan untuk melaksanakan kegiatan tersebut dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Mematuhi semua Peraturan Perundang - Undangan yang berlaku dan mengindahkan adat - istiadat yang berlaku pada masyarakat setempat;
2. Tidak mengganggu keamanan/ketertiban masyarakat setempat;
3. Penelitian/pengambilan data menyimpang dari izin yang diberikan;
4. Melaporkan hasil pelaksanaan penelitian/pengambilan data serta menyerahkan 1(satu) eksampiar hasilnya kepada Bupati Bulukumba Cq Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Bulukumba;
5. Surat izin ini akan dicabut atau dianggap tidak berlaku apabila yang bersangkutan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tersebut di atas, atau sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan kegiatan penelitian/pengumpulan data dimaksud belum selesai.

Demikian surat izin ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Tembusan:

1. Bupati Bulukumba di Bulukumba (sebagai laporan);
2. Kepala Kesbangpol Kab. Bulukumba di Bulukumba;
3. Arsip.



**PEMERINTAH KABUPATEN BULUKUMBA**  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Jl. Jend. Sudirman No.1 Telp. (0413) 81 035 Bulukumba 9251

**SURAT KETERANGAN**

No. 41 - 094 /SETDA/XI/2021

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : DRS. MANSUR. M.Si  
NIP : 196712191989031007  
Jabatan : KABAG KEUANGAN SEKRETARIAT DAERAH

Menyatakan bahwa Mahasiswa yang tersebut dibawah ini :

Nama : Fifi Juliastuti Syarif  
NIP : 90400117050  
Jurusan : Akuntansi /UIN Alauddin Makassar

Benar yang bersangkutan tersebut diatas telah melaksanakan penelitian pada kantor Sekretariat Daerah kab. Bulukumba dengan judul " **PENGARUH STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH, SISTEM PELAPORAN DAN KEJELASAN SASARAN ANGGARAN TERHADAP AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH DENGAN PENGENDALIAN AKUNTANSI SEBAGAI VARIABEL MODERASI ( STUDI PADA PEMERINTAH KAB. BULUKUMBA** ".

Untuk dipergunakan dalam rangka penyusunan Skripsi

Demikian Surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bulukumba 02 November 2021

**KABAG KEUANGAN**  
  
**DRS. MANSUR. M.Si**  
Nip. 196712191989031007



PEMERINTAH KABUPATEN BULUKUMBA  
INSPEKTORAT DAERAH

Jl. Srikaya No. 1 Bulukumba Tlp. (0413) 81070

Bulukumba, 29 Oktober 2021

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 600/159/102A/XI/2021

Yang bertanda Tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Nurjalil,SH,MH  
Jabatan : Sekretaris Inspektorat Daerah Kab. Bulukumba  
Pangkat/Gol : Pembina Utama Muda/IV b  
Nip : 19671104 199803 1 005  
Alamat : Bulukumba

Bahwa berdasarkan Surat dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor : 0588/DPMPTSP/X/2021 Tanggal 15 Oktober 2021 Perihal : Izin Penelitian, dengan ini memberikan Keterangan bahwa telah melakukan Penelitian pada Inspektorat Daerah Kabupaten Bulukumba

Nama : Fifi Juliastuti Syarif  
No. Pokok : 90400117050  
Program Studi/Prodi : Akuntansi  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Institusi : UIN Alauddin Makassar  
Alamat : Graha Cipta Hertasning, Jl. Tun Abdul Razak, Gowa

Demikian Surat Keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

An. INSPEKTOR DAERAH  
SEKRETARIS

MUHAMMAD NURJALIL,SH,MH

Pangkat : Pembina TK.I

Nip.19671104 199803 1 005



**PEMERINTAH KABUPATEN BULUKUMBA**  
**BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH**  
*Jl. Jend. Sudirman Nomor : 5 Telp. (0413) – 81002 Bulukumba*

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 325/BPKD/XI/2021

Yang bertanda tangan dibawah ini :

**Nama** : Andi Sufardiman,SH.M.Si.  
**NIP.** : 19730215 200003 1 005  
**Pangkat/Gol.** : Pembina Tk. I /IV.b  
**Jabatan** : Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah  
Kab. Bulukumba

Dengan ini menerangkan bahwa :

**Nama** : Fifi Juliastuti Syarif  
**No. Pokok** : 90400117050  
**Program Studi** : AKUNTANSI  
**Institusi** : UIN ALAUDDIN MAKASSAR  
**Alamat** : Graha Cipta Hertasning Jl Tun Abdul Razak Gowa

Telah Melakukan Penelitian/Pengambilan data pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Bulukumba dalam rangka Penyusunan SKRIPSI dengan Judul "**PENGARUH STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH,SISTEM PELAPORAN DAN KEJELASAN SASARAN ANGGARAN TERHADAP AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH DENGAN PENGENDALIAN AKUNTANSI SEBAGAI VARIABEL MODERASI (STUDI PADA PEMERINTAH KABUPATEN BULUKUMBA)**" yang berlangsung pada tanggal 08 Oktober s/d 01 Desember 2021

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bulukumba, 10 November 2021

**KEPALA BADAN,**  
  
**ANDI SUFARDIMAN,SH.M.Si**  
Pembina Tk.I(IV.b)  
NIP. : 19730215 200003 1 005





**PEMERINTAH KABUPATEN BULUKUMBA**  
**BADAN PENDAPATAN DAERAH**

*Jl. Kedondong Kel. Loka, Kec. Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba*

**SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN**

Nomor : 53b /BPD/XI/2021

Berdasarkan surat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Nomor: 0588/DPMPTSP/X/2021 tertanggal 15 Oktober 2021 perihal izin penelitian, maka yang tersebut dibawah ini:

Nama : FIFI JULIASTUTI SYARIF  
Nomor Pokok : 90400117050  
Program Studi : AKUNTANSI (UIN ALAUDDIN MAKASSAR)  
Alamat : GRAHA CIPTA HERTASNING, JL. TUN ABDUL RAZAK, GOWA

Benar bahwa yang bersangkutan telah melakukan penelitian/pengambilan data di Kantor Badan Pendapatan Daerah dalam rangka penyelesaian tugas akhir/penyusunan skripsi dengan judul ***"Pengaruh Standar Akuntansi Pemerintah, Sistem Pelaporan Dan Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Dengan Pengendalian Akuntansi Sebagai Variabel Moderasi (Studi Pada Pemerintah Kabupaten Bulukumba)"*** yang berlangsung pada tanggal 08 Oktober s/d 01 Desember 2021.

Demikian surat keterangan ini di buat untuk diberikan kepada mahasiswa (i) yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bulukumba, 10 November 2021

**KEPALA BADAN**  
  
**Drs. ANDI M. PPIWALI**  
Pangkat : Pembina Utama Muda  
Nip : 19650915 199103 1 013



**PEMERINTAH KABUPATEN BULUKUMBA**  
**BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**  
**(BALITBANGDA)**

Alamat : Jalan Durian No.2 Telp. (0413) 81102 Bulukumba

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 263 /XI/Balitbangda/2021

Yang Bertanda tangan dibawah ini :

Nama : A. Nurhayati, SE.  
NIP : 19720801 199402 2 002  
Pangkat/Gol : Penata Tk. I- III/d  
Jabatan : Kasubag Program dan Keuangan

Menyatakan bahwa Mahasiswa yang tersebut dibawah ini :

Nama : Fifi Juliastuti Syari  
Nomor Pokok : 90400117050  
Jurusan : Akuntansi /UIN Alauddin Makassar

Benar yang bersangkutan tersebut diatas telah melaksanakan penelitian pada Kantor Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Bulukumba dengan judul "**PENGARUH STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH, SISTEM PELAPORAN DAN KEJELASAN SASARAN ANGGARAN TERHADAP AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH DENGAN PENGENDALIAN AKUNTANSI SEBAGAI VARIABEL MODERASI (STUDI PADA PEMERINTAH KAB.BULUKUMBA**".

Untuk dipergunakan dalam rangka penyusunan Skripsi.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bulukumba, 01 November 2021

An.Kepala BALITBANGDA

KASUBAG PROGRAM DAN KEUANGAN



A. NURHAYATI, SE.

Pangkat : Penata Tk. I- III/d

NIP : 19720801 199402 2 002





**PEMERINTAH KABUPATEN BULUKUMBA**  
**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**

JL. Lanto Dg. Pasewang No. 15 Tlp/Fax (0413) 82127

**SURAT KETERANGAN**

Nomor. 269/BPBD-PAK/XI/2021

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : A. Fadhilah Israg Iskandar, S.STP, M.Adm. Pemb.  
Nip : 19831225 200312 2 001  
Pangkat/Gol : Pembina  
Jabatan : Sekretaris

Menyatakan bahwa Mahasiswa yang tersebut dibawah ini :

Nama : Fifi Juliastuti Syarif  
Nomor Pokok : 90400117050  
Jurusan : Akuntansi / UIN Alauddin Makassar

Benar yang bersangkutan tersebut diatas telah melaksanakan Penelitian pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kab. Bulukumba dengan judul "PENGARUH STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH, SISTEM PELAPORAN DAN KEJELASAN SASARAN ANGGARAN TERHADAP AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH DENGAN PENGENDALIAN AKUNTANSI SEBAGAI VARIABEL MODERASI (STUDI PADA PEMERINTAH KABUPATEN BULUKUMBA)", untuk dipergunakan dalam rangka Penyusunan skripsi.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Bulukumba, 03 November 2021

An. Kepala Dinas,  
Sekretaris.



**A.Fadhilah Israg Iskandar, S.STP, M.Adm.Pemb**

Nip. 19660624 199603 1 003



PEMERINTAH KABUPATEN BULUKUMBA  
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**  
**( B A P P E D A )**

Jl. Kenari No. 1 Tlp. (0413) 81011 Kode Pos 92511

**SURAT KETERANGAN**

**Nomor : 382/050/X/Bappeda/2021**

Yang Bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Hj. Andi Mendeng,SE  
NIP : 196410141988032011  
Pangkat/Gol. : Penata Tk.I/III d  
Jabatan : Kasubag.Keuangan Bappeda

Menyatakan bahwa Mahasiswa yang tersebut dibawah ini :

Nama : Fifi Juliastuti Syarif  
Nomor Pokok : 90400117050  
Jurusan : Akuntansi /UIN Alauddin Makassar

Benar yang bersangkutan tersebut diatas telah melaksanakan Penelitian Pada Kantor Bappeda Kab.Bulukumba” dengan Judul **PENGARUH STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH,SISTEM PELAPORAN DAN KEJELASAN SASARAN ANGGARAN TERHADAP AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH DENGAN PENGENDALIAN AKUNTANSI SEBAGAI VARIABEL MODERASI (STUDI PADA PEMERINTAH KAB.BULUKUMBA) “.**

Untuk dipergunakan dalam rangka penyusunan Skripsi.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bulukumba, 22 Oktober 2021

An. KEPALA BAPPEDA KAB.BULUKUMBA  
KASUBAG.KEUANGAN



  
**HJ. ANDI MENDENG, SE**  
Pangkat : Penata Tk. I  
Nip. : 196410141988032011



**PEMERINTAH KABUPATEN BULUKUMBA  
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN  
SUMBER DAYA MANUSIA**

Alamat : Jl. R. A. Kartini No. 2 Bulukumba

**SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN**

**Nomor : 800/1.140/X/BKPSDM**

yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Andi Zulkifli Indrajaya, AP  
Jabatan : Plt. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan  
Sumber Daya Manusia Kab. Bulukumba  
Pangkat : Pembina Utama Muda / IV.c  
NIP : 19760905 199412 1 002

Dengan ini menerangkan bahwa Mahasiswi dibawah ini :

Nama : Fifi Juliastuti Syarif  
NIM : 90400117050  
Asal Perguruan Tinggi : UIN Alauddin Makassar  
Jurusan : Akuntansi

Benar-benar telah melakukan Penelitian pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Bulukumba dengan menggunakan metode Penelitian Kuesioner pada Subbag Keuangan pada tanggal 28 Oktober 2021, untuk memperoleh data dalam rangka penyusunan Skripsi yang berjudul **"Pengaruh Standar Akuntansi Pemerintah, Sistem Pelaporan dan Kejelasan Sasaran Anggaran terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dengan Pengendalian Akuntansi sebagai Variabel Moderasi (Studi pada Pemerintah Kabupaten Bulukumba)"**.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bulukumba, 28 Oktober 2021

KEPALA BADAN,



**Andi Zulkifli Indrajaya, AP**

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP : 19760905 199412 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN BULUKUMBA  
**DINAS SOSIAL**

Jl. Serikaya No. 11 Telp. (0413) 81581 Fax. 81580 Kotak Pos 03  
BULUKUMBA 92512

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 460/ 980 /Dinsos/2021

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **SYARIFUDDIN, S.Sos, M.AP**  
NIP : 19640513 198611 1 005  
Jabatan : Kepala Dinas Sosial

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : FIFI JULIASTUTI SYARIF  
Nomor Pokok : 90400117050  
Program Studi : Akuntansi  
Institusi : UIN Alauddin Makassar  
Alamat : Graha Cipta Hertasning, Jl. Tun Abdul Razak Gowa

Telah melaksanakan penelitian pada Dinas Sosial Kabupaten Bulukumba dengan judul :  
"Pengaruh Standar Akuntansi Pemerintah, Sistem Pelaporan dan Kejelasan Sasaran  
Anggaran terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Dengan Pengendalian Akuntansi  
Sebagai Variabel Moderasi (Studi Pada Pemerintah Kabupaten Bulukumba)", berdasarkan  
Izin Penelitian dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTP)  
Nomor : 0586/DPMPSTP/X/2021 Tanggal 15 Oktober 2021.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bulukumba, 22 Oktober 2021

KEPALA DINAS



**SYARIFUDDIN, S.Sos, M.AP**

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP : 19640513 198611 1 005



**PEMERINTAH KABUPATEN BULUKUMBA**  
**DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA**

Alamat : Jln. Ahmad Yani No. 41 Bulukumba

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN  
Nomor: 800/189/Dispora

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Drs. Asrar Andi Amir  
Jabatan : Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bulukumba  
Pangkat : Pembina Utama Muda, IV/c  
NIP : 19641008 199303 1 009

Dengan ini Menerangkan bahwa Mahasiswi dibawah ini :

Nama : Fifi Juliastuti Syarif  
NIM : 90400117050  
Asal Perguruan Tinggi : UIN Alauddin Makassar  
Jurusan : Akuntansi

Benar-benar telah melakukan penelitian pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kab. Bulukumba dengan menggunakan metode penelitian Kuesioner pada Subbag Keuangan pada tanggal 27 Oktober 2021, untuk memperoleh data dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul “ **Pengaruh Standar Akuntansi Pemerintah, Sistem Pelaporan dan Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Dengan Pengendalian Akuntansi Sebagai Variabel Moderasi (Studi Pada Pemerintah Kabupaten Bulukumba)** “.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bulukumba, 27 Oktober 2021  
KEPALA DINAS,  
  
**Drs. Asrar Andi Amir**  
Pangkat / Pembina Utama Muda  
NIP : 19641008 199303 1 009





**PEMERINTAH KABUPATEN BULUKUMBA  
DINAS PERIKANAN**

JLN. YOS SUDARSO NOMOR 22 Tlp/Faks. ( 0413 ) 81624 BULUKUMBA  
<http://kelautandanperikananbulukumba.blogspot.com>  
E-Mail : [perikanan@bulukumbakab.go.id](mailto:perikanan@bulukumbakab.go.id)

---

**SURAT KETERANGAN MELAKUKAN PENELITIAN**

Nomor : 523/355 /DP

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Dinas Perikanan Kab. Bulukumba menerangkan :

Nama : **FIFI JULIASTUTI SYARIF**  
Nomor Pokok : 90400117050  
Program Studi : Akuntansi  
Institusi : UIN ALAUDDIN MAKASSAR  
Alamat : Graha Cipta Hertasning Jl. Tun Abdul Razak Kab. Gowa

Bahwa yang tersebut namanya diatas benar telah melakukan penelitian/pengambilan data di Dinas Perikanan Kabupaten Bulukumba dalam rangka penyusunan **SKRIPSI** dengan judul **PENGARUH STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH, SISTEM PELAPORAN DAN KEJELASAN SASARAN ANGGARAN TERHADAP AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH DENGAN PENGENDALIAN AKUNTANSI SEBAGAI VARIABEL MODERASI (STUDI PADA PEMERINTAH KABUPATEN BULUKUMBA)** yang berlangsung pada tanggal 25 Oktober s/d 26 Oktober 2021.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bulukumba, 27 Oktober 2021

Kepala Dinas



**Drs. ALFIAN A. MALIHUNGAN, M.Si**  
Pangkat : Pembina Utama Muda  
NIP. 19741029 199303 1 001



**PEMERINTAH KABUPATEN BULUKUMBA**  
**DINAS PERUMAHAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN**

Jalan K.H.Muchtar Lutfi Nomor : 1 Telepon (0413) 81003 Bulukumba

**SURAT KETERANGAN**

Nomor. **380 / DPP / x / 2021**

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Drs. ANDI MUSMAN.,MM  
Nip : 19660624 199603 1 003  
Pangkat/Gol : Pembina Tk. I / IV/b  
Jabatan : Sekretaris

Menyatakan bahwa Mahasiswa yang tersebut dibawah ini :

Nama : Fifi Juliasuti Syarif  
Nomor Pokok : 90400117050  
Jurusan : Akuntansi / UIN Alauddin Makassar

Benar yang bersangkutan tersebut diatas telah melaksanakan Penelitian pada Dinas Perumahan Permukiman dan Pertanahan Kab. Bulukumba dengan judul "PENGARUH STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH, SISTEM PELAPORAN DAN KEJELASAN SASARAN ANGGARAN TERHADAP AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH DENGAN PENGENDALIAN AKUNTANSI SEBAGAI VARIABEL MODERASI (STUDI PADA PEMERINTAH KABUPATEN BULUKUMBA)", untuk dipergunakan dalam rangka Penyusunan skripsi.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Bulukumba, 22 Oktober 2021

An. Kepala Dinas  
Sekretaris

**Drs. ANDI MUSMAN, MM**  
Pangkat: Pembina Tk. I (IV/b)  
Nip. 19660624 199603 1 003



**PEMERINTAH KABUPATEN BULUKUMBA**  
**DINAS PERUMAHAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN**

Jalan K.H.Muchtar Lutfi Nomor : 1 Telepon (0413) 81003 Bulukumba

**SURAT KETERANGAN**

Nomor. **380 / DPP / x / 2021**

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Drs. ANDI MUSMAN.,MM  
Nip : 19660624 199603 1 003  
Pangkat/Gol : Pembina Tk. I / IV/b  
Jabatan : Sekretaris

Menyatakan bahwa Mahasiswa yang tersebut dibawah ini :

Nama : Fifi Juliastuti Syarif  
Nomor Pokok : 90400117050  
Jurusan : Akuntansi / UIN Alauddin Makassar

Benar yang bersangkutan tersebut diatas telah melaksanakan Penelitian pada Dinas Perumahan Permukiman dan Pertanahan Kab. Buluumba dengan judul "PENGARUH STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH, SISTEM PELAPORAN DAN KEJELASAN SASARAN ANGGARAN TERHADAP AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH DENGAN PENGENDALIAN AKUNTANSI SEBAGAI VARIABEL MODERASI (STUDI PADA PEMERINTAH KABUPATEN BULUKUMBA)", untuk dipergunakan dalam rangka Penyusunan skripsi.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Bulukumba, 22 Oktober 2021

An. Kepala Dinas  
Sekretaris

**Drs. ANDI MUSMAN, MM**  
Pangkat: Pembina Tk. I (IV/b)  
Nip. 19660624 199603 1 003





PEMERINTAH KABUPATEN BULUKUMBA  
DINAS KETAHANAN PANGAN

Jalan Sultan Hasanuddin No. 43 Bulukumba. Telp/Fax (0413) 83087 e-mail : dkpblk@gmail.com

SURAT KETERANGAN

Nomor ~~xxx~~ 538 /DKP-BLK/XI/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ir.Hj. ARMIATI  
NIP : 19631117 199003 2 009  
Pangkat / Gol. Ruang : Pembina TK. I  
Jabatan : Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan  
Kabupaten Bulukumba.

Menyatakan bahwa Mahasiswi yang tersebut di bawah ini :

Nama : FIFI JUALIASTUTI SYARIF  
Nomor Pokok : 90400117050  
Jurusan Akuntansi : Akuntansi / UIN Alauddin Makassar

Benar yang bersangkutan tersebut di atas telah melaksanakan penelitian pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bulukumba dengan judul 'PENGARUH STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH, SISTEM PELAPORAN DAN KEJELASAN SASARAN ANGGARAN TERHADAP AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH DENGAN PENGENDALIAN AKUNTANSI SEBAGAI VARIABEL MODERASI (STUDI PADA PEMERINTAH KABUPATEN BULUKUMBA)', untuk dipergunakan dalam rangka penyusunan skripsi.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bulukumba, 3 Nopember 2021

an. KEPALA DINAS,  
SEKRETARIS



Ir.Hj. ARMIATI

Pangkat : Pembina TK. I

NIP. 19631117 199003 2 009



**PEMERINTAH KABUPATEN BULUKUMBA  
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPL**

Jl. Jenderal Ahmad Yani No. 20 Telp. (0413) 81171 Bulukumba

**SURAT KETERANGAN**

Nomor. 698/DKPS/XI/2021

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : MUHAMMAD HAEDAR, SE  
Nip : 19750511 199703 1 006  
Pangkat/Gol : Penata Tk.I/III d  
Jabatan : KASUBAG PROGRAM & PERENCANAAN

Menyatakan bahwa Mahasiswa yang tersebut dibawah ini :

Nama : Fifi Juliastuti Syarif  
Nomor Pokok : 90400117050  
Jurusan : Akuntansi / UIN Alauddin Makassar

Benar yang bersangkutan tersebut diatas telah melaksanakan Penelitian pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Bulukumba dengan judul "PENGARUH STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH, SISTEM PELAPORAN DAN KEJELASAN SASARAN ANGGARAN TERHADAP AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH DENGAN PENGENDALIAN AKUNTANSI SEBAGAI VARIABEL MODERASI (STUDI PADA PEMERINTAH KABUPATEN BULUKUMBA)", untuk dipergunakan dalam rangka Penyusunan skripsi.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Bulukumba, 02 November 2021

An. KEPALA DISDUKCAPIL KAB.BULUKUMBA  
KASUBAG PROGRAM & PERENCANAAN



**MUHAMMAD HAEDAR, SE**

19750511 199703 1 006



**PEMERINTAH KABUPATEN BULUKUMBA**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
Jalan Jend. Ahmad Yani No. 41, Telp. (0413) 81054 Bulukumba

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 800/6745/Dikbud-01/X/2021

Berdasarkan surat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu nomor: 0588/DPMPSTP/X/2021 tanggal 15 Oktober 2021 perihal izin penelitian, maka yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bulukumba menerangkan bahwa :

Nama : FIFI JULIASTUTI SYARIF  
Nomor Pokok : 90400117050  
Program Studi : Akuntansi  
Institusi : UIN Alauddin Makassar  
Alamat : Graha Cipta Hertasning Jl.Tun Abdul Razak, Gowa

Telah melakukan penelitian pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam rangka penyusunan SKRIPSI dengan judul "*Pengaruh Standar Akuntansi Pemerintah, Sistem Pelaporan dan Kejelasan Sasaran Anggaran terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dengan Pengendalian Akuntansi sebagai Variabel Moderasi (Study pada Pemerintah Kab.Bulukumba)*".

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bulukumba, 28 Oktober 2021



Kepala Dinas,  
Plt. Sekretaris

**Hj. Hamrina, S.Pd.,M.Si**  
Jabatan : Pembina Tk. I  
NIP : 196806242000122005



**PEMERINTAH KABUPATEN BULUKUMBA**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
Jl. Kenari No. 13 Telp( 0413 ) 84241-85060 Fax. ( 0413 ) 84241 Bulukumba

**SURAT KETERANGAN**  
**NOMOR : 281/X/DPMPTSP/2021**

Yang Bertanda Tangan dibawah ini :

Nama : SUKIATI S.Pd  
NIP : 196711141989032004  
Jabatan : Kasubag Umum dan Kepegawaian

Menyatakan bahwa Mahasiswa yang tersebut di bawah ini :

Nama : FIFI JULIASTUTI SYARIF  
Nomor Pokok : 90400117050  
Jurusan : Akuntansi/ UIN Alauddin Makassar

Benar yang bersangkutan diatas telah melaksanakan Penelitian Pada Kantor Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bulukumba, Pada Hari Jum'at Tanggal 22 Oktober 2021 dengan Judul PENGARUH STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH, SISTEM PELAPORAN DAN KEJELASAN SASARAN ANGGARAN TERHADAP AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH DENGAN PENGENDALIAN AKUNTANSI SEBAGAI VARIABEL MODERASI (STUDI PADA PEMERINTAH KABUPATEN BULUKUMBA).

Hasil penelitian tersebut dipergunakan untuk penyusunan Skripsi dan dipergunakan untuk melengkapi data penyusunan Skripsi.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bulukumba, 25 Oktober 2021

An. **KEPALA DINAS**  
**KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN**



**SUKIATI, S.Pd**  
Pangkat : Penata Tk./III.d  
NIP : 196711141989032004



**PEMERINTAH KABUPATEN BULUKUMBA  
DINAS PARIWISATA**

Jl. Lanto Dg. Pasewang No. 31 (0413) 83700 Fax. (0413) 83700  
E-mail : [disbudparbulukumba@gmail.com](mailto:disbudparbulukumba@gmail.com), website: [www. Bulukumbatourism.com](http://www.Bulukumbatourism.com)

**SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN**

Nomor: 070 / ~~095~~ / Dispar.5/XI/2021

Berdasarkan Surat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor 0588/DPMPPTS/X/2021 tanggal 15 Oktober 2021, Perihal izin Penelitian, dengan ini menerangkan bahwa:

N a m a : **Fifi Juliastuti Syarif**  
No. Pokok : 90400117050  
Prog. Studi : Akuntansi  
Institusi : UIN Alauddin Makassar  
Alamat : Graha Cipta Hertasning, Jl. Tun Abdul Razak Gowa

Telah melakukan penelitian dan pengambilan data mulai tanggal 26 Oktober s/d 01 November 2021 pada Dinas Pariwisata Kab. Bulukumba dengan judul skripsi **"PENGARUH STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH, SISTEM PELAPORAN DAN KEJELASAN SASARAN ANGGARAN TERHADAP AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH DENGAN PENGENDALIAN AKUNTANSI SEBAGAI VARIABEL MODERASI (STUDI PADA PEMERINTAH KABUPATEN BULUKUMBA"** sebagai syarat penyelesaian studi Strata Satu (1) pada program Akuntansi UIN Alauddin Makassar.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bulukumba, 01 November 2021  
An. Kepala Dinas Pariwisata  
Kepala Bidang Pengembangan Sumber  
Daya Pariwisata  
  
**Andi Ayu Cahyani, SH., MH**  
Pangkat Pembina  
Nip. 19780807 200212 2 010



**PEMERINTAH KABUPATEN BULUKUMBA**  
**DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN**  
Jl. Jl. Dahlia No. 2 Telp. (0413) 81048 bulukumba 92512

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 000/741/SK/DLHK/X/2021

Dengan ini menerangkan bahwa :

**N a m a** : FIFI JULIASTUTI SYARIF  
**Nomor Pokok** : 90400117050  
**Program Studi** : AKUNTANSI  
**Institusi** : UIN ALAUDDIN MAKASSAR  
**Alamat** : GRAHA CIPTA HERTASNING JL. TUN ABDUL RAZAK GOWA

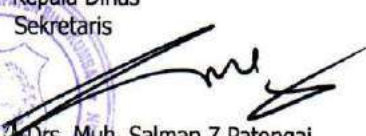
Telah melaksanakan Penelitian di Dinas Lingkungan Hidup Kehutanan Kabupaten Bulukumba dengan Judul " PENGARUH STANDAR AKUTANSI PEMERINTAH, SISTEM PELAPORAN DAN KEJELASAN SASARAN ANGGARAN TERHADAP AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH DENGAN PENGENDALIAN AKUNTANSI SEBAGAI VARIABEL MODERASI"

Demikian Surat Keterangan ini diberikan Kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bulukumba, 27 Oktober 2021

An. Kepala Dinas  
Sekretaris



  
Drs. Muh. Salman Z Patongai  
Pangkat : Pembina  
Nip : 19690712 200604 1 023

**Tembusan :**

1. Bupati Bulukumba di Bulukumba, sebagai Laporan
2. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bulukumba
3. Kepala Kesbangpol Bulukumba di Bulukumba
4. Arsip



**PEMERINTAH KABUPATEN BULUKUMBA  
DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH**

Jl. Yos Sudarso. No. 14. Telp / Fax : (0413) 81419, Email : [koperasiukm01@gmail.com](mailto:koperasiukm01@gmail.com), BULUKUMBA 92512

SURAT KETERANGAN

Nomor : 209 /DKUKM-BLK/Set.01/XI/2021

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : TAUFIK, SH. MH  
Nip : 19631231 199203 1 102  
Pangkat : Pembina Utama Muda (IV/c)  
Jabatan : Kepala Dinas Koperasi UKM

Menyatakan bahwa Mahasiswa yang tersebut dibawah ini :

Nama : Fifi Juliastuti Syarif  
Nomor : 90400117050  
Jurusan : Akuntansi / UIN Alauddin Makassar

Benar yang bersangkutan tersebut diatas telah melaksanakan penelitian pada kantor Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kab. Bulukumba dengan judul *PENGARUH STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH, SISTEM PELAPORAN DAN KEJELASAN SASARAN ANGGARAN TERHADAP AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH DENGAN PENGENDALIAN AKUNTANSI SEBAGAI VARIABEL MODERASI (STUDI PADA PEMERINTAH KAB. BULUKUMBA)*".

Untuk dipergunakan dalam rangka penyusunan Skripsi

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Bulukumba 03 November 2021

  
TAUFIK, SH, MH  
Pangkat : Pembina Utama Muda  
Nip : 19631231 199203 1 102



## PEMERINTAH KABUPATEN BULUKUMBA

### DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jl. Kusuma Bangsa No. 9 Bulukumba 92511

#### SURAT KETERANGAN

Nomor : 138/DISKOMINFO/X/2021

Yang Bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Sri Irma.M, SSTP, M.Si  
NIP : 19820311 200801 2 016  
Pangkat/Gol : Pembina IV/a  
Jabatan : Kasubag Program Pelaporan dan Keuangan

Menyatakan Bahwa Mahasiswa yang tersebut dibawah ini :

Nama : Fifi juliastuti Syaif  
Nomor Pokok : 90400117050  
Jurusan : Akuntansi / UIN Alauddin Makassar

Benar yang bersangkutan tersebut diatas telah melaksanakan penelitian pada kantor dinas komunikasi dan informatika Kab.Bulukumba “ dengan Judul **PENGARUH STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH,SISTEM PELAPORAN DAN KEJELASAN SASARAN ANGGARAN TERHADAP AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH DENGAN PENGENDALIAN AKUNTANSI SEBAGAI VARIABEL MODERASI (STUDI PADA PEMERINTAH KAB.BULUKUMBA)**”.

Untuk dipergunakan dalam rangka penyusunan Skripsi.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bulukumba, 28 Oktober 2021

An. KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
KASUBAG PROGRAM PELAPORAN DAN  
KEUANGAN

**Sri Irma.M, SSTP, M.Si**  
Pangkat : Pembina IV/a  
NIP.19820311 200801 2 016





PEMERINTAH KABUPATEN BULUKUMBA  
**DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN**

Jalan Durian Nomor 02 Telp. (0413) 81102 Bulukumba

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 010/213/DPK

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **SUFIATI, S. Sos, MM**  
NIP : 19820223 201001 2 015  
Pangkat/Gol.Ruang : Penata Muda Tk. I– III/b  
Jabatan : Plt. Kasubag Program, Pelaporan dan Keuangan

Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut di bawah ini:

Nama : **FIFI JULIASTUTI SYARIF**  
NIP : 90400117050  
Jurusan : Akuntansi/ UIN Alauddin Makassar

Benar yang bersangkutan tersebut di atas telah melaksanakan Penelitian Pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bulukumba dengan judul "**PENGARUH STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH, SISTEM PELAPORAN DAN KEJELASAN SASARAN ANGGARAN TERHADAP AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH DENGAN PENGENDALIAN AKUNTANSI SEBAGAI VARIABEL MODERASI (STUDI PADA PEMERINTAH KABUPATEN BULUKUMBA)**". Untuk dipergunakan dalam rangka penyusunan skripsi.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bulukumba, 29 Oktober 2021

An. Plt. KEPALA DINAS  
SEKERTARIS,



**ANDI ISMED A. BUBE, S.Sos**

Pangkat : Pembina Tk. I

NIP : 19680501 199403 1 009



**PEMERINTAH KABUPATEN BULUKUMBA**  
**DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR**

Jalan Anggrek No. 19 Kodepos 92512 Tlp. (0413) 81370 Bulukumba

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 206/PSDA-BUP/IX/2021

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Andi Alamsyah, ST, M.AP  
NIP : 19831115 201101 1 004  
Pangkat/ Gol : Penata / III.c  
Jabatan : Kasubag Program Pelaporan dan Keuangan


Menyatakan bahwa Mahasiswa yang tersebut dibawah ini :

Nama : Fifi Juliastuti Syarif  
Nomor Pokok : 90400117050  
Jurusan : Akuntansi / UIN Alauddin Makassar

Benar yang bersangkutan tersebut diatas telah melaksanakan Penelitian pada Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kab. Bulukumba dengan Judul “ PENGARUH STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH, SISTEM PELAPORAN DAN KEJELASAN SASARAN ANGGARAN TERHADAP AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH DENGAN PENGENDALIAN AKUNTANSI SEBAGAI VARIABEL MODERASI ( STUDI PADA PEMERINTAH KABUPATEN BULUKUMBA)”, untuk dipergunakan dalam rangka Penyusunan Skripsi.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Bulukumba, 26 Oktober 2021

Kasubag Program Pelaporan dan  
Keuangan  
  
**ANDI ALAMSYAH, ST, M.AP**  
Pangkat : Penata / III.c  
Nip. 19831115 201101 1 004



**PEMERINTAH KABUPATEN BULUKUMBA**

**DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN**

JL. SULTAN HASANUDDIN NO.44 Telp/Fax (0413) 2510128, BULUKUMBA 92514

E-mail : [dtphp.blk@gmail.com](mailto:dtphp.blk@gmail.com) Website : [www.distphbun.bulukumbakab.go.id](http://www.distphbun.bulukumbakab.go.id)

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 800 / 2232 -X1 / DTPHP/2021

1. Yang bertanda tangan dibawah ini :

- a. Nama : **EMIL YUSRI,SP.MP**  
b. Jabatan : **KEPALA DINAS**

Dengan ini menerangkan bahwa :

- a. Nama : **FIFI JULIASTUTI SYARIF**  
b. Nomor Induk : **90400117050**  
c. Program Studi : **Akuntansi**  
d. Institusi : **UIN ALUDDIN MAKASSAR**  
e. Alamat : **Graha Cipta Hertasning, Jl Tun Abdul Razak, Gowa**  
f. Pengikut : **1 (Satu) Orang**  
Bermaksud : **Mengadakan penelitian untuk penyusunan Skripsi yang berjudul " Pengaruh Standar Akuntansi Pemerintah, Sistem Pelaporan dan Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Dengan Pengendalian Akuntansi Sebagai Variabel Moderasi (Studi Pada Pemerintah Kabupaten Bulukumba)".**

2. Sehubungan dengan maksud tersebut yang bersangkutan akan melakukan penelitian terhitung Tanggal 08 Oktober – 01 Desember 2021 dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.  
3. Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.





**PEMERINTAH KABUPATEN BULUKUMBA**  
**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**  
JL. Angrek No.9 Kode Pos 92511 Kab. Bulukumba

**SURAT KETERANGAN**

Nomor: 080 /DPPPA/ X/2021

Yang Bertanda tangan dibawah ini :

Nama : AB Thawylah Amran  
Nip : 19670913 198603 2 001  
Pangkat/Gol : Pembina/IV.a  
Jabatan : Kabid Data dan Informasi

Menyatakan bahwa Mahasiswa Tersebut dibawah ini :

Nama : Fifi Juliastuti Syarif  
Nim : 90400117050  
Jurusan : Akuntansi / UIN Alauddin Makassar

Benar yang bersangkutan tersebut diatas telah melaksanakan penelitian pada kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Bulukumba. Dengan Judul "PENGARUH STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH, SISTEM PELAPORAN DAN KEJELASAN SASARAN ANGGARAN TERHADAP AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAHAN DENGAN PENGENDALIAN AKUNTANSI SEBAGAI VARIABEL MODERASI (STUDI PADA PEMERINTAHAN KAB. BULUKUMBA)".

Demikian Surat Keterangan Ini dibuat Untuk dipergunakan Sebagaimana Mestinya.

Dikeluarkan di : Bulukumba  
Pada Tanggal : 28 Oktober 2021

An. **KEPALA DINAS**  
**Kabid Data dan Informasi**



**AB. THAWYLAH AMRAN**  
Pangkat: Pembina/IV.a  
Nip. 19670913 198603 2 001



**PEMERINTAH KABUPATEN BULUKUMBA**  
**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**

Jalan Gajah Mada No 19 Telepon (0413) 81106 Bulukumba

**SURAT KETERANGAN**

Nomor. : 843/XI/DPMD/2021

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : A.Uke Indah Permatasari.S.STP.M.Si  
Nip : 19860806 200412 2 002  
Pangkat/Gol : Pembina IV/a  
Jabatan : Sekretaris

Menyatakan bahwa Mahasiswa yang tersebut dibawah ini :

Nama : Fifi Juliastuti Syarif  
Nomor Pokok : 90400117050  
Jurusan : Akuntansi / UIN Alauddin Makassar

Benar yang bersangkutan tersebut diatas telah melaksanakan Penelitian pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Bulukumba dengan judul "PENGARUH STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH, SISTEM PELAPORAN DAN KEJELASAN SASARAN ANGGARAN TERHADAP AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH DENGAN PENGENDALIAN AKUNTANSI SEBAGAI VARIABEL MODERASI (STUDI PADA PEMERINTAH KABUPATEN BULUKUMBA)", untuk dipergunakan dalam rangka Penyusunan skripsi.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Bulukumba, 01 November 2021

An. Kepala Dinas,  
Sekretaris,

**A.UKE INDAH PERMATASARI.S.STP.M.SI**

Pangkat: Pembina IV/a

Nip. 19860806 200412 2 002



**PEMERINTAH KABUPATEN BULUKUMBA**  
**DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**

JL. Kenari No. 15 Tlp. (0413) 81270 Kode Pos 92511

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 25 / DPPKB / XI / 2021

Yang Bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Drs. Abdul Khalik Rauf, M.Si  
NIP : 19640212 199203 1 016  
Pangkat/ Gol. : Pembina Utama Muda/ IV.c  
Jabatan : Kepala DPPKB Kab. Bulukumba

Menyatakan bahwa mahasiswa yang tersebut dibawah ini :

Nama : Fifi Julianti Astuti  
Nomor Induk : 90400117050  
Jurusan : Akuntansi/ UIN Alauddin Makassar

Benar yang bersangkutan tersebut diatas melaksanakan Penelitian Pada Kantor Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Bulukumba, dengan judul **"PENGARUH STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH, SISTEM PELAPORAN DAN KEJELASAN SASARAN ANGGARAN TERHADAP AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH DENGAN PENGENDALIAN AKUNTANSI SEBAGAI VARIABEL MODERASI (STUDI PADA PEMERINTAH KABUPATEN BULUKUMBA)"** yang akan berlangsung pada tanggal 8 Oktober s/d 1 Desember 2021.

Untuk dipergunakan dalam rangka penyusunan skripsi.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bulukumba, 22 Oktober 2021



**Drs. Abdul Khalik Rauf, M.Si**  
Pangkat : Pembina Utama Muda/ IV.c  
NIP. 19640212 199203 1 016



**PEMERINTAH KABUPATEN BULUKUMBA  
DINAS PEHUBUNGAN  
JALAN KUSUMA BANGSA NO 9 TLP (0413)81126 BULUKUMBA 92512**

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 254 /DISHUB/X/2021

Yang Bertanda Datangan Dibawa Ini :

Nama : IRSYADI A.AMIR, SE  
Nip : 19710919 199803 1 010  
Pangkat /Gol : Pembina Tk I, IV b  
Jabatan : Sekretaris

Menyatakan Bahwa Mahasiswa Tersebut Dibawa Ini :

Nama : Fifi Juliastuti Syarif  
Nomor Pokok : 90400117050  
Jurusan : Akutansi /Uin Alauddin Makassar

Benar Yang Bersangkutan Tersebut Diatas Telah Melaksanakan Penelitian Pada Kantor Dinas Perhubungan Kab.Bulukumba" Dengan Judul **PENGARUH STANDAR AKUTANSI PEMERINTAH, SISTEM PELAPORAN DAN KEJELASAN SASARAN ANGGARAN TERHADAP AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH DENGAN PENGENDALIAN AKUNTANSI SEBAGAI VARIABEL MODERASI ( STUDI PADA PEMERINTAHAN KAB. BULUKUMBA"**.

Untuk Dipergunakan Dalam Rangka Penyusunan Skripsi .

Demikian Surat Keterangan Ini Di Buat Untuk Dipergunakan Sebagaimana Mestinya.

Bulukumba 27 Oktober

  
SEKRETARIS  
  
IRSYADI A.AMIR, SE  
NIP: 197109191998031010



**PEMERINTAH KABUPATEN BULUKUMBA**  
**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**

Jl. Dr. Sam Ratulangi No. 1 Tlp/Fax (0413) 81095 Bulukumba

**SURAT KETERANGAN**

Nomor. **137**/PUTR/X/2021

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : EKA ARGIAN SAMPARAJA, S.Sos  
Nip : 19800116 201001 1 006  
Pangkat/Gol : Penata / III/c  
Jabatan : Kasubag Umum dan Kepegawaian

Menyatakan bahwa Mahasiswa yang tersebut dibawah ini :

Nama : FIFI JULIASTUTI SYARIF  
Nomor Pokok : 90400117050  
Jurusan : Akuntansi / UIN Alauddin Makassar

Benar yang bersangkutan tersebut diatas telah melaksanakan Penelitian pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Bulukumba dengan judul "PENGARUH STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH, SISTEM PELAPORAN DAN KEJELASAN SASARAN ANGGARAN TERHADAP AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH DENGAN PENGENDALIAN AKUNTANSI SEBAGAI VARIABEL MODERASI (STUDI PADA PEMERINTAH KABUPATEN BULUKUMBA)", untuk dipergunakan dalam rangka Penyusunan skripsi.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Bulukumba, 25 Oktober 2021



Kasubag. Umum dan Kepegawaian,

**EKA ARGIAN SAMPARAJA, S.Sos**  
Penata (III/c)  
Nip. 19800116 201001 1 006





**PEMERINTAH KABUPATEN BULUKUMBA**  
**DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN**

Jln. Bandeng No.20 Telp. 81081- 81264 Fax (0413)81083 Kab. Bulukumba

**REKOMENDASI IZIN PENELITIAN**

Nomor : 437.1 /Dagprin-Set/X/2021

Berdasarkan surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bulukumba, Nomor: 0588/DPMPSTP/X/2021, Tanggal 15 Oktober 2021, Perihal izin penelitian, maka dengan ini kami memberikan Rekomendasi Kepada :

Nama : **FIFI JULIASTUTI SYARIF**  
Nomor Pokok : **90400117050**  
Program Studi : **AKUNTANSI**  
Institusi : **UIN ALAUDDIN MAKASSAR**  
Alamat : **GRAHA CIPTA HERTASNING, JL. TUN ABD RAZAK, GOWA**

Bermaksud melakukan Penelitian di Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bulukumba dalam rangka penyusunan SKRIPSI dengan judul " **PENGARUH STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH, SISTEM PELAPORAN DAN KEJELASAN SASARAN ANGGARAN TERHADAP AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH DENGAN PENGENDALIAN AKUNTANSI SEBAGAI VARIABEL MODERASI (STUDI) PADA PEMERINTAH KABUPATEN BULUKUMBA** " yang akan berlangsung pada tanggal 08 Oktober s/d 01 Desember 2021

Rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bulukumba, 26 Oktober 2021



**MUNTHASIR NAWIR, S.STP, M.Si**

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP. 19710281996121001



**PEMERINTAH KABUPATEN BULUKUMBA**  
**DINAS TENAGA KERJA**

Alamat : Jl. Lanto Dg Pasewang No. 15 Bulukumba Kode Pos 92511

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 560/520 /Disnaker/XI/2021

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ROSDIATI.R, ST  
NIP : 19611231 198611 1 041  
Pangkat : Penata TK. I (III/d)  
Jabatan : Kasubag Program, Pelaporan dan Keuangan

Menyatakan bahwa Mahasiswa yang tersebut dibawah ini :

Nama : Fifi Juliastuti Syarif  
Nomor Pokok : 90400117050  
Jurusan : Akuntansi/UIN Alauddin Makassar

Benar yang bersangkutan tersebut diatas telah melaksanakan Penelitian Pada kantor Dinas Tenaga Kerja Kab.Bulukumba “ dengan Judul PENGARUH STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH, SISTEM PELAPORAN DAN PENJELASAN SASARAN ANGGARAN TERHADAP AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH DENGAN PENGENDALIAN AKUNTANSI SEBAGAI VARIABEL MODERASI (STUDI PADA PEMERINTAHKAB.BULUKUMBA)”

Untuk dipergunakan dalam rangka penyusunan Skripsi

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bulukumba,01 November 2021

An. KEPALA DINAS TENAGA KERJA  
Kasubag Program,Pelaporan dan Keuangan



**ROSDIATI.R, ST**  
NIP. 19760731 200802 2 001



**PEMERINTAH KABUPATEN BULUKUMBA  
DINAS KESEHATAN**

Jl. Dr. Sutomo No.2 Telp. 0413-81080 Fax. 0413-84646 Kode

**SURAT PERSETUJUAN**

Nomor : 2336/07-04/5.3/X/2021

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Dr. Hj. Wahyuni, AS, MARS  
NIP : 19641121 199803 2 002  
Pangkat / Gol : Pembina Utama Muda / IV c  
Jabatan : Kepala Dinas Kesehatan Kab.Bulukumba

Dengan ini menyatakan bahwa Mahasiswa yang tersebut di bawah ini :

Nama : FIFI JULIASTUTI SYARIF  
Nomor Pokok : 90400117050  
Program Studi : AKUNTANSI  
Instiusi : UIN ALAUDDIN MAKASSAR  
Alamat : GRAHA CIPTA HERTASNING, JL. TUN ABDUL  
RAZAK GOWA  
Pengikut : 1 (SATU) ORANG

Pada prinsipnya kami menyetujui untuk melakukan penelitian di Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba dalam rangka penyusunan SKRIPSI dengan judul "PENGARUH STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH, SISTEM PELAPORAN DAN KEJELASAN SASARAN ANGGARAN TERHADAP AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH DENGAN PENGENDALIAN AKUNTANSI SEBAGAI VARIABEL MODERASI (STUDI PADA PEMERINTAH KABUPATEN BULUKUMBA)" yang akan berlangsung pada tanggal 08 Oktober s/d 01 Desember 2021, sepanjang sesuai dengan ketentuan berlaku.

Demikian surat persetujuan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bulukumba, 27 Oktober 2021



Kepala Dinas Kesehatan  
Kabupaten Bulukumba,

Dr. Hj. Wahyuni, AS, MARS

Pangkat : Pembina Utama Muda  
NIP : 19641121 199803 2 002



**PEMERINTAH KABUPATEN BULUKUMBA  
DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN**

Jalan Teratai No. 13 Telp. (0413) 81228 Bulukumba 92512

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 981 / X / Disnakeswan

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Drs. H. SYAMSUL BAHRI, M. Si**  
NIP : 19680321 200604 1 012  
Pangkat/Gol : Pembina, IV/a  
Jabatan : Kasubag Keuangan

Menyatakan bahwa Mahasiswa yang tersebut dibawah ini :

Nama : **Fifi Juliastuti Syarif**  
Nomor Pokok : 90400117050  
Jurusan : Akuntansi/ UIN Alauddin Makassar

Benar yang bersangkutan tersebut diatas telah melaksanakan Penelitian Pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Bulukumba dengan Judul "**PENGARUH STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH, SISTEM PELAPORAN DAN KEJELASAN SASARAN ANGGARAN TERHADAP AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH DENGAN PENGENDALIAN AKUNTANSI SEBAGAI VARIABEL MODERASI (STUDI PADA PEMERINTAH KABUPATEN BULUKUMBA)**".

Untuk dipergunakan dalam rangka penyusunan Skripsi.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bulukumba, 29 Oktober 2021



a.n. **KEPALA DINAS  
KASUBAG KEUANGAN**

**Drs. H. SYAMSUL BAHRI, M. Si**  
Pangkat : Pembina, IV/a  
NIP: 19680321 200604 1 012



**PEMERINTAH KABUPATEN BULUKUMBA**  
**KANTOR KESBANG DAN POLITIK**

**Jln. DrSutomo No. 4 Tlpn (0413) 85003Bulukumba 92511**

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 868/052/X/Kesbangpol/2021

Yang bertandatangan dibawah ini :

N a m a : ROSMALADEWI, SH  
NIP : 197509302008012007  
Pangkat/Gol. : Penata Tk. I / III.d  
Jabatan : Kasubag Tata Usaha Kantor KesatuanBangsadanPolitik

Menyatakan bahwa Mahasiswa yang tersebut dibawah ini :

N a m a : Fifi Juliastuti Syarif  
Nomor Pokok : 90400117050  
Jurusan : Akuntansi/UIN Alauddin Makassar

Benar yang bersangkutan tersebut di atas telah melaksanakan Penelitian pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Bulukumba dengan Judul "**PENGARUH STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH, SISTEM PELAPORAN DAN KEJELASAN SASARAN ANGGARAN TERHADAP AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH DENGAN PRENGENDALIAN AKUNTANSI SEBAGAI VARIABEL MODERASI (STUDI PADA PEMERINTAH KAB. BULUKUMBA)**".

Untuk dipergunakan dalam rangka penyusunan Skripsi.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bulukumba, 25 Oktober 2021

An. KEPALA KANTOR KESBANGPOL  
KASUBAG TATA USAHA

  
**ROSMALADEWI, SH**  
Pangkat : Penata Tk. I  
NIP. 197509302008012007



**PEMERINTAH KABUPATEN BULUKUMBA**  
**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN DAMKAR**

Jl. Jend. Sudirman No. 2 Telp/Fax (0413) 84845 Bulukumba 92511

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 336/SATPOL PP & DAMKAR/E/2021

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Andi Baso Bintang, S.STP  
NIP : 19770610 199612 1 001  
Pangkat/Golongan : Pembina Utama Muda/IV.c  
Jabatan : Kepala Satpol PP dan Damkar Kabupaten Bulukumba

Menyatakan bahwa Mahasiswi yang tersebut dibawah ini:

Nama : Fifi Juliastuti Syarif  
Nomor Pokok : 90400117050  
Jurusan : Akuntansi / UIN Alauddin Makassar

Benar yang bersangkutan tersebut diatas telah melaksanakan Penelitian Pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Bulukumba dengan judul *"PENGARUH STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH, SISTEM PELAPORAN DAN KEJELASAN SASARAN ANGGARAN TERHADAP AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH DENGAN PENGENDALIAN AKUNTANSI SEBAGAI VARIABEL MODERASI (STUDI PADA PEMERINTAH KABUPATEN BULUKUMBA)"*, Untuk dipergunakan dalam rangka penyusunan Skripsi.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bulukumba, 26 Oktober 2021

KEPALA SATUAN,



ANDI BASO BINTANG, S.STP

Pangkat : Pembina Utama Muda



**LAMPIRAN 2**

**KUESIONER PENELITIAN**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) ALAUDDIN MAKASSAR  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Kampus I : Jl. Slt. Alauddin No. 63 Makassar Tlp. (0411) 864928 Fax 864923  
Kampus II : Jl. H. M. Yasin Limpo No. 36 Samata Sungguminasa – Gowa Tlp. 841879 Fax.8221400

Bulukumba, Oktober 2021

Perihal : Permohonan untuk Mengisi Kuesioner

Kepada

Yth. Bapak/Ibu

Di

Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir sebagai mahasiswa strata satu (S1) Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, maka penulis akan melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Standar Akuntansi Pemerintah, Sistem Pelaporan, dan Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Dengan Pengendalian Akuntansi Sebagai Variabel Moderasi (Studi Pada Pemerintah Kabupaten Bulukumba)”**. Data yang penulis peroleh dari Bapak/Ibu berikan akan dijamin kerahasiaannya serta identitas yang hanya penulis gunakan untuk kepentingan akademis. Kejujuran dan kebenaran data yang Bapak/Ibu berikan adalah bantuan yang tidak ternilai bagi penulis.

Penulis menyadari kesibukan dan keterbatasan waktu yang Bapak/Ibu miliki. Namun, penelitian ini tidak dapat penulis lakukan tanpa bantuan Bapak/Ibu. Oleh karena itu, penulis sangat memohon kesediaan Bapak/Ibu meluangkan waktu untuk mengisi kuesioner penelitian ini.

Demikian permohonan ini penulis ajukan, atas bantuan Bapak/Ibu penulis ucapkan banyak terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

Hormat saya

Peneliti,

Fifi Juliastuti Syarif

NIM : 90400117050



## KUESIONER PENELITIAN

### A. Identitas Responden

1. Nama Instansi : .....
2. Nama Responden : .....
3. Jenis Kelamin :  Laki – Laki  Perempuan
4. Usia : ..... Tahun
5. Latar Belakang Pendidikan :
  - Ekonomi / Akuntansi
  - Lainnya .....
6. Pendidikan Terakhir :
  - SMA
  - Diploma (D3)
  - Strata 1 (Sarjana)
  - Strata 2 (Master)
  - Strata 3 (Doktor)
7. Jabatan :
  - Kepala Badan/Dinas/Kantor
  - Kepala Sub Bagian Keuangan
  - Kepala Sub Bagian Program
8. Lama Bekerja :
  - 1 – 5 Tahun
  - 6 – 10 Tahun
  - 11 – 15 Tahun
  - 16 – 20 Tahun
  - $\geq$  21 Tahun

## B. Petunjuk Pengisian Kuesioner

Adapun petunjuk pengisian kuesioner adalah sebagai berikut :

- Mohon setiap pernyataan dibaca dengan teliti
- Pada kuesioner ini Bapak/Ibu /Saudara/i diminta untuk memberikan tanda ceklis (√) pada pilihan jawaban yang tersedia (rentang angka dari 1 samapai 5)
- Bapak/Ibu /Saudara/i dimohon hanya memberikan satu pilihan jawabanyang dianggap paling sesuai/ mewakili situasi yang sebenarnya. Pilihlah jawaban untuk setiap pernyataan :
  1. Jika jawaban anda “Sangat Tidak Setuju Setuju” (STS)
  2. Jika jawaban anda “Tidak Setuju” (TS)
  3. Jika jawaban anda “Netral” (N)
  4. Jika jawaban anda “Setuju” (S)
  5. Jika jawaban anda “Sanga Setuju” (SS)

### STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH

NO	PERNYATAAN	STS	TS	N	S	SS
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Pada instansi tempat saya bekerja, selalu menerapkan basis akrual dan basis kas untuk mengakui transaksi/peristiwa yang terjadi					
2.	Pada instansi tempat saya bekerja, Pimpinan selalu menyusun dan menyajikan laporan realisasi anggaran menggunakan akuntansi berbasis akrual, dan mencatat pendapatan					
3.	Pada instansi tempat saya bekerja, selalu menyusun dan menyajikan laporan sesuai dengan SAP.					
4.	Pada instansi tempat saya bekerja, informasi disajikan secara lengkap tentang penjelasan pos-pos dalam laporan keuangan pada setiap periode pelaporan					
5.	Pada instansi tempat saya bekerja, selalu mengakui dan mencatat persediaan berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada akhir periode akuntansi.					

Sumber : Suprihatin & Ananthy, 2019

### SISTEM PELAPORAN

NO	PERNYATAAN	STS	TS	N	S	SS
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Pada instansi tempat Saya bekerja, laporan keuangan telah disajikan secara lengkap.					
2.	Pada instansi tempat Saya bekerja, laporan keuangan yang dihasilkan telah memberikan informasi untuk mengoreksi aktivitas keuangan di masa lalu					
3.	Pada instansi tempat Saya bekerja, informasi keuangan telah disajikan untuk memenuhi kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan khusus.					
4.	Pada instansi tempat Saya bekerja, informasi keuangan pada laporan keuangan yang dihasilkan dapat diuji.					
5.	Pada instansi tempat Saya bekerja, informasi keuangan yang disajikan dapat dipahami oleh pengguna serta dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya.					

Sumber : Kartika, 2019

### KEJELASAN SASARAN ANGGARAN

NO	PERNYATAAN	STS	TS	N	S	SS
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Pada instansi tempat Saya bekerja, anggaran disusun oleh masing-masing pusat pertanggungjawaban					
2.	Pada instansi tempat Saya bekerja, anggaran yang disusun dapat membantu perencanaan kegiatan.					
3.	Pada instansi tempat Saya bekerja, anggaran yang disusun sudah memiliki kesesuaian antara pandangan pimpinan dengan pandangan bawahan.					
4.	Pada instansi tempat Saya bekerja, anggaran yang disusun dapat digunakan untuk memonitor kinerja pusat pertanggungjawaban.					
5.	Pada instansi tempat Saya bekerja, jumlah anggaran yang disusun sama dengan jumlah anggaran yang direalisasi.					

Sumber : Suhaesti, 2016

## AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH

NO	PERNYATAAN	STS	TS	N	S	SS
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Pada instansi tempat Saya bekerja, visi dan misi program telah ditetapkan sesuai rencana strategik organisasi					
2.	Pada instansi tempat Saya bekerja, melakukan analisis keuangan setiap kegiatan atau program selesai dilaksanakan.					
3.	Pada instansi tempat Saya bekerja, pelaksanaan kegiatan telah dikontrol dengan ukuran atau indikator kinerja yang jelas untuk menilai tingkat keberhasilan suatu kegiatan atau program					
4.	Pada instansi tempat Saya bekerja, telah membuat laporan kepada atasan untuk setiap kegiatan atau program yang telah dilaksanakan					
5.	Pada instansi tempat Saya bekerja, Laporan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam merencanakan program/kegiatan selanjutnya dan diterbitkan sesuai dengan waktu yang ditentukan					

Sumber : Faizal, 2018

## PENGENDALIAN AKUNTANSI

NO	PERNYATAAN	STS	TS	N	S	SS
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Pada instansi tempat Saya bekerja, informasi yang disajikan dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material					
2.	Pada instansi tempat Saya bekerja, setiap transaksi yang terjadi telah didukung dengan bukti transaksi yang valid dan sah.					
3.	Pada instansi tempat Saya bekerja, pelaksanaan tiap-tiap kegiatan telah memperhatikan efektifitas dan efisiensi.					
4.	Pada instansi tempat Saya bekerja, audit kepatuhan dilakukan agar setiap penggunaan dilandasi peraturan dan hukum yang berlaku.					

5.	Pada instansi tempat Saya bekerja, laporan yang disusun telah berdasarkan pada akuntansi pertanggungjawaban.					
----	--	--	--	--	--	--

Sumber : Zakiyuddin & Suyanto, 2015





**LAMPIRAN 3**  
**HASIL DATA PENELITIAN**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R

A. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Laki-laki	65	63,7	63,7	63,7
	Perempuan	37	36,3	36,3	100,0
	Total	102	100,0	100,0	

B. Karakteristik Reponden Berdasarkan Usia

Usia					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	30-39	24	23,5	23,5	23,5
	40-49	44	43,1	43,1	66,7
	50-59	34	33,3	33,3	100,0
	Total	102	100,0	100,0	

C. Karakteristik Responden Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan

Latar Belakang Pendidikan					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Ekonomi	38	37,3	37,3	37,3
	Lainnya	64	62,7	62,7	100,0
	Total	102	100,0	100,0	

D. Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir

Pendidikan Terakhir					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	S1	54	52,9	52,9	52,9
	S2	47	46,1	46,1	47,1
	S3	1	1,0	1,0	100,0
	Total	102	100,0	100,0	

E. Karakteristik Responden Berdasarkan Lama Bekerja

Lama Bekerja					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	≥ 21 Th	35	34,3	34,3	34,3
	11-15 Th	42	41,2	41,2	75,5
	16-20 Th	25	24,5	24,5	100,0
	Total	102	100,0	100,0	

F. Statistik Deskriptif

**Descriptive Statistics**

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Standar Akuntansi Pemerintah	102	16,00	25,00	21,9314	1,98639
Sistem Pelaporan Kejelasan Sasaran Anggaran	102	16,00	25,00	22,1569	2,04283
Pengendalian Akuntansi	102	16,00	25,00	21,4510	2,04711
Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	102	18,00	25,00	22,2353	2,09278
Valid N (listwise)	102	18,00	25,00	22,3333	2,26612

G. Statistik Deskriptif Pernyataan X1

**Statistics**

	X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X1.5
N Valid	102	102	102	102	102
Missing	0	0	0	0	0
Mean	4,3824	4,1569	4,4804	4,4902	4,4216
Sum	447,00	424,00	457,00	458,00	451,00

**X1.1**

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Tidak Setuju	1	1,0	1,0	1,0
Netral	1	1,0	1,0	2,0
Valid Setuju	58	56,9	56,9	58,8
Sangat Setuju	42	41,2	41,2	100,0
Total	102	100,0	100,0	

**X1.2**

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Tidak Setuju	2	2,0	2,0	2,0
Netral	8	7,8	7,8	9,8
Valid Setuju	64	62,7	62,7	72,5
Sangat Setuju	28	27,5	27,5	100,0
Total	102	100,0	100,0	

**X1.3**

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Setuju	53	52,0	52,0	52,0
Sangat Setuju	49	48,0	48,0	100,0



Total	102	100,0	100,0
-------	-----	-------	-------

#### X1.4

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Netral	2	2,0	2,0	2,0
Valid Setuju	48	47,1	47,1	49,0
Valid Sangat Setuju	52	51,0	51,0	100,0
Total	102	100,0	100,0	

#### X1.5

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Netral	2	2,0	2,0	2,0
Valid Setuju	55	53,9	53,9	55,9
Valid Sangat Setuju	45	44,1	44,1	100,0
Total	102	100,0	100,0	

### H. Statistik Deskriptif Pernyataan X2

#### I. Statistics

	X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	X2.5
N Valid	102	102	102	102	102
N Missing	0	0	0	0	0
Mean	4,4902	4,3039	4,4216	4,4608	4,4804
Sum	458,00	439,00	451,00	455,00	457,00

#### X2.1

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Setuju	52	51,0	51,0	51,0
Valid Sangat Setuju	50	49,0	49,0	100,0
Total	102	100,0	100,0	

#### X2.2

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Tidak Setuju	1	1,0	1,0	1,0
Valid Netral	2	2,0	2,0	2,9
Valid Setuju	64	62,7	62,7	65,7
Valid Sangat Setuju	35	34,3	34,3	100,0
Total	102	100,0	100,0	

**X2.3**

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Netral	2	2,0	2,0	2,0
Valid Setuju	55	53,9	53,9	55,9
Valid Sangat Setuju	45	44,1	44,1	100,0
Total	102	100,0	100,0	

**X2.4**

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Netral	3	2,9	2,9	2,9
Valid Setuju	49	48,0	48,0	51,0
Valid Sangat Setuju	50	49,0	49,0	100,0
Total	102	100,0	100,0	

**X2.5**

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Tidak Setuju	1	1,0	1,0	1,0
Valid Setuju	50	49,0	49,0	50,0
Valid Sangat Setuju	51	50,0	50,0	100,0
Total	102	100,0	100,0	

## I . Statistik Deskriptif Pernyataan X3

**X3.1**

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Tidak Setuju	1	1,0	1,0	1,0
Valid Netral	2	2,0	2,0	2,9
Valid Setuju	68	66,7	66,7	69,6
Valid Sangat Setuju	31	30,4	30,4	100,0
Total	102	100,0	100,0	

**X3.2**

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Netral	2	2,0	2,0	2,0
Valid Setuju	54	52,9	52,9	54,9
Valid Sangat Setuju	46	45,1	45,1	100,0
Total	102	100,0	100,0	

**X3.3**

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Setuju	64	62,7	62,7	62,7
Valid Sangat Setuju	38	37,3	37,3	100,0
Total	102	100,0	100,0	

**X3.4**

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Netral	6	5,9	5,9	5,9
Valid Setuju	59	57,8	57,8	63,7
Sangat Setuju	37	36,3	36,3	100,0
Total	102	100,0	100,0	

**X3.5**

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Sangat Tidak Setuju	1	1,0	1,0	1,0
Tidak Setuju	4	3,9	3,9	4,9
Valid Netral	9	8,8	8,8	13,7
Setuju	60	58,8	58,8	72,5
Sangat Setuju	28	27,5	27,5	100,0
Total	102	100,0	100,0	

## J. Statistik Deskripti Pernyataan Y

**Statistics**

	Y1	Y2	Y3	Y4	Y5
N Valid	102	102	102	102	102
Missing	0	0	0	0	0
Mean	4,4216	4,4216	4,4902	4,5196	4,4804
Sum	451,00	451,00	458,00	461,00	457,00

**Y1**

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Netral	1	1,0	1,0	1,0
Valid Setuju	57	55,9	55,9	56,9
Sangat Setuju	44	43,1	43,1	100,0
Total	102	100,0	100,0	

**Y2**

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Netral	5	4,9	4,9	4,9
Valid Setuju	49	48,0	48,0	52,9
Valid Sangat Setuju	48	47,1	47,1	100,0
Total	102	100,0	100,0	

**Y3**

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Netral	3	2,9	2,9	2,9
Valid Setuju	46	45,1	45,1	48,0
Valid Sangat Setuju	53	52,0	52,0	100,0
Total	102	100,0	100,0	

**Y4**

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Netral	2	2,0	2,0	2,0
Valid Setuju	45	44,1	44,1	46,1
Valid Sangat Setuju	55	53,9	53,9	100,0
Total	102	100,0	100,0	

**Y5**

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Netral	5	4,9	4,9	4,9
Valid Setuju	43	42,2	42,2	47,1
Valid Sangat Setuju	54	52,9	52,9	100,0
Total	102	100,0	100,0	

**K. Statistik Deskriptif Pernyataan M****Statistics**

	M1	M2	M3	M4	M5
N Valid	102	102	102	102	102
N Missing	0	0	0	0	0
Mean	4,2745	4,5294	4,4216	4,4216	4,5882
Sum	436,00	462,00	451,00	451,00	468,00

**M1**

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Tidak Setuju	3	2,9	2,9	2,9
Netral	11	10,8	10,8	13,7
Valid Setuju	43	42,2	42,2	55,9
Sangat Setuju	45	44,1	44,1	100,0
Total	102	100,0	100,0	

**M2**

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Setuju	48	47,1	47,1	47,1
Valid Sangat Setuju	54	52,9	52,9	100,0
Total	102	100,0	100,0	

**M3**

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Netral	2	2,0	2,0	2,0
Valid Setuju	55	53,9	53,9	55,9
Sangat Setuju	45	44,1	44,1	100,0
Total	102	100,0	100,0	

**M4**

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Netral	1	1,0	1,0	1,0
Valid Setuju	57	55,9	55,9	56,9
Sangat Setuju	44	43,1	43,1	100,0
Total	102	100,0	100,0	

**M5**

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Setuju	42	41,2	41,2	41,2
Valid Sangat Setuju	60	58,8	58,8	100,0
Total	102	100,0	100,0	

L. Uji Validitas

**Correlations**

		X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X1.5	Standar Akuntansi Pemerintah
X1.1	Pearson Correlation	1	,326**	,534**	,581**	,511**	,820**
	Sig. (2-tailed)		,001	,000	,000	,000	,000
	N	102	102	102	102	102	102
X1.2	Pearson Correlation	,326**	1	,163	,004	,094	,483**
	Sig. (2-tailed)	,001		,101	,964	,347	,000
	N	102	102	102	102	102	102
X1.3	Pearson Correlation	,534**	,163	1	,656**	,418**	,748**
	Sig. (2-tailed)	,000	,101		,000	,000	,000
	N	102	102	102	102	102	102
X1.4	Pearson Correlation	,581**	,004	,656**	1	,751**	,806**
	Sig. (2-tailed)	,000	,964	,000		,000	,000
	N	102	102	102	102	102	102
X1.5	Pearson Correlation	,511**	,094	,418**	,751**	1	,755**
	Sig. (2-tailed)	,000	,347	,000	,000		,000
	N	102	102	102	102	102	102
Standar Akuntansi Pemerintah	Pearson Correlation	,820**	,483**	,748**	,806**	,755**	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000	
	N	102	102	102	102	102	102

\*\* . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

**M A K A S S A R**

**Correlations**

		X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	X2.5	Sistem Pelaporan
X2.1	Pearson Correlation	1	,592**	,403**	,423**	,423**	,744**
	Sig. (2-tailed)		,000	,000	,000	,000	,000
	N	102	102	102	102	102	102
X2.2	Pearson Correlation	,592**	1	,561**	,309**	,765**	,859**
	Sig. (2-tailed)	,000		,000	,002	,000	,000
	N	102	102	102	102	102	102

X2.3	Pearson Correlation	,403**	,561**	1	,139	,410**	,664**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000		,163	,000	,000
	N	102	102	102	102	102	102
X2.4	Pearson Correlation	,423**	,309**	,139	1	,555**	,649**
	Sig. (2-tailed)	,000	,002	,163		,000	,000
	N	102	102	102	102	102	102
X2.5	Pearson Correlation	,423**	,765**	,410**	,555**	1	,845**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000		,000
	N	102	102	102	102	102	102
Sistem Pelaporan	Pearson Correlation	,744**	,859**	,664**	,649**	,845**	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000	
	N	102	102	102	102	102	102

\*\* . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

#### Correlations

		X3.1	X3.2	X3.3	X3.4	X3.5	Kejelasan Sasaran Anggaran
X3.1	Pearson Correlation	1	,522**	,298**	,436**	,161	,657**
	Sig. (2-tailed)		,000	,002	,000	,106	,000
	N	102	102	102	102	102	102
X3.2	Pearson Correlation	,522**	1	,517**	,565**	,274**	,786**
	Sig. (2-tailed)	,000		,000	,000	,005	,000
	N	102	102	102	102	102	102
X3.3	Pearson Correlation	,298**	,517**	1	,511**	,340**	,725**
	Sig. (2-tailed)	,002	,000		,000	,000	,000
	N	102	102	102	102	102	102
X3.4	Pearson Correlation	,436**	,565**	,511**	1	,189	,738**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000		,057	,000
	N	102	102	102	102	102	102
X3.5	Pearson Correlation	,161	,274**	,340**	,189	1	,629**
	Sig. (2-tailed)	,106	,005	,000	,057		,000
	N	102	102	102	102	102	102
Kejelasan Sasaran Anggaran	Pearson Correlation	,657**	,786**	,725**	,738**	,629**	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000	
	N	102	102	102	102	102	102

\*\* . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

### Correlations

		Y1	Y2	Y3	Y4	Y5	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah
Y1	Pearson	1	,584**	,513**	,556**	,465**	,760**
	Correlation						
	Sig. (2-tailed)		,000	,000	,000	,000	,000
Y2	N	102	102	102	102	102	102
	Pearson	,584**	1	,722**	,582**	,550**	,853**
	Correlation						
Y3	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000	,000
	N	102	102	102	102	102	102
	Pearson	,513**	,722**	1	,559**	,628**	,848**
Y4	Correlation						
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000	,000
	N	102	102	102	102	102	102
Y5	Pearson	,556**	,582**	,559**	1	,543**	,795**
	Correlation						
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000	,000
Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	N	102	102	102	102	102	102
	Pearson	,465**	,550**	,628**	,543**	1	,794**
	Correlation						
Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000	,000
	N	102	102	102	102	102	102
	Pearson	,760**	,853**	,848**	,795**	,794**	1
Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	Correlation						
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000	,000
	N	102	102	102	102	102	102

\*\* . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

### Correlations

		M1	M2	M3	M4	M5	Pengendalian Akuntansi
M1	Pearson	1	,413**	,340**	,353**	,428**	,743**
	Correlation						
	Sig. (2-tailed)		,000	,000	,000	,000	,000
M2	N	102	102	102	102	102	102
	Pearson	,413**	1	,415**	,315**	,408**	,672**
	Correlation						
M2	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,001	,000	,000	,000
	N	102	102	102	102	102	102
	Pearson						



M3	Pearson Correlation	,340**	,415**	1	,570**	,588**	,760**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000		,000	,000	,000
	N	102	102	102	102	102	102
M4	Pearson Correlation	,353**	,315**	,570**	1	,610**	,742**
	Sig. (2-tailed)	,000	,001	,000		,000	,000
	N	102	102	102	102	102	102
M5	Pearson Correlation	,428**	,408**	,588**	,610**	1	,793**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000		,000
	N	102	102	102	102	102	102
Pengendalian Akuntansi	Pearson Correlation	,743**	,672**	,760**	,742**	,793**	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000	
	N	102	102	102	102	102	102

\*\* . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

#### M. Uji Reliabilitas

##### Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,756	5

##### Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,809	5

##### Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,725	5

##### Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,869	5

### Reliability Statistics

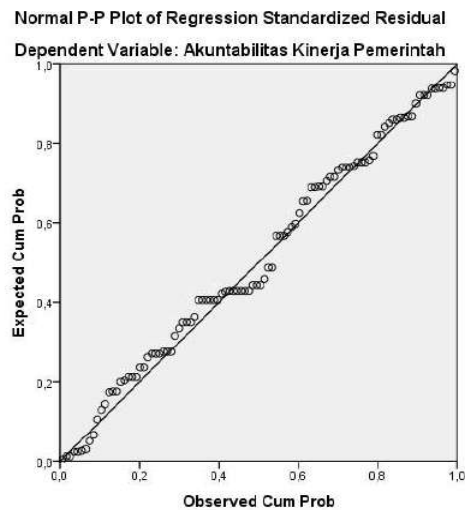
Cronbach's Alpha	N of Items
,780	5

### N. Uji Normalitas

#### One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		102
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	,0000000
	Std. Deviation	,97228097
	Absolute	,068
Most Extreme Differences	Positive	,068
	Negative	-,064
Kolmogorov-Smirnov Z		,691
Asymp. Sig. (2-tailed)		,726

- a. Test distribution is Normal.
- b. Calculated from data.



O. Uji Multikolinieritas

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 Standar Akuntansi Pemerintah	,344	2,904
Sistem Pelaporan	,325	3,078
Kejelasan Sasaran Anggaran	,344	2,904
Pengendalian Akuntansi	,409	2,446

a. Dependent Variable: Akuntabilitas Kinerja Pemerintah

P. Uji Heterokedasitas

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	2,003	,698		2,869	,005
1 Standar Akuntansi Pemerintah	,015	,049	,050	,298	,766
Sistem Pelaporan	-,067	,049	-,237	-1,362	,176
Kejelasan Sasaran Anggaran	-,024	,048	-,085	-,506	,614
Pengendalian Akuntansi	,020	,043	,074	,479	,633

a. Dependent Variable: AbsUt

MAKASSAR

Q. Uji Regresi Berganda

**Model Summary**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,861 <sup>a</sup>	,742	,734	1,16933

a. Predictors: (Constant), Kejelasan Sasaran Anggaran, Sistem Pelaporan, Standar Akuntansi Pemerintah

**ANOVA<sup>a</sup>**

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	384,668	3	128,223	93,776	,000 <sup>b</sup>
	Residual	133,998	98	1,367		
	Total	518,667	101			

a. Dependent Variable: Akuntabilitas Kinerja Pemerintah

b. Predictors: (Constant), Kejelasan Sasaran Anggaran, Sistem Pelaporan, Standar Akuntansi Pemerintah

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-,423	1,387		-,305	,761
	Standar Akuntansi Pemerintah	,258	,099	,226	2,602	,011
	Sistem Pelaporan	,243	,092	,219	2,641	,010
	Kejelasan Sasaran Anggaran	,546	,094	,493	5,836	,000

a. Dependent Variable: Akuntabilitas Kinerja Pemerintah

R. Uji Regresi Moderasi (MRA)

S. Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,919 <sup>a</sup>	,845	,833	,92506

a. Predictors: (Constant), X3\_M, Zscore: Pengendalian Akuntansi, X2\_M, X1\_M, Zscore: Standar Akuntansi Pemerintah, Zscore: Sistem Pelaporan, Zscore: Kejelasan Sasaran Anggaran

ANOVA<sup>a</sup>

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	438,228	7	62,604	73,158	,000 <sup>b</sup>
	Residual	80,439	94	,856		
	Total	518,667	101			

a. Dependent Variable: Akuntabilitas Kinerja Pemerintah

b. Predictors: (Constant), X3\_M, Zscore: Pengendalian Akuntansi, X2\_M, X1\_M, Zscore: Standar Akuntansi Pemerintah, Zscore: Sistem Pelaporan, Zscore: Kejelasan Sasaran Anggaran

Coefficients<sup>a</sup>

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	21,925	,180		121,524	,000
Zscore: Standar Akuntansi Pemerintah	,451	,160	,199	2,818	,006
Zscore: Sistem Pelaporan	,164	,169	,072	,969	,335
Zscore: Kejelasan Sasaran Anggaran	,900	,178	,397	5,062	,000
Zscore: Pengendalian Akuntansi	,832	,159	,367	5,227	,000
X1_M	,553	,229	,123	2,417	,018
X2_M	,421	,205	,101	2,051	,043
X3_M	-,281	,210	-,067	-1,341	,183

a. Dependent Variable: Akuntabilitas Kinerja Pemerintah



**LAMPIRAN 4**

**RIWAYAT HIDUP**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

**ALAUDDIN**

MAKASSAR

## RIWAYAT HIDUP PENULIS



**Fifi Juliastuti Syarif.** Penulis lahir di Bulukumba, 16 Juli 1999. Anak kedua dari tiga bersaudara, buah hati dari pasangan Bapak Syarifuddin dan Ibu Nuraida. Tahun 2005, penulis mulai menempuh pendidikan sekolah dasar di SD Negeri 58 Tanete, dan lulus pada tahun 2011. Kemudian melanjutkan ke jenjang sekolah menengah pertama di SMP Negeri 14 Bulukumba hingga tahun 2014 dan menamatkan jenjang menengah atas di SMA Negeri 1 Bulukumba hingga lulus pada tahun 2017. Setelah menyelesaikan studi di jenjang SMA, penulis kemudian melanjutkan pendidikan pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Alauddin Makassar pada tahun 2017 dan berhasil menyelesaikan studi sarjana pada tahun 2022.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R